



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
MANDAILING NATAL TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN LANJUTAN DENGAN AGENDA
PEMBUKTIAN (PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU AHLI
SECARA DARING (ONLINE)) SERTA PENYERAHAN ALAT-
ALAT BUKTI TAMBAHAN DI PERSIDANGAN
(III)**

JAKARTA

KAMIS, 25 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020

PEMOHON

1. Muhammad Jafar Sukhairi
2. Atika Azmi Utammi

TERMOHON

KPU Kabupaten Mandailing Natal

ACARA

Pemeriksaan Persidangan Lanjutan Dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli Secara Daring (Online)) Serta Penyerahan Alat-Alat Bukti Tambahan Di Persidangan (III)

**Kamis, 25 Februari 2021, Pukul 13.37 - 18.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made Gede W.T.K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Jafar Sukhairi
2. Atika Azmi Utammi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Adi Mansar
2. Guntur Rambe
3. Ahmad Sofyan Hussein Rambe

C. Ahli dari Pemohon:

Zainal Arifin Mochtar

D. Saksi dari Pemohon:

1. Hizrah Perdana Nasution
2. Rahmad Daulay
3. Ridwan Agustua Hutabarat

E. Termohon:

1. Fadhilah Syarief
2. Muhammad Yasir Nasution

F. Kuasa Hukum Termohon:

Mulyadi

G. Pihak Terkait:

1. Dahlan Hasan Nasution
2. Aswin Parinduri

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. M. Amin Nasution
2. Muhammad Arief Budiman Nasution

I. Ahli dari Pihak Terkait:

Mahaarum Kusuma Pertiwi

J. Saksi dari Pihak Terkait:

1. Anjur Brutu
2. Darwis Nasution
3. Indah Juniarti

K. Bawaslu:

1. Maklum Pelawi
2. Ali Aga Hasibuan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semua Pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Pemberi Keterangan yang hadir langsung sini maupun yang melalui Zoom. Kita ... agenda kita pada hari ini adalah sidang pembuktian untuk Perkara Nomor 86.PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Mandailing Natal, ya. Baik. Sidang untuk Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Mandailing Natal dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut ada beberapa hal yang perlu kami permaklumkan. Pertama, selama kita di ruangan sidang ini agar tetap menggunakan apa ... masker secara benar dalam keadaan bicara atau dalam keadaan diam. Kemudian kalau masih ada bukti tambahan dari semua pihak, ya, agar diserahkan pada awal persidangan sehingga sebelum akhir sidang nanti kami bisa ... kita bisa sahkan. Kita karena kalau Bapak serahkan di akhir sidang nanti enggak ada waktu lagi untuk melakukan verifikasi. Kita minta di awal agar kami bisa memverifikasi untuk selanjutnya disahkan pada akhir persidangan nanti.

Pak Daniel Yang Mulia Pak Daniel, Yang Mulia Pak Daniel. Baik untuk selanjutnya saya undang dan hormat Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic untuk memandu pemeriksaan perkara ini. Silakan Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kuasa Pemohon yang hadir pada kesempatan ini, saya sendiri Adi Mansar. Yang kedua, Guntur Rambe itu yang luring, Yang Mulia. Yang daring di sana ada Prinsipal Muhammad Jafar Sukhairi dan Atika Azmi Utammi. Ditambah satu fatmir kami, Kuasa Hukum Ahmad Sofyan Hussein Rambe, Yang Mulia.

Dan kemudian ada saksi fakta sesuai dengan anjuran kita diberi 3 dan Saksi fakta kita, satu, Rahmad Daulay. Yang kedua, Hizrah Perdana Nasution. Yang ketiga, Ridwan Agustua Hutabarat sudah pada hadir di

sana, Yang Mulia. Dan kemudian kita menghadirkan satu Ahli, kalau pun di awal sempat kita mohonkan 2. Yang hadir di sana Bapak Zainal Arifin Mochtar untuk Ahli kami, Yang Mulia. Nah, kemudian di belakangnya ada hanya Juru Sumpah, dua orang, Yang Mulia. Satu dari Nasrani dan satu yang Muslim. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih. Kemudian, Pihak Termohon, silakan.

5. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dari Termohon dalam ruangan sidang ini yang pertama saya sendiri Mulyadi, S.H., M.H., dari Kuasa Hukum KPU Mandailing Natal didampingi dengan Bapak Yasir dari Komisioner KPU Mandailing Natal. Yang daring hadir Ketua KPU Mandailing Natal, yaitu Bapak Fadhilah Syarief, S.H., demikian.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Dari Bawaslu, silakan.

7. BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir dari Bawaslu Mandailing Natal di ruangan sidang ada 2 orang, saya sendiri Maklum Pelawi selaku Anggota Bawaslu Divisi Pengawasan. Di sebelah kanan saya, Bapak Ali Aga, Anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran. Yang hadir di daring, Yang Mulia, ada Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, kemudian Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan juga satu orang Anggota Bawaslu Mandailing Natal. Terima kasih, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Kemudian dari Pihak Terkait.

9. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pihak Terkait yang hadir di ruang sidang ini saya sendiri sebagai Kuasa Hukum, Muhammad Amin Nasution, S.H., M.H., dan Aswin Parinduri, Prinsipal wak ... Calon Wakil Bupati Paslon Nomor 2. Yang daring Kuasa Hukum, Muhammad Arief Budiman Nasution, masih asisten, makanya tidak pakai toga. Kemudian Prinsipal, Bapak Dahlan Hasan Nasution.

Kemudian, Saksi fakta kami ada 3 orang nanti, satu, Anjur Brutu, Darwis Nasution, dan Indah Juniarti. Sedangkan Ahli yang kami ajukan dalam persidangan ini adalah Mahaarum Kusuma Pertiwi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Terima kasih, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih. Acara hari adalah pemeriksaan persidangan lanjutan mendengar keterangan saksi atau ahli, dan pengesahan alat bukti. Yang pertama, kita akan dengar Saksi dan Ahli dari Pemohon. Sebelumnya, nanti akan dilaksanakan sumpah.

Yang pertama untuk Saksi Hizrah Perdana Nasution, ada saksinya? Yang kedua, Rahmad Daulay, yang ketiga Ridwan Agustua Hutabarat. Ini karena ada yang beragama Islam dua orang, kemudian beragama Kristen satu, nanti yang akan didahulukan yang beragama Islam. Kemudian setelah itu, baru dilanjutkan dengan ahli.

Untuk itu, mohon berkenan Yang Mulia Pak Suharyoto untuk sumpah bagi yang beragama Islam.

11. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan berdiri saksi dari Pemohon. Berdiri semua, Pak. Hizrah Perdana Nasution yang mana? Oke. Rahmad Daulay? Oke. Ridwan Agustua Hutabarat, ya. Baik, yang agama Islam saya pandu lafal sumpahnya, nanti agama Kristen oleh Bapak Daniel.

Jadi, yang agama Islam dulu. Rohaniwannya mana, juru sumpah untuk Islam, yang muslim. Alqurannya mana, Pak? Alqurannya mana? Baik. Bapak agak miring saja menghadap ke ... di samping, di samping, di samping menghadap ke saksi-saksi. Nah, gitu, betul. Yang agama Islam, Pak Hizrah dan Pak Ridwan Daulay ikuti saya ya, Pak, ya?

"Bismillahirrahmaanirrahiim." Ada suaranya, tidak ya? Kita tes dulu suaranya kalau begitu. Ada mik tidak, ada miknya enggak, mik? Coba miknya dipegang. Oke. Kita tes dulu. "Bismillahirrahmaanirrahiim."

12. SELURUH SAKSI DARI PEMOHON:

Bismillahirrahmaanirrahiim.

13. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Kita ulang kalau begitu. "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

14. SELURUH SAKSI DARI PEMOHON:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

15. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Sekarang dilanjutkan dengan saksi Ridwan Agustua Hutabarat. Rohaniwannya sudah siap? Yang Israh dan Rahmat bisa geser sebentar atau langsung duduk kalau sudah selesai. Yang Kristen di sebelah kiri berdirinya, tangan kirinya di atas Al kitab, tangan kanannya nanti diangkat dengan 2 jari. Ya, sebelah kiri ya. Kamernya agak diturunkan dikit, ya agak digeser ke tengah. Oke. Tangannya Saudara Ridwan ... bukan, Al kitabnya di bawah. Ya, oke, ikuti saya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

17. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Silakan duduk.

Baik. Pemohon, dari 3 saksi yang dihadirkan, sebelum saya beri kesempatan untuk hal-hal yang mau ditanyakan. Yang pertama, saya ingin konfirmasi Saksi Rahmad Daulay.

19. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Ya, Pak.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Apakah Saudara seorang ASN (Aparatur Sipil Negara)?

21. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Ya. Ya, Pak.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Apakah ada izin untuk menyampaikan kesaksian hari ini?

23. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Inisiatif sendiri, Pak.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Gimana?

25. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Inisiatif sendiri, Pak.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Suaranya kurang jelas.

27. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Inisiatif sendiri, Pak.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Inisiatif sendiri. Termohon sudah dengar, ya? Dari Pihak Terkait juga dengar?

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Dengar, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Mohon izin, karena ASN, kami tetap mengharapkan ada izin atau surat tugas dari atasannya. Terima kasih, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, dari Pihak Terkait berharap harus ada izin dari atasannya karena Beliau adalah ASN. Baik, dari Meja Hakim akan tetap mendengar, itu menjadi catatan dalam persidangan ini. Itu akan dicatat, ya.

Baik, Pemohon dari 3 Saksi ini apa yang mau digali dari kehadiran Saksi-Saksi ini? Silakan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Terima kasih, Yang Mulia. Dari 3 Saksi yang kami hadirkan ini karena satu adalah kepala desa aktif. Yang kedua, satu lagi ASN aktif. Yang ketiga, Saksi di TPS 2 Desa Kampung Baru, Kecamatan Medan Utara.

Jadi, yang mau kami pertanyakan kepada Saksi kami yang pertama Hizrah Perdana, ini berkenaan dengan keterlibatan camat dalam mengumpulkan kepala desa dan kemudian meminta bantuan kepada kepala desa sejumlah uang, dan kemudian uang itu dimanfaatkan (...)

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, cukup, tidak usah uraikan lebih panjang. Jadi untuk menjelaskan adanya money politics, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya, pembagian BLT dana desa.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, BLT dana desa.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Oke, Saudara Hizrah bisa dijelaskan terkait dengan kehadiran Saudara dalam persidangan saat ini? Silakan.

39. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Hizrah Perdana Nasution, saya sebagai Kepala Desa aktif di Desa Sibinai, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal.

Jadi, perlu saya jelaskan, Yang Mulia. Saya sebagai Saksi keterlibatan kepala desa dalam pemenangan pilkada untuk Paslon Nomor Urut 2. Dimana, Yang Mulia, di tanggal 6 Desember 2020, kami diarahkan untuk membuat pertemuan dengan Pak Camat Kecamatan Muara Sipongi, Pak Aspan, di suatu tempat di rumah makan family yang letaknya di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Muara Sipongi. Dimana di waktu pertemuan itu kami yang hadir ada beberapa kepala desa yang bisa saya sebutkan, Yang Mulia, desanya berkisar 5 desa, dan Camat Muara Sipongi, Kepala Desa Bandar Panjang, Kepala Desa Tanjung Alai, Kepala Desa Koto Baringin, dan saya sendiri Kepala Desa Sibinai. Dimana di waktu pertemuan itu kami membahas untuk pencairan dana desa tahap ke lima di bulan Desember.

Disamping hal itu kami, Yang Mulia, juga bercerita tentang bagaimana untuk menghadapi pilkada yang tepatnya diadakan di tanggal 9 Desember karena hadir pak camat di lokasi tersebut, kami tidak bisa memusyawarahkan secara keseluruhan karena desa kami semua se-kecamatan berjumlah 15 Desa, dimana di situ arah dan tujuan untuk pembicaraan pencairan dana desa dan untuk mengatasi pilkada belum terembuskan karena hanya beberapa kepala desa. Tetapi besoknya di tanggal 7, kami kembali mengadakan pemusyawaratan yang juga dihadiri oleh Camat Muara Sipongi bertambah lagi kepala desa yang hadir dari Kecamatan Muara Sipongi, dan di situ juga hadir pula anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal atas nama Erwin Effendi Nasution ... dan Erwin Effendi Lubis dan dari Fraksi Golkar dan juga Saudara Ahmad, yang notabene adalah Tim Pemenang 02.

Di waktu pertemuan itu, Saudara Erwin mengatakan dan pak camat, "Apa yang bisa diperbuat oleh kepala desa untuk memenangkan Paslon Nomor 2?" Karena harus kami ... kalian ingat Pak Kepala Desa bahwa Bapak Bupati kita sampai bulan Enam masih menjabat sebagai pembina kita, Bupati Mandailing Natal, dan di saat itu juga, "Saya berharap kepada kepala desa siap jadi komando di desa masing-masing untuk kemenangan Paslon Nomor 2. Jadi saya berharap ..." kata Saudara Erwin, "Agar kepala desa mau berkorban moril maupun materiil." Jadi kami kepala desa yang hadir sesudah itu mengadakan juga di lokasi yang sama, di rumah makan family, di Desa Tanjung Alai, kami juga terus melaksanakan musyawarah apa yang kami perbuat, jadi di dalam musyawarah itu Pak Camat juga hadir.

Sewaktu bermusyawarah karena hari itu hari Senin, tanggal 7 sedangkan Pilkada akan dilaksanakan hari Rabu, tanggal 9 Desember, jadi kami dalam bermusyawarah terjadilah kesepakatan untuk membantu

secara moril maupun materiil dan disepakatilah ada bantuan untuk pemenangan Paslon Nomor 2 sebanyak uang sejumlah Rp3.500.000,00 per desa. Nah, ditambah lagi, Yang Mulia, karena pembagian BLT bulan 11 dan 12 itu belum kami bagikan di Kecamatan Muara Sipongi, jadi dapatlah juga di situ karena pencairan di hari Selasa, tanggal 8 Desember, satu hari ... satu hari sebelum Pilkada Madina, jadi adalah sebagian dari teman-teman kepala desa yang mengatakan, "Ini mungkin boleh jadi senjata kita untuk memenangkan paslon di desa kita masing-masing karena bisa kita manfaatkan dana BLT ini untuk mengatakan kepada (ucapan tidak terdengar jelas), agar memilih Pasangan Nomor 2." Istilahnya kami kepala desa agak mengintimidasi masyarakat kami dengan dana BLT ini. Jadi, sesudah itu, Yang Mulia. Sesudah kesepakatan itu terjadi, besoknya di tanggal 9, eh di tanggal 8 Desember 2020, kami mengadakan pencairan dana desa di hari Selasanya, tanggal 8 Desember, pukul 14.00 WIB.

Sesudah kami pencairan dana desa, kami berkumpul kembali untuk mengumpulkan para teman-teman kepala desa sembari sesuai dengan permusyawaratan kami di hari tanggal 7-nya bahwasannya kami akan membantu Tim Pemenangan Paslon Nomor 2, jadi kami mengumpulkan uang yang ... sejumlah Rp3.500.000,00 per kepala desa di salah satu rumah, teman sejawat kami juga yang kepala desa atas nama Plt. (ucapan tidak terdengar jelas) di daerah Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, setelah uang yang terkumpul ini, salah satu teman sejawat kami, Darwis Nasution menelepon Anggota Dewan Erwin yang dari Fraksi Golkar mengatakan, "Duit sudah terkumpul, Bang, mau ke mana kami serahkan duit ini?"

Jadi, di dalam pembicaraan itu karena saya bertepatan pas di samping Saudara Darwis Nasution, yang via telepon dia berkomunikasi dengan Saudara Erwin. Saudara Erwin menyuruh Saudara Darwis Nasution untuk mengantarkan uang tersebut ke posko ... eh, ke Rumah Makan Pondok Udung, yang juga ... yang di mana Rumah Makan Pondok Udung ini yang diketahui yang memiliki adalah H. Aswin Parinduri yang notabene adalah Calon Wakil Bupati Paslon Nomor 2, dan di komunikasi itu Saudara Erwin mengatakan diserahkan kepada dia, Pak. Yang Tiara ini yang mungkin saya tidak ... kurang jelas, Yang Mulia, apakah tim pemenang 02. Tetapi diserahkan di Rumah Makan Pondok Pudung yang notabene diketahui milik H. Aswin Parinduri.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Pak Hizrah, Bapak kepala desa itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ada SK-nya?

41. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Tahun 2017 ke tahun 2023.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

2017 sampai 2023. berarti sekarang masih menjabat sebagai kepala desa, ya? Oke. Itu tanggal 6 itu, tadi di jelaskan ada 5 kepala desa yang berkumpul, ya?

43. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Ya, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, itu di Kecamatan Muara Sipongi ini ada berapa desa semua?

45. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

15 kepala desa, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

15. Jadi tanggal 6 itu yang hadir 5 kepala desa?

47. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Ya, Yang Mulia, dihadiri oleh camat juga.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kemudian tanggal 7 ... tanggal 7 itu berapa kepala desa yang hadir?

49. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Tanggal 7 ada 9 kepala desa, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tanggal 7 ada 9 kepala desa. Oke. Kemudian uang yang dibagi Rp3.500.000,00, per kepala desa itu diserahkan tanggal berapa itu?

51. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Tanggal 8, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tanggal 8. Bersamaan dengan pencairan BLT dana desa?

53. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Bukan, Yang Mulia. Bersamaan dengan sesudah pencairan dana desa di Pen[sic!] Sumut, Kecamatan Kotanopan, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, jadi dana desa dicairkan dulu pukul 14.00 WIB, ya tadi pukul 14.00 WIB, ya maksudnya?

55. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Ya, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pukul 14.00 WIB setelah itu baru pembagian Rp3.500.000,00, ini di Rumah Makan Pondok Pudung?

57. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Bukan ... bukan, Yang Mulia. Di salah satu rumah teman sejawat kepala desa bernama Paruluman Lubis.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, Pak lub ... Pak Lubis, kepala desa apa dia?

59. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Bandar Panjang Tuo.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu hadir tanggal 7 ... kepala desa itu hadir tanggal 7 dalam pertemuan?

61. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Tanggal ... tanggal 7-nya tidak hadir, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tanggal 6 beliau hadir?

63. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Tanggal 6 tidak hadir, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak hadir. Tanggal 6 tidak hadir, tanggal 7 tidak hadir, tapi pembagian uang di rumahnya atau di desanya?

65. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pembagian uang itu di rumah kepala desa atau di kantor desanya?

67. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Di rumah ... bukan dibagi, Yang Mulia, tapi dikumpulkan sebanyak Rp3.500.000,00, ke kepala desa.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, dibagi di situ di ... dikumpulkan?

69. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Dikumpulkan, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia dikumpulkan.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Uangnya dari mana yang RP3.500.000,00, per kepala desa itu?

71. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Uangnya ... uangnya dari masing-masing kepala desa, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, masing-masing kepala desa yang nyetor uangnya? Atau masing-masing kepala desa mendapat uang Rp3.500.000,00?

73. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Menyetorkan uang ... mengumpul ... kami kepala desa se-Kecamatan Muara Sipongi, Yang Mulia, mengumpulkan uang di tanggal 8 sejumlah Rp3.500.000,00, untuk diserahkan kepada Tim Pemenang Paslon Nomor 2 di mana disaat itu via ... via komunikasi Saudara Darwis berkomunikasi dengan saudara Erwin dari Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Fraksi Golkar di hari tanggal 8-nya, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, jadi ini dari ... Darwis Nasution berkomunikasi dengan Erwin Lubis?

75. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Erwin ... ya, Erwin Nasution, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, jadi uangnya ini justru berasal dari kepala desa. Diserahkan kepada tim pemenang? Jadi bukan dari tim pemenang yang diserahkan ke kepala desa?

77. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Bukan, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Terus apa lagi yang mau dijelaskan?

79. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Jadi perlu saya tambahkan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. di tanggal 8-nya juga, Yang Mulia, sesudah kami menyerahkan bantuan

secara materiil kepada Tim Pemenang 0 ... Paslon 02, kami juga dipanggil untuk hadir di Posko Pemenangan Paslon Nomor 2 di Kelurahan Pasar Muara Sipongi untuk menga ... untuk hadir untuk di ... gimana caranya pemenangan kami sebagai kepala desa untuk mempertanggungjawabkan desa kami masing-masing agar Paslon Nomor 2 bisa menang. Dan disaat itu juga terjadi penyerahan tambahan uang sejumlah beberapa kepala desa (...)

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pak Hizrah.

81. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Ya, Yang Mulia?

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pak Hizrah sebelum lanjut, ini kan masing-masing kepala desa diminta Rp3.500.000,00, uang. Waktu yang (...)

83. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Kami ... Ya, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Benar, ya. Nah, pada waktu itu Saudara Hizrah ambil uangnya dari mana ini? Apakah uangnya dari BLT dana desa atau dari uang kas atau dari uang pribadi?

85. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Bukan dari BLT, Yang Mulia. Tetapi uang ... uang tersebut kami baru mencairkan uang dana di desa di hari tersebut, Yang Mulia. Makanya kami bisa mengumpulkan sejumlah Rp3.500.000,00 ke kepala desa, Yang Mulia. Karena di hari Selasa, tanggal 8 Desember itu, kami baru pencairan dana desa, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, jadi saya ingin pastikan lagi. Rp3.500.000,00 yang disumbangkan dari setiap kepala desa itu, itu uang dari kas desa atau uang dari Pak Hizrah sendiri sebagai kepala desa atau uang berasal dari BLT dana desa?

87. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Uang tersebut, Yang Mulia uang dari pencairan dana desa, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, jadi dari uang dana desa kemudian diambil Rp3.500.000,00 diserahkan ke tim pemenang?

89. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Ya, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, apalagi yang mau dijelaskan?

91. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Di waktu pembagian BLT, Yang Mulia. Ada beberapa kepala desa yang mengatakan untuk memanfaatkan pembagian dana desa ini dalam pemenangan Paslon Nomor 2 di desa masing-masing. Di mana dengan cara meng ... mengatakan kepada si penerima BLT agar memilih Paslon Nomor 2. "Jika tidak memilih Paslon Nomor 2, mungkin tahun depan kalian terpikirlah." kata kepala desanya kepada si penerima, "Mungkin kalian tidak dapat lagi". Begitu yang saya ketahui, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, baik. Pada waktu penyerahan Rp3.500.000,00 dari dana BLT eh ... BLT dana desa, itu yang dicairkan itu berapa besar jumlahnya BLT dana desa itu? Pada tanggal 8 Desember itu, hari Selasa pukul 14.00 ya, pukul 14.00 itu berapa dicairkan?

93. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Perlu saya jelaskan, Yang Mulia. Pencairan di tahap 5 dana desa di tanggal 8 itu, Yang Mulia, itu kumulatif berjumlah berkisar antara Rp140.000.000,00 ke Rp150.000.000,00 per desa, Yang Mulia. Di mana pembagian BLT setiap desa yang menerima berbeda-beda karena tergantung dari jumlah penduduk si penerima di desa masing-masing.

94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, jadi itu pencairan tahap ke-5?

95. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Tahap ke-5, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Untuk tahun anggaran 2020?

97. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

2020.

98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

2020. Ada berapa tahap dalam pencairan dana desa dalam setahun?

99. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Di 2020 terjadi 5 tahap pencairan, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

5 tahap, berarti itu tahap terakhir, ya?

101. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Tahap terakhir, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Antara Rp140.000.000,00 sampai Rp150.000.000,00?

103. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Ya, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Karena itu sangat tergantung pada jumlah penduduk. Kemudian, 9 kepala desa, ya. Pada waktu itu tanggal 8 itu yang mencairkan ada berapa desa itu?

105. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Kami yang mencairkan, Yang Mulia. Semua 15 kepala desa se-kecamatan Muara Sipongi. Jadi mencairkan dana desa ditanggal 8, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, jadi walaupun yang hadir tanggal 8, 9 kepala desa, tapi pencairannya 15 kepala desa?

107. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Bukan, Yang Mulia. Karena des ... Kecamatan Muara Sipongi mencairkan dana desa, Yang Mulia, tidak bisa di Kecamatan Muara Sipongi karena bank ... bank BUMD Bank Sumut adanya ada ... adanya berposisi di des ... Kecamatan Kotanopan, Yang Mulia. Makanya terjadi pencairan dana desa di Kecamatan Kotanopan, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, jadi pencairan justru bukan di Kecamatan Muara Sipongi, tapi di kecamatan yang lain?

109. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Di Kecamatan Kotanopan karena berhubung Bank Sumut cuma ada di Kecamatan Kotanopan, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, pada waktu pencairan itu tanggal 8, itu yang dari Kecamatan Muara Sipongi itu berapa kepala desa yang hadir?

111. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Hadir semua, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Hadir semua 15?

113. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

15, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sedangkan ada lagi enggak dari kecamatan yang lain? Kepala desa dari kecamatan yang lain? Apakah ada pada tanggal 8 Desember itu?

115. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Di tanggal 8 Desember setahu saya, Yang Mulia adalah Kecamatan Uluh Pungkut juga yang mencairkan dana desa, Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Pakantan, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, jadi di kecamatan lain ada juga, ya?

117. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Bukan, Yang Mulia. Minta maaf, Yang Mulia. Kecamatan Pakantan juga mencairkan dana desa di Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Uluh Pungkut juga, Yang Mulia, mencairkannya di Kecamatan Kotanopan dan karena posisi Bank Sumut cuma ada di Kecamatan Kotanopan, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, di kecamatan. Jadi ambil di bank, ya?

119. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Di bank, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kantor bank, ya. Di Kecamatan Kotanopan?

121. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Kotanopan, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kota apa?

123. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Kotanopan.

124. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Noprang?

125. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Kotanopan, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, terakhir untuk Pak Hizrah kenapa waktu itu Bapak harus menyerahkan Rp3.500.000,00, takut tidak terpilih lagi nanti jadi Kepala Desa atau apa? Atau merasa ditekan pada waktu itu?

127. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Bukan Mulia. Karena ada tekanan, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tekanan dari pasangan tim sukses ya?

129. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Dari Tim Sukses Paslon 02 dan pak camat juga, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi karena ada tekanan kemudian Saksi menyerahkan Rp3.500.000,00 karena ada pertemuan tanggal 6 dan tanggal 7 Desember, ya?

131. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Ya. Di situ perlu saya tambahkan ,Yang Mulia, saya jelaskan. Di ketiga ... ketiga hari tanggal 6, 7, 8 itu selalu kami di ... diberikan salah ... salah ... pemahaman dari pak camat dan Saudara Erwin, "Kalian harus ingat bahwa Pak Bupati Dahlan Hasan Nasution walaupun tidak menang dipilkada ditanggal 9 ini, masih tetap o ... posisinya jadi bupati aktif sampai dibulan 6 ... Juli 2021, jadi kalian (...)

132. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Juni atau Juli?

133. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Agar dimana Paslon ini bisa menang di desa kalian masing-masing.

134. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, itu Pak Bupati masih menjadi Bupati sampai bulan Juni atau Juli?

135. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Juli.

136. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bulan Juli?

137. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Juni, Juni (...)

138. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, Juni oke. Berarti bulan 6, ya?

139. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Bulan ... he eh, bulan 6, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Saya kira sudah cukup sementara, nanti mungkin ada pendalaman lagi. Yang kedua ke Bapak Rahmad Daulay.

141. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Ya, siap Pak.

142. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pak Rahmad, ASN di Kementerian atau di dinas mana?

143. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Saya Staf Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Staf di bagian apa?

145. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Di Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh inspektorat kabupaten, ya?

147. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Ya, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Silakan apa yang mau Saksi Rahmad sampaikan pada kesempatan ini?

149. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama pada tanggal 21 Desember 2020, sore hari kira-kira sekitar 17.30 WIB, sehabis Salat Ashar, saya dipanggil Pak Inspektur melalui telepon agar memasuki ruangan beliau.

150. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dipanggil oleh siapa? Kepala Inspektur?

151. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Ya, Inspektur.

152. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kabupaten, ya?

153. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Ya. Kabupaten ... Inspektur Kabupaten Mandailing Natal, Yang Mulia.

154. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

155. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Ketika saya memasuki ruangan beliau, selain Pak Inspektur sudah ada Pak Wiwin. Pak Wiwin ini Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas TU, PUPR. Oleh Pak Inspektur saya disuruh mencari Pak Ahmad Rizal Effendi. Pak Ahmad Ria Effendi ini mantan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang dimutasi pada bulan Agustus. Setelah saya hubungi berkali-kali melalui telepon ternyata handphone Pak Ahmad Rizal Effendi tidak aktif. Karena saya sudah tidak bisa menghubungi beliau ,saya permisi kepada Pak Inspektur untuk bisa pulang. Ternyata saya tidak diizinkan pulang, saya disuruh membantu Pak Rusmin El Husein di luar ruangan Pak Inspektur. Pak Rusmin ini Ketua Tim yang dibentuk pada sore itu juga untuk melakukan pemeriksaan kepada Pak Rizal ... Ahmad Rizal Effendi dengan tangan mundur. Jadi setelah saya menggali informasi dari Pak Rusmin El Husein tersebut ternyata Pak Rusmin dan Ibu Latifah disuruh melompati surat panggilan pertama, surat panggilan kedua, surat panggilan ketiga kepada Bapak Ahmad Rizal Effendi tertanggal di bulan April 2020 (suara tidak terdengar jelas) mundur.

Kemudian membuat kesimpulan hasil pemeriksaan dalam bentuk nota dinas tertanggal bulan Mei 2020. Di mana di dalam nota dinas tersebut disimpulkan bahwa ketiga surat panggilan tersebut tidak dipenuhi oleh Bapak Ahmad Rizal Effendi, sehingga dibuatlah kesimpulan

di dalam nota dinas ditambah dengan Pasal 4 kalau tidak salah dari PP 53 bahwa dengan kesimpulan tersebut Bapak Ahmad Rizal Effendi layak untuk diberi hukuman disiplin tingkat berat berupa pencopotan dari jabatan. Surat panggilan tersebut dan nota dinas tersebut setelah saya gali informasi dari Bapak Rusmin El Husein ternyata untuk menjawab pengaduan yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Rizal Effendi ke Kementerian Dalam Negeri, yang mempertanyakan izin menteri atas pencopotan beliau juga untuk menjawab pengaduan dari Bapak Ja'far Sukhairi Nasution ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Jadi itu, Yang Mulia, sementara yang bisa saya sampaikan.

156. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Ahmad Rizal Efendi ini dia dimutasi tanggal berapa?

157. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Dimutasi kalau tidak salah tanggal 5 Agustus 2020.

158. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

5 Agustus?

159. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

2020, Yang Mulia.

160. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

2020. Itu kan petahana tidak boleh memutasi 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah pelaksanaan pilkada. Ini kalau 5 Agustus ini memenuhi tidak? Nanti biar itu dialami, ya. Tapi, beliau dipindahkan yang tadinya adalah menduduki kepala bidang pengelolaan sumber daya air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal?

161. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Ya, Yang Mulia.

162. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Lalu yang menggantikan beliau siapa?

163. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Yang menggantikan beliau Pak Wiwin Ferdiansyah dengan status pelaksana tugas kepala bidang pengelolaan sumber daya air.

164. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, pada waktu Saudara Rahmad bertemu kepala inspektorat kabupaten, ada Bapak Ardiasnyah[Sic!] ini, Plt ini?

165. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Ya, ada Pak Wiwin Ferdiansyah di ruangan.

166. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang menggantikan Pak Efendi ya, Pak Ahmad Rizal Efendi ini.

167. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Ya, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, itu untuk dibuat surat mundur ... tanggal mundur karena akan menjawab surat dari Kementerian Dalam Negeri dan dari Bawaslu?

169. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Ya, Yang Mulia.

170. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Saya kira untuk sementara cukup. Kita lanjut yang ketiga, Bapak Ridwan Agustua Hutabarat.
Pak Ridwan, pekerjaannya apa?

171. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Petani, Pak.

172. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Petani.

173. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Tinggalnya di mana?

175. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Kampung Baru, Yang Mulia. Desa Kampung Baru.

176. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan, Panyabungan Utara?

177. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Panyabungan Utara, Yang Mulia.

178. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Apa yang Saudara Saksi mau jelaskan pada saat ini? Silakan.

179. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, Yang Mulia. Pada tanggal 9 Desember 2020, pemilihan bupati diadakan di Mandailing Natal. Saya dari Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Di Kampung Baru ada TPS 2, TPS yang pertama berlokasi di halaman rumah Bapak Marga Siburiang[Sic!] dan TPS kedua berlokasi di Gedung Serbaguna Kampung Baru. Saya sendiri adalah saksi dari Paslon 01, Yang Mulia.

180. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, jadi Saudara Ridwan Saksi Pasangan 01 di TPS berapa?

181. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

TPS 2, Yang Mulia.

182. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Di TPS 2 yang Gedung Serbaguna Kampung Baru?

183. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Terus?

185. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Pada pukul 11.00 suasana sudah sepi, Yang Mulia. PPS memasuki TPS dan menjumpai para panitia dan para saksi. PPS mendiskusikan kepada panitia dan saksi, bagaimana caranya untuk memenangkan Paslon Nomor 2, Yang Mulia.

186. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Itu pukul 11.00, ya?

187. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap, Yang Mulia.

188. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu sudah semua warga di TPS itu menggunakan suaranya atau ada yang belum?

189. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Belum, Yang Mulia.

190. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Belum semua, ya?

191. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap, Yang Mulia, belum.

192. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Atau belum mulai sama sekali?

193. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Mulai pukul 08.00, Yang Mulia.

194. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, jadi dimulai pukul 08.00, ya. Itu pada hari itu selesai pukul berapa itu? pelaksanaan TPS ... pilkada di TPS 2 ini, itu selesai pukul berapa? Dimulai pukul 08.00, selesainya pukul?

195. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Jam 13.00, Yang Mulia.

196. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, pukul 13.00, ya. Tapi pukul 11.00 datanglah PPS ke TPS kemudian bertemu panitia dan saksi?

197. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap, Yang Mulia.

198. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Saksi ini di semua ... apakah dari semua pasangan calon ada saksinya?

199. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ada, Yang Mulia.

200. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada. Ada berapa pasangan calon pada waktu itu?

201. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Pasangan calon ada 3, Yang Mulia.

202. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. Berarti setiap pasangan calon ada saksi, ya?

203. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap. Ada, Yang Mulia.

204. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, jumlah saksinya berapa? 3 atau 6?

205. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

6, Yang Mulia.

206. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

6, ya. Berarti setiap pasangan calon ada 2 saksi?

207. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, Yang Mulia.

208. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Berarti jumlah seluruh ada 6, ya?

209. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya.

210. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Terus?

211. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, setelah sepakat, Yang Mulia. KPPS menyamakan surat suara dengan daftar hadir, Yang Mulia.

212. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

KPPS menyerahkan?

213. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Menyamakan surat suara dengan (...)

214. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, menyamakan. Oke, surat suara dengan daftar hadir?

215. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, Yang Mulia.

216. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terus?

217. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Setelah selesai PPS mengambil surat suara tersebut dan mencoblos Paslon Nomor Urut 2, Yang Mulia.

218. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu setelah jam 13.00 atau masih antara jam 11.00 ke jam 13.00?

219. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Antara jam 11.00 sampai 12.30, Yang Mulia.

220. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jam 11.00 sampai 12.30 itu surat suara dengan daftar hadir disamakan, kemudian sisanya dicoblos? Yang belum (...)

221. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap, Yang Mulia.

222. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Suara yang belum terpakai misalnya ... itu dicoblos?

223. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, dicoblos, Yang Mulia.

224. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang lakukan itu siapa? KPPS atau PPS-nya?

225. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Yang melakukan PPS, KPPS juga ikut, Yang Mulia. Begitu juga dengan linmas, Yang Mulia.

226. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada linmas juga?

227. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ada, Yang Mulia.

228. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Waktu itu Anda sebagai Saksi Pasangan 02 protes atau tidak?

229. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Saya Saksi dari 01, Yang Mulia.

230. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, Saksi Paslon 01, ya. Waktu itu ada yang protes, keberatan misalnya? Dari pasangan calon ... saksi pasangan calon itu?

231. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Pada waktu itu, Yang Mulia, tidak ada yang protes, Yang Mulia.

232. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak ada yang protes?

233. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap. Tidak ada, Yang Mulia.

234. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kenapa tidak diprotes? Apa ada dikasih uang?

235. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap. Ada, Yang Mulia.

236. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terus yang dicoblos itu semua kerta suara yang belum terpakai atau seperti apa?

237. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Tidak semua, Yang Mulia.

238. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak semua?

239. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Tidak, Yang Mulia.

240. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kira-kira berapa banyak, tahu tidak jumlahnya yang dicoblos?

241. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, diperkirakan lebih kurang 200, Yang Mulia.

242. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

200 kertas yang dicoblos?

243. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap, Yang Mulia.

244. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Lebih kurang, ya?

245. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya.

246. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Nah, daftar hadir pada waktu itu yang hadir sudah berapa orang? Yang hadir sampai dengan jam 11.00 itu berapa orang?

247. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Diperkirakan masih 100, Yang Mulia.

248. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Diperkirakan masih 100 atau sudah 100? Di TPS itu ada berapa suara? DPT-nya di situ untuk berapa banyak jumlahnya?

249. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

DPT-nya 434, Yang Mulia.

250. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

434. Ini TPS 2, ya?

251. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap, Yang Mulia.

252. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Jadi pada jam 11.00 itu ... sampai dengan jam 11.00 WIB kurang lebih yang sudah digunakan baru 100?

253. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap, Yang Mulia.

254. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Kemudian PPS tambah KPPS dan linmas itu mencoblos kurang lebih 200 surat suara, ya?

255. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, Yang Mulia.

256. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Terus apalagi yang mau dijelaskan?

257. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, ada juga kekurangan di TPS 1, Yang Mulia.

258. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan, Anda Saksi di TPS 2?

259. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap, Yang Mulia. Saya cuma mendengar dari kawan (...)

260. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kalau hanya mendengar tidak usah karena Saksi itu harus melihat sendiri, ya, alami sendiri. Jadi untuk TPS 1 saya kira tidak perlu.

261. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap, Yang Mulia.

262. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Saya kira untuk Saksi Ridwan cukup, ya.

263. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Yang Mulia. Saya (...)

264. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tunggu akan ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Ketua, silakan.

265. KETUA: ASWANTO

Saudara Ridwan, tadi Saudara memperkirakan kurang lebih 200 yang coblos, ya?

266. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, Pak.

267. KETUA: ASWANTO

Atas dasar apa Saudara ... Saudara hitung apa enggak?

268. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Kurang jelas, Pak.

269. KETUA: ASWANTO

Tadi Saudara mengatakan yang dicoblos kurang lebih 200?

270. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, Pak.

271. KETUA: ASWANTO

Saudara menghitung atau memperkirakan saja?

272. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Saya tahu dari PPS yang (...)

273. KETUA: ASWANTO

Enggak, saya tanya Saudara. Saudara mengatakan petugas PPS, KPPS itu mencoblos surat suara kurang lebih 200?

274. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap.

275. KETUA: ASWANTO

Pertanyaan saya Saudara hitung atau cuma memperkirakan saja?

276. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

PPS sendiri yang memberi tahu kepada saya, Yang Mulia.

277. KETUA: ASWANTO

Siapa nama PPS itu?

278. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Rico Pardede, Yang Mulia.

279. KETUA: ASWANTO

Apa yang disampaikan kepada Saudara?

280. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Saya menanyakan sama dia ada berapa yang mereka coblos, Yang Mulia.

281. KETUA: ASWANTO

Terus jawabannya?

282. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Rico Pardede menjawab, "Lebih kurang 200 suara." Yang Mulia.

283. KETUA: ASWANTO

Berarti Saudara tidak melihat dicoblos, cuma di ... apa ... cuma mendengar informasi dari orang lain

284. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Kalau penusukan, saya melihat sendiri, Yang Mulia.

285. KETUA: ASWANTO

Saudara masuk di ruang kotak suara?

286. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Kurang jelas, Yang Mulia.

287. KETUA: ASWANTO

Posisi Saudara ketika itu di mana?

288. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Di dalam TPS, Yang Mulia.

289. KETUA: ASWANTO

Di dalam TPS.

290. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, Yang Mulia.

291. KETUA: ASWANTO

Apakah tempat pencoblosan itu ada penghalangnya? Masuk di dalam kotak TPS?

292. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ada yang di kotak TPS, ada yang di meja KPPS, Yang Mulia.

293. KETUA: ASWANTO

Jadi ada yang menyoblos di meja KPPS?

294. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Sebagian, Yang Mulia.

295. KETUA: ASWANTO

Saudara lihat betul?

296. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Betul, Yang Mulia. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Yang Mulia.

297. KETUA: ASWANTO

Saudara sudah disumpah?

298. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Sudah, Yang Mulia.

299. KETUA: ASWANTO

Saudara melihat petugas PPS mencoblos, dan Saudara adalah Saksi Mandat dari Pasangan Calon 02 ... 01, Anda tidak keberatan pada waktu itu? Anda tidak keberatan?

300. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Kurang jelas.

301. KETUA: ASWANTO

Halo?

302. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, halo.

303. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan, Anda tidak protes?

304. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Waktu itu saya tidak protes, Yang Mulia. Karena saya diberi imbalan, Yang Mulia.

305. KETUA: ASWANTO

Ya, berarti Saudara menerima sogokan itu, ndak cocok jadi ahli itu, ndak cocok jadi saksi, penerima sogok Saudara. Silakan, Yang Mulia.

306. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, saya sedikit lagi Saudara Ridwan.

307. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, Pak.

308. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ini dari surat yang diajukan dari Pemohon ke Mahkamah, di sini dijelaskan bahwa di TPS 02, Desa Kampung Baru, saya dapat uang dari Bastian Situmorang, apakah Saudara Ridwan dapat uang dari Bastian Situmorang? Benar?

309. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap.

310. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berapa besar jumlahnya?

311. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Rp150.000,00, Pak.

312. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Rp150.000,00.

313. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, Pak.

314. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Apakah karena uang itu, Saudara tidak melaporkan?

315. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Tidak, Pak.

316. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak, ya.

317. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Tidak.

318. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kemudian di sini tertulis bahwa di TPS 02, Desa Kampung Baru yang menang adalah Paslon 02, dengan jumlah suara 241 suara. Itu dari 434 itu, untuk Paslon Nomor 2 itu 241 suara, kalau Paslon Nomor 1 berapa suaranya?

319. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

52, Yang Mulia.

320. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

52. Kemudian, Paslon Nomor 3?

321. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

18, Yang Mulia.

322. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

18.

323. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya.

324. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, Paslon Nomor 2 dapat 241, Paslon 1=52, Paslon 3=18. Lalu, apakah semua suara ini ada terpakai atau ada yang rusak dari 434 ini?

325. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ulang dulu, Yang Mulia.

326. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ini kan di TPS 02, jumlahnya 434.

327. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya.

328. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kemudian, dari hasil yang ada, itu Pasangan 01 dapat 52 suara, Pasangan 02=241, Pasangan 03=18. Lalu, sisanya itu berapa? Apakah itu rusak atau memang tidak terpakai? Atau seperti apa yang sisanya?

329. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Sisanya belum terpakai, Yang Mulia.

330. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu berapa yang belum terpakai?

331. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Yang belum terpakai (...)

332. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada datanya? Kalau ada coba disebutkan.

333. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Jumlah suara sah 311, Yang Mulia.

334. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

311 suara sah?

335. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, Yang Mulia. Jumlah suara tidak sah 2, Yang Mulia.

336. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak sah, 2. Terus?

337. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Jumlah suara sah dan tidak sah 313, Yang Mulia.

338. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

313, oke. Lalu, sisanya itu tidak menggunakan haknya?

339. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap, tidak, Yang Mulia.

340. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak, itu berapa jumlahnya di situ?

341. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Di sini jumlahnya (...)

342. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jangan tanya orang, jangan lihat-lihat. Ini, Pemohon ini Bukti P berapa, Pemohon?

343. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

133, Yang Mulia.

344. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

133.

345. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap, Yang Mulia.

346. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

133 ditambah 313, ini melebihi ini.

347. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

446, Yang Mulia.

348. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berapa?

349. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

446.

350. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tadi Anda bilang di situ, TPS itu 434?

351. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Maaf, Yang Mulia ... maaf, Yang Mulia.

352. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang benar berapa?

353. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

434, Yang Mulia.

354. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ha, berarti ini ada kelebihan ini. Kelebihan 12, ya?
Oh, ada pemilih tambahan?

355. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ada, Yang Mulia.

356. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, oke. Oke, saya kira sudah cukup. Jadi Anda tidak laporkan ...
sama sekali tidak dilaporkan ke bawaslu, ya?

357. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Tidak, Yang Mulia.

358. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak. Jadi dapat uang Rp150.000,00?

359. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap, Yang Mulia.

360. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Uangnya masih ada sampai sekarang?

361. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Tidak ada lagi, Yang Mulia.

362. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak ada lagi. Oke. Dari Pemohon mungkin ada yang mau didalami, silakan.

363. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Izin, Yang Mulia. berkaitan dengan pertanyaan, Yang Mulia, tadi.

364. KETUA: ASWANTO

Yang sudah dijawab tadi jangan ditanyakan lagi, Pak, ya.

365. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Alat buktinya tadi di P-10.13 dan P-10.18 itu (...)

366. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

P.10 ... sabar. P-10?

367. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

P.10.13.

368. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

P.10.13 dan?

369. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Sampai dengan P.10.18, Yang Mulia.

370. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. P-10.13 sampai P-10.18?

371. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya.

372. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

373. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Karena bersekalian dengan bukti, Yang Mulia, demikian juga dengan Saksi yang pertama tadi, Yang Mulia.

374. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, Saksi pertama P berapa?

375. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Saksi yang pertama itu P-11 sampai dengan P-11.1.

376. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Sudah P-11 dan P-11.1?

377. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya.

378. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

379. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Baru Saksi yang kedua.

380. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Saksi dua P berapa?

381. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

P-19 sampai dengan P-21.22, Yang Mulia.

382. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, Saksi 2 Saudara Rahmad Daulay itu P-19 sampai P-21.22?

383. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya. Jadi begini, Yang Mulia, P-19 sampai dengan P-22.12 dan P-21.22 tambahannya, Yang Mulia.

384. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada tambahannya?

385. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya.

386. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi P-19.

387. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Sampai P-22.12 itu yang pertama, Yang Mulia.

388. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, P-22.

389. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

P-22.12.

390. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

P-22.12. Kemudian ... kan, otomatis P-21 masuk ke dalam, kan?

391. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya, Yang Mulia.

392. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Jadi dari P-19 sampai P-22.12?

393. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya.

394. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jangan lagi ditanyakan yang sudah kami tanyakan.

395. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ada, Yang Mulia.

396. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan. Saksi yang nomor berapa?

397. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Yang pertama kepada Hizrah Perdana, Yang Mulia.

398. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Hizrah?

399. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya.

400. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Silakan.

401. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Karena ada 3 saksi mungkin nanti kami diperkenankan bergantian, Yang Mulia.

402. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, tapi waktunya terbatas, ya.

403. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Oh, ya. Boleh, Yang Mulia?

404. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan.

405. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya, yang pertama kepada Saksi Hizrah Perdana. Pertanyaan kami kepada Saudara Saksi ada 3. Yang pertama, apakah Saudara Saksi setelah mengikuti proses tahapan pilkada di 2020 tersebut, dikhususnya di kecamatan Saudara, tahu enggak Saudara di desa Saudara itu siapa yang menang? Nomor paslon berapa yang menang?

406. KETUA: ASWANTO

Saksi silakan jawab.

407. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Saksi apakah dengar pertanyaannya?

408. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Mohon maaf, Yang Mulia, kurang jelas.

409. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Oh, ya, saya ulangi Saudara Saksi. Saksi tadi katakan kepala desa di Desa Sibinail, ya, kan? Nah, pertanyaan kami pertama di Desa Sibinail itu siapa yang menang? Paslon siapa yang menang? 1, 2, atau 3?

410. KETUA: ASWANTO

Kita ... saya ... saya bantu, ya. Saudara Saksi dengar suara saya? Ada gangguan dari sananya, ya. Halo, Saudara Saksi. Dari sana yang ada gangguan, ya.

411. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Atau mungkin dilanjutkan dulu Ahli, ya.

412. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Oh, siap ... siap.

413. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, kita lanjutkan dulu nanti (...)

414. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Pak ... Pak pertanyaan tadi tolong diulang karena kurang jelas.

415. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, sudah. Silakan.

416. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Kepada Saudara Saksi kami bertanya di desa Saudara ... di Desa Sibinail itu siapa yang menang ... paslon berapa yang menang?

417. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Yang menang Paslon 01 atas nama Jafar Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi.

418. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya, terima kasih. Nah, tadi Saudara Saksi katakan ada 15 desa. Apakah pembagian dana desa itu ... BLTDD itu di desa Saudara dibagikan juga pada tanggal 8 itu atau setelah pilkada?

419. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Tidak dibagikan tanggal 8, Yang Mulia, tetapi setelah pilkada di tanggal 9 saya membagikan dana BLT di tanggal 15.

420. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Di tanggal 15?

421. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

15.

422. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Nah, tadi Saudara Saksi katakan dari 15 desa itu, Saudara Saksi tahu nggak berapa desa yang tidak membagikan BLT di Kecamatan Muara Sipongi?

423. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Kalau desa yang tidak membagikan BLT, saya kurang jelas tapi ada beberapa desa yang tidak membagikan di hari tanggal 8 nya.

424. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, saya kira tidak usah dilanjutkan itu tidak relevan itu.

425. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi, apakah Saudara Saksi setelah melaksanakan ... apa ... proses pilkada ini ada mengikuti tahapan penghitungan atau mengikuti penghitungan di tingkat kecamatan?

426. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Ada, Yang Mulia. Karena sebagai kepala desa, kami wajib untuk mengawal surat suara hingga tingkat kecamatan, Yang Mulia. Tetapi di waktu rapat Pleno di tanggal 12 di tingkat kecamatan, ada terjadi keributan di rapat Pleno PPK, Yang Mulia. Di mana keributannya terjadi karena adanya 21 kotak suara yang tidak tersegel dan terkunci, Yang Mulia. Dan ada salah satu Desa Bandar Panjang Tuo di mana di desa tersebut jumlah kehadiran pemilih dan hasil surat ... hasil suara keluar yang di hari tersebut di tanggal 9 tidak sinkron, Yang Mulia. Di mana di daftar absen panitia yang hadir cuma 83 pemilih. Tetapi di tingkat PPK kecamatan, PPS (...)

427. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Izin, Yang Mulia, ini ... ini nampaknya tidak fokus ini. Mohon izin, Yang Mulia (...)

428. KETUA: ASWANTO

Biarkan dulu dia bicara!

429. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Desa Bandar Panjang Tuo mengabsen ... absen tersebut dan ditambah dengan absen yang ditulis di buku tulis, Yang Mulia.

430. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, coba sebelum lanjut. Apakah beliau hadir di dalam pada saat rekap di tingkat kecamatan atau beliau hanya di luar? Kawannya ini sampai (...)

431. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Saya ... saya, Yang Mulia, di luar karena terjadi keributan saksi PPK Paslon Nomor 1 (...)

432. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, oke karena saksi di luar (...)

433. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

keberatan sehingga terjadilah keributan.

434. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, oke. Karena saksi di luar, saya kira tidak perlu dijelaskan lagi. Mungkin pertanyaan yang lain, silakan!

435. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Atas hal ini kami sudah buat jadi bukti tertulis mulai dari P-7 sampai dengan P-8.10, Yang Mulia.

436. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, tapi karena Beliau di luar.

437. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya.

438. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi saya kira tidak terlalu relevan. Ada lagi untuk Saksi yang lain?

439. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Untuk Saksi yang nomor 2, Yang Mulia.

440. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Silakan! Rahmad Daulay.

441. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan dengan Saudara Saksi Rahmad Daulay. Tadi sudah begitu terang menjelaskan bahwa apakah Saudara Saksi ada juga membuat pernyataan tertulis? Halo Saksi?

442. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Ya.

443. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Apakah Saudara Saksi ada membuat pernyataan tertulis?

444. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pernyataan tentang apa dulu, Pak? Karena bisa saja orang itu membuat banyak pernyataan.

445. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Pernyataan tertulis berkenaan dengan kesaksian yang Saudara sebutkan tadi.

446. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Ada.

447. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ada ya saksi, ya?

448. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Ada.

449. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Nah, pertanyaan kami yang kedua, tadi kan Saudara Saksi katakan ada tim dan kemudian tanggalnya dibuat tanggal mundur. Nah, apa yang bisa Saudara Saksi jelaskan lagi dengan tim dan tanggal mundur itu? Coba Saudara Saksi jelaskan!

450. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Ya, di malam tersebut selain tim yang terdiri dari Pak Rusmin dan Ibu Fatifah[Sic!] dan saya, ada juga Pak Inspektur Kepala Badan Kepegawaian dan Kepala Bagian Hukum yang menggodok surat-surat tanggal mundur ini. Di mana mulai dari sore hari 17.30 sampai dengan (...)

451. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, sebenarnya gini pertanyaan itu sebenarnya sudah kami tangkap, ya. Sebenarnya kan yang mau dijelaskan ada keterlibatan ASN, kan?

452. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya, benar.

453. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Saya kira sudah cukup itu.

454. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Ya. Tinggal satu pertanyaan, Yang Mulia.

455. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan! Masih kepada saksi Rahmad?

456. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya, masih kepada saksi Rahmad.

457. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, silakan!

458. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Saudara Saksi?

459. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Ya, siap.

460. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Saudara Saksi apakah mengetahui berapa orang yang dimutasi di Kabupaten Mandailing Natal menjelang pilkada (...)

461. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah, saya kira itu juga tidak relevan, ya.

462. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Oke. Cukup, Yang Mulia.

463. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya. Silakan Termohon kalau ada yang mau ditanyakan!

464. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin bertanya kepada Saudara Ridwan Agustua Hutabarat.

465. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, Ridwan Agustua Hutabarat!

466. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap.

467. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Ya. Saudara Saksi, tadi Saudara sudah panjang lebar menjelaskan. Saya hanya ingin menegaskan beberapa poin saja. Saudara sebagai Saksi Paslon 01, ya. Apakah Saudara dari pagi sampai dengan selesai penghitungan ada di posisi di TPS?

468. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap, ada.

469. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Ada. Tadi Saudara menerangkan tentang jumlah surat suara sebanyak 200 yang dicoblos, apakah ... penegasan saja, Saudara melihat sendiri jumlah 200 surat suara yang dicoblos itu atau Saudara hanya mendapatkan informasi dari Saudara Pardede?

470. KETUA: ASWANTO

Tadi sudah dijawab, Pak. Tadi sudah dijawab itu, ndak usah ditanyakan. Tadi jawabannya adalah ada yang dia lihat sendiri dicoblos, ada juga yang dia tidak lihat tapi memperoleh informasi, gitu. Itu yang Saudara tanyakan diganti saja, Pak, pertanyaannya.

471. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Ya, selanjutnya. Apakah Saudara Saksi bahwa di TPS 02 Desa Kampung Baru ada pemilih tambahan?
Saksi?

472. PETUGAS:

Mohon izin? Mohon izin?

473. KETUA: ASWANTO

Ya, Ibu siapa?

474. PETUGAS:

Mohon izin ada kendala teknis di sini, Saksi sekarang menggunakan PC saya. Terima kasih, Yang Mulia.

475. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan.

476. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Ya, Saudara Saksi, apakah di TPS 2 Kampung Baru ada pemilih tambahan?

477. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, Yang Mulia.

478. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Ada? Ada pemilih tambahan?

479. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Tidak ada, Yang Mulia.

480. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Tidak ada, ya? Oke.

Saudara Saksi, apakah Saudara Saksi atau Saudara Saksi juga ketahui sudah ada pemeriksaan dari Bawaslu terkait dengan dugaan pencoblosan-pencoblosan tersebut?

481. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Tidak, Yang Mulia.

482. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Tidak ada? Sampai saat ini Saudara belum pernah dengar itu, ya?

483. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Siap, belum, Yang Mulia.

484. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Oke cukup, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan bukti dan kami sudah masukan bukti tambahan.

485. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Saudara Ridwan, tadi Saudara dari segi jumlah suara ini kan melebihi, tapi Saudara mengatakan tidak ada pemilih tambahan. Itu benar? Di TPS 02 ini? Apakah ada pemilih tambahan apa tidak?

486. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Tidak ada, Yang Mulia.

487. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak ada? Tapi kok jumlahnya ini melebihi ini. Lebih dari 434 karena tadi Anda mengatakan jumlahnya itu suara sah, suara tidak, lalu yang tidak menggunakan suara kalau ditotal itu 446, berarti lebih 12 suara, maka ditanya tadi dari Termohon, apakah ada pemilih tambahan? Saudara mengatakan tidak. Padahal ini ada melebihi kurang lebih 12 ini, hitungan suara. Ada pemilih tambahan atau tidak? Coba data ... data yang tadi? Atau dari Pemohon ada datanya? Apakah di TPS 02 ada pemilih tambahan?

488. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Sepanjang yang kami catat, tambahannya itu karena tambahan sekian persen kertas suara, Yang Mulia.

489. KETUA: ASWANTO

Bukan itu yang ditanyakan. Kalau itu, DPT + 2,5% itu kita sudah tahu, yang ditanyakan ada ndak pemilih tambahan? Bukan kertas suara. DPTb maksudnya, ada enggak DPTb situ?

490. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Dalam catatan kami, tidak kami temukan, Yang Mulia.

491. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, tidak ada ya? Oke.
Dari Pihak Terkait ada pertanyaan?

492. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Insy Allah banyak, Yang Mulia. Sekaligus klarifikasi?

493. KETUA: ASWANTO

Satu per satu, Pak.

494. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sabar, Pihak Terkait sabar dulu.
Dari Komisioner, silakan.

495. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ridwan Hutabarat. Tadi menyebutkan bahwa yang mencoblos surat suara sekitar 200 lembar itu adalah PPS dan KPPS? Salah satu PPS-nya adalah Saudara Rico Barhen Pardede. Selain Saudara Rico, siapa lagi PPS-nya?

496. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Lorens Tambunan, Yang Mulia.

497. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Lorens. Ada lagi?

498. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

PPS-nya yang 2 itu, Yang Mulia.

499. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Oke. KPPS-nya, siapa saja yang ikut mencoblos itu?

500. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

KPPS-nya (...)

501. KETUA: ASWANTO

Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, jangan dicari-cari jawabannya.

502. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, kalau namanya kurang tahu, Yang Mulia.

503. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Oh, baik. Satu lagi. Tadi Saudara menyebutkan bahwa saksi paslon di situ hadir 6 orang?

504. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya.

505. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

2 orang paslon, berarti kawan Bapak sesama saksi Paslon 1, ada lagi yang lain, ya? Siapa itu namanya?

506. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Bastian Situmorang, Yang Mulia.

507. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Oh, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

508. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, silakan Pihak Terkait.

509. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami mohon diterbitkan penetapan karena di sidang ini sudah ada terbukti pengakuan adanya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Saksi Nomor 3 tadi, demi kesucian pengadilan (...)

510. KETUA: ASWANTO

Tindak pidana pemilu yang mana?

511. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Itu tadi dia sudah meneri ... mengaku menerima sogok tadi, yang (...)

512. KETUA: ASWANTO

Itu urusan lain, nanti Mahkamah yang mempertimbangkan (...)

513. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Oke.

514. KETUA: ASWANTO

Jangan dicampur-campur lah.

515. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Baik. Kami lanjut, Yang Mulia. Saudara Saksi Perdana Nasution. Ya, Saudara kenal dengan Darwis Nasution[Sic!]? Ketua pap ... PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kecamatan Muara Sipongi, Saudara kenal itu?

516. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Kenal.

517. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Itu ketua Saudara, ya? Sebagai (...)

518. SAKSI DARI PEMOHON: HIZRAH PERDANA NASUTION

Ketua saya, ya.

519. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya? Betul, ya?

520. SAKSI DARI PEMOHON:

Betul, Yang Mulia.

521. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Yang Mulia, tolong dicek bukti PT-184 ... 184, ya, di sini ada surat jawaban kepada tim kampanye paslon 02 yang menyatakan bahwa tuduhan pengumpulan uang yang Rp3.500.000,00 itu tidak benar dan ini ditandatangani oleh ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 kepala desa, dan Saudara Kepala Desa Tanjung Alai, Sibinail, dan Koto Baringin, Simpang Mandepo ini ada pernyataannya bahwa itu tidak benar.

Yang Mulia. Karena mengingat waktu saya tidak lagi memperdalam dengan Beliau, kita cek dengan surat saja, kemudian ada juga pernyataan Aspan, ini Camat Muara Sipongi yang ... itu ada bukti PT-174, Yang Mulia. 174 ... 174.

Kemudian ada lagi bukti PT-178, Yang Mulia. 178 juga ini penjelasan daripada ... sesuai dengan surat Saudara, kami juga menyampaikan bahwa tidak ada hubungan penyelenggaraan pilkada dengan pembagian atau pencarian ... pencairan BLTDD, ya, yang mana pada saat itu secara kebetulan ada yang berdekatan dengan hari pencoblosan, sekitar tanggal 7 dan 8.

Kemudian, Yang Mulia, persoalan pembagian dana BLT, khususnya di Kecamatan Muara Sipongi tempat Saksi ini berada itu justru dibagikan setelah pilkada. Bisa dilihat di bukti PT-187 ... 1 ... sampai 197.

522. KETUA: ASWANTO

Tadi sudah. Tadi sudah diakui Saksi itu bahwa pembagiannya itu sesudah (...)

523. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya.

524. KETUA: ASWANTO

Pencoblosan. Nggak usah diulang itu yang (...)

525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya, baik. Oh, kalau boleh diizinkan, kami minta diputar video pembagian BLT di Kabupaten Mandailing Natal khususnya. Bahwa di situ me ... menunjukkan bahwa TNI dan camat itu ber ... bekerja sama untuk mengamankan agar sampai BLT Dana Desa itu tidak dipergunakan atau tidak disalahgunakan. Kalau, Yang Mulia, berkenan (...)

526. KETUA: ASWANTO

Berapa ... berapa lama durasinya?

527. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Itu videonya tidak lama, Yang Mulia, ya tidak lebih 5 menit.

528. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Izin sebentar (...)

529. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Tadi kami di (...)

530. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah-sudah, sudah koordinasi?

531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Sudah koordinasi tadi, ya.

532. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu untuk menguatkan dalil bantahan Anda (...)

533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya.

534. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atau untuk meng ... me-counter kesaksian saat ini? Karena nanti di saat memeriksa Saksi Anda nanti diputar lagi.

535. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Oh, tidak.

536. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak?

537. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ini me-counter ini saja (...)

538. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi di keterangan Saksi Anda nanti diputar lagi tidak

539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Oh ya, boleh. Memang ada kaitannya, Yang Mulia.

540. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, kalau itu kan berarti untuk menguatkan (...)

541. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

He em.

542. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bantahan Saudara melalui Saksi Saudara, kan?

543. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya. Ada ... ada, ada juga kaitannya untuk me-counter pernyataan ini.

544. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kan tidak harus selalu fro ... harus frontal kan, Pak?

545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Baik, baik.

546. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, nanti dari pada 2 kali memutar, kan?

547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Jadi itu terkait dengan keterangan Saudara Perdana, saya juga akan coba seefisien mungkin ini untuk pertanyaan-pertanyaan ini, Yang Mulia.
Kemudian, Saudara Rahmad Daulay.

548. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Rahmad Daulay?

549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Rahmad Daulay?

550. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAD DAULAY

Ya, siap.

551. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya. Saudara ASN, punya surat tugas tidak dari atasan Saudara?

552. KETUA: ASWANTO

Tadi sudah dijawab, Pak.

553. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tanya yang lain saja.

554. KETUA: ASWANTO

Sudah dijawab tadi, ada surat tugasnya.

555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Oke, baik. Jadi, apakah sepengetahuan Saudara pemutasian-pemutasian dari Saudara Rizal Effendi itu bermula dari sebelum ... jauh-jauh hari sebelum (...)

556. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan, itu tidak perlu diminta pendapat. Dia hanya memberi kesaksian (...)

557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya.

558. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bahwa ada membuat surat berlaku surut.

559. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya.

560. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu. Jadi, tidak perlu memberi ... soal pendapat dia tidak perlu ditanyakan, Pak.

561. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Oke. Saudara Saksi, kan, ini ... pe ... Saudara ASN. Saudara tahu, enggak, Surat Bupati Nomor 800/0984 tertanggal 24 Maret 2020?

562. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tentang apa itu suratnya?

563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Itu tentang teguran kepada Rizal Effendi karena kinerjanya rendah. Jadi, dari sinilah, Yang Mulia, dimulainya pemutasian daripada Rizal Effendi ini.

564. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya. Justru ... ya, yang dijelaskan justru surat itu dibuat berlaku surut. Nah, itu saya kira tidak relevan lagi, Pak. Dia hanya menjelaskan itu saja bahwa ada surat yang lain itu Bukti P berapa, Pak?

565. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Itu ... ini terkait dengan ini (...)

566. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukti PT berapa?

567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ini Bukti PT-103.

568. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, cukup nanti dengan (...)

569. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Sampai ... sampai dengan Bukti PT-121, Yang Mulia. Jadi, ini proses pemutasian ini adalah bertahap, ya, sejak itu dimulai dari bulan Maret 2020.

570. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, Bukti PT-1 (...)

571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Dan juga sudah ada ... sudah ada surat Menteri Dalam Negeri tentang menyatakan itu tidak ada masalah. Itu Surat Menteri Dalam Negeri itu Bukti PT-103, Yang Mulia.

572. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukti PT-103 dari Kemendagri?

573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya. Oh, ya, sori. Itu Bukti PT-103 terhadap Kadis Pendidikan, kalau yang khusus untuk Rizal Effendi ini ada di Bukti PT ... sebentar. Oh, Bukti PT-116, Yang Mulia.

574. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, bukan Bukti PT-103 sampai Bukti PT-121, ya? Hanya Bukti PT-116?

575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Bukti PT-103 itu rangkaian mulainya ... itu rangkaian dari proses pemutasian itu, Yang Mulia, yang dimulai dari bulan Maret, artinya jauh dari 6 bulan sebelum proses pilkada. Kemudian, Mendagri mengeluarkan surat, yaitu Surat Nomor 800/425 itu ada di Bukti PT-116 yang menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan keluarnya, Bukti PT-115, artinya pemutasian itu.

576. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Seperti itu, Yang Mulia.

578. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Ya, ini terkait dengan persoalan mutasi?

579. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya.

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya. Kemudian, kepada Saudara Ridwan Agustua (...)

581. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Selanjutnya Saudara Ridwan. Pak Daulay, cukup, Pak Daulay.

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Saudara Ridwan Agustua, ketiga saudara di TPS itu, anggota TNI-POLRI ada, enggak, di situ?

583. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Tidak ada, Yang Mulia.

584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Tidak ada? Mulai dari pembukaan sampai selesai tidak ada TNI-Polri di situ?

585. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Tak ada. Penghitungan yang ada, Yang Mulia.

586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Jadi, pada saat pelaksanaan tidak ada?

587. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Tidak ada, Yang Mulia.

588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Kemudian, yang mencoblos kertas itu siapa? Saudara tahu, enggak?

589. KETUA: ASWANTO

Tadi sudah dijawab, Pak (...)

590. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tadi sudah dijawab.

591. KETUA: ASWANTO

Dia tidak tahu.

592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Oh, sudah. Oke. Jadi, keterangan dari Saksi ini, Yang Mulia, sudah terjawab dengan Bukti PT-172.

593. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukti PT-172.

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Bukti PT-172, yaitu Model D Kejadian Khusus dari Bawaslu ... eh, dari KPU bahwa semua sudah terselesaikan di tingkat kecamatan, itu ada di Bukti PT-172, Yang Mulia.

595. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu termasuk yang menerima duit? Tidak?

596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Pokoknya di sini per kecamatan, ya, saya mungkin bisa bacakan. Kecamat ... termasuk di sini Panyabungan Utara karena dijelaskan oleh Saudara Ridwan ini tadi, kan, Panyabungan Utara, Yang Mulia. Kecamatan Panyabungan Utara itu ada di poin 20 di halaman 2 ini, Kecamatan Panyabungan Utara ada perbaikan data Model D Hasil Kecamatan KWK pada data pemilih laki-laki tertulis 7.955 diganti/dikoreksi menjadi 7.953. Pemilih perempuan tertulis 8.471 diganti/dikoreksi menjadi 8.473. Jumlah tidak ada pengaruh. Dan data pengguna surat suara pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos tertulis 26 diganti/dikoreksi menjadi 1. Kejadian khusus di tingkat kecamatan sudah selesai di kecamatan. Itu kira-kira catatan (...)

597. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Di Panyabungan Utara, Yang Mulia.

599. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Ada lagi? Cukup?

600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Sementara cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

601. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Mungkin dari meja Hakim mau didalami, silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

Baik. Terima kasih untuk Para Saksi (...)

602. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Yang Mulia, izin, Yang Mulia, sebelum ke Saksi boleh satu, Yang Mulia?

603. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Soal apa?

604. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Satu saja, Yang Mulia (...)

605. KETUA: ASWANTO

Giliran Saudara kan sudah selesai, sudah muter. Nanti Saudara minta satu, sudah di sana minta satu, di sana juga minta satu kan itu harus kita kasih (...)

606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Itu pasti, Yang Mulia. Supaya adil.

607. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Cukup terakhir saja, Yang Mulia.

608. KETUA: ASWANTO

Cukup, Mas.

609. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Cukup, ya? Tadi kan Anda sudah diberi kesempatan.

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Dan malah tadi mereka berdua tadi yang nanya, Yang Mulia (...)

611. KETUA: ASWANTO

Sudah, Bapak jangan bicara. Jangan, jangan ngomporin Hakim. Hakim biar dikompori juga enggak ada sumbunya. Enggak akan nyala, sudah.

612. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih untuk Saksi-Saksi Pak Hizrah, Pak Rahmad Daulay, sama Pak Ridwan. Terima kasih, sudah bisa meninggalkan ruangan.

Kita akan masuk pada Ahli, Pak Zainal apakah sudah ada?

613. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Izin, Yang Mulia.

614. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Yang Mulia. Saksi sudah bisa meninggalkan tempat.

615. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Saksi sudah bisa meninggalkan tempat, Pak.

616. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Apakah boleh menambahkan informasi, Yang Mulia?

617. KETUA: ASWANTO

Sudah cukup (...)

618. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah, sudah cukup Pak.

619. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN AGUSTUA HUTABARAT

Ya, siap Yang Mulia.

620. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya. Pak Zainal sudah ada?

621. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Hadir, Yang Mulia.

622. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, terima kasih. Mohon berkenan Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk mengambil sumpah.

623. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Mana ada juru sumpahnya, Pak Zainal?

624. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Insya Allah ada, Yang Mulia.

625. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana?

626. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Apa saya harus berdiri atau duduk saja, Yang Mulia?

627. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bagaimana?

628. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berdiri-berdiri.

629. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Apa ... sebaiknya berdiri.

630. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak berdiri nanti sama juru sumpahnya.

631. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Ya.

632. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Ikuti lafal sumpahnya saya bantu, Bapak yang bersumpah.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

633. SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

634. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih. Baik Pak Zainal bisa menyampaikan keterangannya kurang lebih 10 menit, nanti baru diberi kesempatan untuk didalami.

635. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Baik, Yang Mulia.

636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

637. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dari mana?

638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Boleh kami perdalam Saksi ini relevansinya dengan perkara ini karena setau saya (...)

639. KETUA: ASWANTO

Tidak usah, ini Ahli, Pak.

640. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ini Ahli.

641. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya, setahu kami beliau ahli pidana, Yang Mulia.

642. KETUA: ASWANTO

Apa namanya ... Hakim nanti yang menilai.

643. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nanti Hakim yang menilai, ya.

644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

645. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Pak Zainal, silakan.

646. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya membacakan beberapa keterangan, saya sudah menyetorkan sekitar 16 halaman, sekaligus catatan untuk Kuasa Pemohon bahwa saya pengajar hukum tata negara di Universitas Gadjah Mada sejak 2004. Saya pertama kali SK nya 2004. 1 Januari.

Substansi keterangan saya ini, saya akan bicarakan kurangnya ada 5 hal. Pertama, saya membahas sesuatu yang sebenarnya saya yakin Hakim Yang Mulia sudah paham dengan detail yaitu soal pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Mungkin saya akan tidak banyak di situ. Yang kedua, saya mau bicara soal netralitas

penyelenggara pemilihan. Yang ketiga, netralitas pejabat daerah, ASN dan Kepala Desa. Yang keempat, larangan penggantian jabatan. Dan yang kelima, hal-hal lainnya khususnya saya bicara soal pemilu yang tercemar, tercemar.

Nah yang pertama soal pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa kita punya doktrin yang sudah kita jalankan selama ini baik di wilayah konstruksi hukum gross violations of human rights, ya, dan itu dipinjam beberapa di antaranya walaupun sedikit berbeda pengertiannya di dalam berbagai konteks terstruktur, sistematis, dan massif. Putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah mengulang itu, khususnya pilkada Jawa Timur tentu saya ulangi lagi. Begitu juga dalam beberapa putusan lain yang pada intinya Mahkamah Konstitusi selalu mendorong ke arah pembuktian sesuatu yang terstruktur, sistematis, dan massif.

Salah satu juga barang kali kita harus mengingat putusan Kotawaringin Barat di mana di situ didetailkan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif itu kalau telah direncanakan sedemikian rupa, meluas, dilakukan secara terstruktur dan menggunakan pasangan calon tim kampanye seluruh relawan sampai dengan tingkatan yang terendah di wilayah RT. Itu bisa dilihat di putusan 45.

Nah izinkan saya bercerita soal pemahanan saya apa yang dimaksud dengan terstruktur, sistematis, dan massif. Dalam pemahaman saya, maksud terstruktur, sistematis, dan massif itu ada poin-poin penting selain yang sudah dibicarakan oleh Mahkamah selama ini. Yang pertama adalah unsur yang disebut dengan meeting of mind, ya. Jadi, ada unsur di mana di antara pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran itu, itu terlihat kerjasama yang nyata. Jadi, ada pemikiran yang sama, kerjasama yang nyata, dan kolektif terjadinya. Termasuk disusun sedemikian rupa hingga menghalalkan berbagai hal di belakang itu. Saya memberikan misalnya, contoh sederhana dari substansi permohonan yang saya dikirimkan. Ketika menyusun ... apa ... pelanggaran dengan bentuk melakukan mutasi, itu membuat surat-surat dictated itu sebenarnya menunjukkan sesuatu yang menurut saya sangat sistematis, membuat surat yang dictated untuk membenarkan teguran dari Bawaslu atau teguran dari Kemendagri. Karena surat dari Kemendagri sepemahaman saya keluar setelah dipamsirkan ... ditampilkan adanya bukti surat yang dictated. Saya termasuk yang mengatakan prinsip kecurangan ini adalah prinsip kecurangan yang sangat luar biasa karena kemudian dilakukan dengan upaya yang luar biasa.

Yang kedua, saya mau bicara soal sistematis. Sistematis itu adalah mensyaratkan suatu pelanggaran tersebut telah direncanakan secara matang, terstruktur, dan rapi, ya, sebagaimana yang dikenal dalam teori hukum yang disebut dengan dolus premeditatus. Artinya, ya, ini mensyaratkan bahwa ada beberapa hal yang harus dibuktikan dalam artian siapa saja yang terlibat, siapa yang merencanakan, bahkan

kecurangan terstruktur itu dilakukan oleh lapisan mana saja. Yang ketiga, tentu saja pendapat saya soal masif, tentunya untuk membicarakan soal meluasnya suatu kecurangan, dampak dari suatu kecurangan atau cara untuk melakukan yang dilakukan secara sedemikian rupa.

Nah, terkait yang saya mau bicarakan tadi, saya mengingat pada Putusan MK Nomor 115 PPHU Tahun 2013 yang itu bicara bahwa pelanggaran-pelanggaran money politics, keterlibatan oknum pejabat PNS, dugaan pidana pemilu yang bersifat TSM, ada persyaratan calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur seperti syarat yang tidak pernah dijatuhkan dan lain-lain sebagainya, dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pilkada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat dari awal.

Nah, pilihan-pilihannya juga ada banyak sudah saya tuliskan soal kemungkinan penghitungan ulang, pemungutan suara ulang, diskualifikasi, dan apa yang terjadi saya lihat dari apa yang terjadi di Mandailing Natal.

Nah, yang kedua, saya bicara soal perihal larangan penggunaan kewenangan program dan kegiatan. Kalau kita lihat Pasal 71 ayat (3), Pasal 71 ayat (3) dalam pemahaman saya itu dilarang menggunakan kewenangan program kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, ya. Nah, kalau di sini, ada alat ukurnya adalah 6 bulan. Jadi, 6 bulan tidak boleh melakukan sebuah tindakan yang itu menguntungkan. Kalau tadi dibicarakan bahwa ada pembagian BLT yang terjadi 1 hari setelah ... 1 hari sebelum hari pemilihan, saya tidak bisa memahami bagaimana ... apa ... struktur pemerintahan tidak paham dengan bunyi Pasal 71 ayat (3) ini. Karena bagi saya, Pasal 71 ayat (3) itu harusnya dipahami oleh semua orang, apalagi bertindak sebagai seorang petahana. Dia harusnya ... bahwa untuk menghindarkan kecurigaan orang terhadap penggunaan Pasal 71 ayat (3) harusnya dia bagikan setelah, tapi kalau dia memaksakan dibagikan sebelum apalagi kalau benar tadi keterangan-keterangan bahwa dikumpulkan, lalu kemudian dilakukan serangkaian upaya untuk mencairkannya sehari atau dua hari sebelum hari pemilihan, menurut saya itu menunjukkan iktikad yang tidak baik untuk menggunakan substansi program jenis kegiatan negara dipakai untuk sebagai konteks politik. Ini di negara-negara lain disebut dengan pork barrel politics. Jadi pork barrel politics itu jelas, sebuah bantuan negara yang dipakai untuk kepentingan politik. Dan kalau memang benar, lagi-lagi ya yang disampaikan bahwa diatur sedemikian rupa, dua faktor menurut saya menjadi sangat penting. Satu, apa faktor luar biasa sehingga tidak bisa ditunda sampai 2, 3 hari untuk membagikan demi tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) ini dan sebaliknya, apa faktor luar biasa sehingga wajib dibagikan pada tanggal 7 dan 8 atau sehari sebelum ... sehari, dua hari sebelum itu.

Itu menurut saya menjadi catatan besar dalam faktor pencairan BLT itu, walaupun keterangan lainnya menurut saya, saya sudah jelaskan di situ. Bahkan kalau benar yang terjadi karena saya lihat dari permohonan itu diantar, dipaksakan pada malam hari, ya, dan lain-lain sebagainya. Menurut saya kelihatan betul tujuannya, sulit untuk membedakan antara tujuan membagi program pemerintahan dengan tujuan untuk menjadikan itu sebagai pork barrel. Ya, pertanyaan paling dasarnya menurut saya yang harus dijelaskan oleh aparat pemerintahan tentu saja dalam hal ini petahana. Apa kaitannya sehingga tidak bisa menunda hanya 2-3 hari? Misalnya membagikan setelah tanggal 10 ke atas karena itu sangat berpotensi, ya, dan dia harusnya tahu, Pasal 71 ayat (3) itu harusnya dia tahu bahwa itu menjadi potensi besar untuk terjadinya pelanggaran. Apalagi kalau memang benar terjadi ada ... dan lain-lain sebagainya itu semakin menjelaskan menurut saya (...)

647. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pak Zainal, waktunya 2 menit lagi. Kalau bisa dipersingkat.

648. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Insya Allah, Yang Mulia. Yang kedua, soal integritas dan netralitas penyelenggara pemilih. Saya pikir bahwa di dalam netralitas ini jelas, ya, harusnya begitu banyak perintah untuk melakukan lebih netralitas. Misalnya penyelenggaraan pemilih yang mengamankan kotak suara, pemilih tidak ... tidak terjadi ... tidak mengamankan kotak suara, bahkan terjadi di mana petugas pemilihan, dalam hal ini ikut masuk untuk mencoblos itu menurut saya membuktikan bahwa terjadi ketidaknetralan dari sisi itu.

Perihal yang keempat, netralitas ASN. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita baca pada 71 ayat (1) itu jelas dikatakan bahwa harusnya netral, ya, jadi tidak boleh ada keterlibatan apalagi kalau kemudian ada upaya menggunakan camat, menggunakan unsur-unsur desa untuk melakukan pemenangan. Salah satu juga yang penting, yang kelima, tentu saja karena waktu yang terbatas. Larangan penggantian pejabat. Saya mengatakan bahwa larangan penggantian pejabat ini sangat penting, kenapa sangat penting? Karena menurut surat edaran Mendagri dan kepala SE BKN itu tidak dibolehkan apapun selain di 3 kondisi, ya. Kalau mengisi kekosongan, proses pengisiannya sudah dilakukan sebelumnya dan apabila terjadi proses seleksi terbuka maka ... atau belum diseleksi terbuka maka harusnya dengan PLT.

Nah, apa yang saya mau sambungkan dengan yang terjadi? Larangan pergantian jabatan ini sangat mungkin dikaitkan dengan penggunaan ancaman kepada pejabat daerah untuk melakukan dukungan atau tidak, ya. Jadi kalau ada pergantian, saya agak sulit

menerima logikanya karena bunyi undang-undangnya jelas-jelas sudah mengatakan tidak boleh untuk menghindari ini. Kalau kemudian dikatakan misalnya, ya, logikanya bahwa ini bukan pergantian, tapi ini bagian dari penegakan PP Nomor 53, maka menurut saya subsistem penegakan PP Nomor 53 yang harus dibaca dengan detail. Misalnya di PP Nomor 53 itu jelas mengatakan bahwa untuk menjatuhkan sanksi harus melalui proses teguran dari awal, teguran 1, teguran 2, teguran 3 sampai diujungnya dijatuhkan sanksi. Juga harus tepat pasalnya, ya. Penjatuhan sanksi dalam bentuk pemecatan dan lain sebagainya yang itu fatal, itu biasanya bukan di Pasal 4, tetapi itu biasanya di Pasal 10 yang berbeda yang berkaitan dengan kejahatan negara.

649. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, waktunya Pak Zainal, bisa disimpulkan biar nanti ini bisa didalami.

650. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Baik. Insya Allah, Yang Mulia. Satu, izin Yang Mulia. 1 menit lagi.

Saya ingin mengatakan bahwa biar bagaimana pun pergantian itu harus dipelajari dengan detail karena ... apalagi jika memang benar dibuat tanggal yang dictated hanya untuk membenarkan perilaku itu. Menurut saya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa.

Untuk menyimpulkan sebenarnya apa yang saya sampaikan karena saya yakin, saya ingin mengatakan bahwa ada satu doktrin yang harus diinikan, yaitu tainted election, dimana kalau sebuah proses pemilu sudah tercemar tentu menjadi kewajiban buat kita untuk menyelesaikan ketercemaran itu, dan menurut saya dengan berbagai catatan bahwa adanya ketidaknetralan, adanya peran campur PNS, adanya apa ... keindependenan penyelenggara dan lain sebagainya itu sudah membuat election menjadi tercemar.

Nah, saya ingin mengatakan terakhir bahwa bagi saya, Yang Mulia, pelanggaran itu ada dua jenis. Ada pelanggaran yang berkaitan dengan angka, ya, dan bisa jadi kalau angka ini tentu harusnya kita sesuaikan dengan pelanggaran yang angka juga, yaitu bisa jadi penghitungan suara ulang atau kemudian pemungutan suara ulang. Tetapi kalau dilakukan secara sistematis, masif oleh petahana dengan menggunakan struktur kekuasaan yang dia punya, saya ingin mengatakan sulit untuk dikatakan harusnya pemilu suara ulang atau yang lain sebagainya. Menurut saya, harusnya kita semua memberikan hukuman kepada orang yang bermain curang, orang yang tidak menggunakan itikad dengan baik, orang yang merusak demokrasi dengan cara mendiskualifikasinya. Menurut saya itu menjadi jauh lebih

tepat dan menjadi pas dalam rangka menjaga suara rakyat secara keseluruhan.

Seluruh keterangan saya, detailnya sudah saya serahkan dan saya yakin sudah ada di meja, Yang Mulia. Terima kasih. Wallahumalafalumafitorik, wassalamualaikum wr. wb.

651. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Pak Zainal. Keterangan Ahlinya juga sudah kami terima, ini dalam Bukti P-26. Baik, dari Pemohon mungkin ada yang mau didalami? Mungkin satu pertanyaan, cukup.

652. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya, cukup, Yang Mulia.

653. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan.

654. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Satu pertanyaan saja. Saudara Ahli, halo, dengar?

655. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Insy Allah, dengar.

656. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya, menarik tadi yang Saudara Ahli katakan soal tainted election karena memang kami juga sudah membuat beberapa laporan di Bawaslu, Saudara Ahli. Tapi dari beberapa laporan yang kami masukkan di Bawaslu itu, tidak ada ... ada yang tidak diregistrasi dan kemudian ada dengan alasan-alasan saksi dan segala macam, tetapi tidak ada yang sampai ke ... apa namanya ... ke persidangan untuk bisa dibuktikan, gitu.

Nah, kalau misalnya kita merujuk dengan pelaksanaan pilkada ini, tentu banyak hal yang kita alami bersama, salah satunya ada pelanggaran dan sudah dilaporkan segala macam, kami ingin minta pendapat Saudara Ahli tentang misalnya karena kami, Yang Mulia, sudah muat di P-23 ... P-23.7 itu berkaitan dengan laporan. Mungkin kami minta pandangan Ahli tentang salah satu tentang laporan-laporan atau tindakan-tindakan yang di lapangan, yang kira-kira tidak berimbang,

tetapi nyata-nyata menurut kami itu berpengaruh terhadap perolehan hasil. Silakan, Ahli.

657. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Mohon izin, Yang Mulia. Saya jawab.

658. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan.

659. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Baik. Bagi saya tentu saya selalu mengatakan bahwa sistem pemilu dibangun dengan katup-katup pengaman, ya. Dalam artian ada penyelenggara, lalu ada pengawas. Harapannya tentu saja adalah Bawaslu melakukan penegakan hukum untuk itu, tapi bayangan saya Bawaslu juga punya keterbatasan. Keterbatasan dari sisi membuktikan dengan waktu yang cukup singkat, juga karena keterbatasan begitu banyak hal, misalnya di Pasal 154 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa melewati lebih dari 30 hari tahapan.

Jadi memang ada hal yang barangkali Bawaslu itu tidak bisa menegakkan secara keseluruhan semuanya. Satu, tentu saja adalah bisa jadi karena imparialitasnya terganggu, bisa jadi satu sisi, tapi di lain sisi memang secara administratif juga bisa jadi terganggu karena tidak bisa dieksekusi, misalnya karena ada keterbatasan tidak melewati tahapan sampai 30 hari dalam kaitan misalnya, ya, laporan-laporan yang berkaitan dengan kepesertaan, ya. Misalnya dia melakukan pelanggaran, menggunakan anggaran dan lain sebagainya. Padahal itu diputus dalam 30 hari sebelum hari pemungutan.

Nah, maksud saya adalah saya membayangkan memang, Yang Mulia, terpaksa Mahkamah Konstitusi harus mengambil porsi untuk membersihkan itu karena di tengah proses pemilihan kita yang sering kali memang bermodel tainted, tercemar, gitu, Mahkamah Konstitusi terpaksa ... dipaksa untuk kemudian masuk untuk mengambil peran-peran itu, tapi saya bayangkan demi menjaga suara rakyat, maka saya bayangkan mau tidak mau terpaksa Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan judicial activism-nya itu harus mengambil alih wilayah itu untuk menyelamatkan pemilu. Begitu, Yang Mulia.

660. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Dari Termohon, ada yang mau ditanyakan? Silakan.

661. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Sedikit mau tanyakan kepada Ahli. Saudara Ahli bahwa sesuai dengan regulasi yang ada terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan perubahan-perubahannya dan kemudian juga muncul peraturan pelaksanaan, yaitu peraturan KPU dengan perubahan-perubahannya. Saya ingin tanyakan kepada Ahli. Apa pendapat Ahli, terkait dengan pembagian kewenangan tugas dalam kaitan pelanggaran-pelanggaran yang mencakup dalam proses pelaksanaan pemilukada? Karena kita tahu untuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, ini menjadi kewenangan Bawaslu.

Ada juga pelanggaran terkait dengan pidana, ada penegakan hukum menjadi pidana pemilu, kemudian ada juga peradilan khusus terkait dengan pelanggaran TSM, menjadi kewenangan Bawaslu provinsi. Nah, di dalam konteks kewenangan Mahkamah juga sudah jelas di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi bahwa kewenangan Mahkamah terkait dengan pemilukada adalah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 2 yang disebut sebagai objek perselisihan hasil pemilihan ini.

Yang ingin saya tanyakan kepada Ahli dalam konteks ini, apa yang kemudian menjadi apa tadi ... yang menjadi isu yang dibangun terkait dengan tindakan-tindakan seorang pejabat atau seorang pasangan calon. Apakah dalam konteks ini Mahkamah berwenang mengadili untuk itu? Atau itu merupakan sebuah pelanggaran yang ... yang seharusnya menjadi ranah kewenangan Bawaslu?

662. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Untuk Termohon, tadi saya kira sudah dijawab bahwa itu ada 2 hal soal imparial dan secara administrasi sudah terjawab sebetulnya tadi. Tapi silakan kalau Ahli mau memberikan keterangan lagi, silakan.

663. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Saya izin menjawab singkat saja, Yang Mulia. Saya selalu mengandaikan andai kata semua orang menjalankan tugasnya seperti yang disampaikan di undang-undang, maka kita tidak perlu ribut-ribut seperti ini. Saya yakin Mahkamah Konstitusi juga hanya tinggal jauh lebih mudah menghitung soal suara saja. Tetapi di tengah ketidakbecusan atau mungkin barangkali ketidakmampuan mengerjakan tugas kepemiluan, maka mau tidak mau terpaksa, Yang Mulia.

Saya ingat betul juga, jangankan hanya peraturan KPU, Bawaslu, undang-undang saja Mahkamah Konstitusi bisa melakukan terabasan yang luar biasa. Misalnya adalah batasan-batasan prosentase suara 2,5

sampai berapa persen dan saya lihat Mahkamah Konstitusi sudah melakukan luar biasa kali ini dengan menerabas begitu banyak perkara.

Nah, bayangan saya, kita enggak bisa lagi ... enggak zamannya kemudian memaksa mengatakan bahwa harus taat undang-undang, ya. Pada saat yang sama sebenarnya pertanyaan mendasarnya adalah apakah penegakan hukum pemilu sudah dilakukan dengan baik? Andai sudah dilakukan dengan baik dan benar, menurut saya tidak ada masalah kalau kemudian stick dengan undang-undang. Tetapi tatkala ada yang tidak pas menjalankan itu, ya mau tidak mau memang terpaksa Mahkamah Konstitusi bekerja untuk menyelamatkan demokrasi di ujungnya dan ... ya, masuk ke wilayah-wilayah yang barangkali ada batas-batas lebar dan saya pikir putusan MK sudah begitu banyak tentang menjelaskan betapa Mahkamah Konstitusi harus menjaga itu dan menerabas ketika suara rakyat di ... disakiti oleh perbuatan-perbuatan yang tidak tepat dalam konsep kepemiluan.

Begitu, Yang Mulia.

664. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Masih ada?

665. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Cukup, Majelis.

666. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Cukup, ya. Dari Pihak Terkait?

667. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, tadi sudah membahas 5 poin TSM, realitas, dan lain-lain, termasuk BLT. Ketika ada dalam satu pemerintahan itu bahwa ada bupati, ada wakil bupati, ada kebijakan yang keliru, apakah bupati dan wakil bupati itu ikut bertanggung jawab apa tidak? Mengingat calon nomor 1 ini juga adalah wakil bupati yang sedang menjabat. Lalu, kalau ada kesalahan apakah cukup ke bupati nya saja atau ikut bupati nya. Mohon penjelasan Saudara Ahli.

668. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Silakan, Ahli.

669. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Mohon izin, Yang Mulia.

670. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan.

671. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Bagi saya yang paling mendasar adalah pelanggaran itu dilakukan oleh pemilik otoritas, ya. Pemilik otoritas tentunya saja siapa yang memerintahkan. Nah, nanti kita bisa panjang bicara soal kewenangan bupati dan kewenangan wakil bupati karena kewenangan wakil bupati bersifat membantu sebenarnya, bukan bersifat decision making, tapi itu persoalan lain.

Bayangan saya yang paling utama adalah yang harus dilihat, apakah memang terjadi upaya pelanggaran luar biasa yang itu dilacak sejak awal atau kemudian itu direaksikan dari awal. Dan kalau kita mau bicara soal jenis pelanggaran, ya, itu akan makin memperlihatkan, ya kenapa ... karena kemudian dikaitkan dengan kepemiluan ... dikaitkan dengan pembagian dan lain-lain sebagainya.

Nanti barangkali bisa saja, Yang Mulia, tanyakan saja ke wakil bupati apakah dia setuju dengan pembagian di tanggal 6 atau 7 itu atau 7 atau 8 itu? Kalau dia tidak setuju, ya berarti memang terjadi perpecahan. Itu kan persoalan mudah sebenarnya untuk dijawab, Yang Mulia. Tinggal ditanyakan saja, apakah setuju enggak wakil bupati dengan itu? Apakah wakil bupati sudah mengingatkan pak bupati untuk mentaati Pasal 71 ayat ... Pasal 71 ayat (1) ... 71 ayat (2)? Apakah ... apakah sudah ada upaya itu? Itu kan sederhana sekali untuk membuktikannya hanya untuk mengatakan bahwa melihat apakah memang pertanggungjawaban itu berkaitan dengan administrasi kenegaraan, administrasi pemerintahan, atau sebenarnya ini berkaitan dengan administrasi pemerintahan yang dibungkus dengan alasan politik.

Begitu, Yang Mulia.

672. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Satu lagi izin, Yang Mulia.

673. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan.

674. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Apabila ada paslon yang mengedarkan voucher di mana di situ ada gambar paslon itu, ada nomor pesertanya, kemudian itu dibagikan kepada masyarakat dengan janji apabila di tempat masyarakat itu berada ternyata paslon yang bersangkutan menang itu akan dibayar dan juga sudah ada DP. Apakah itu bagian dari TSM atau tidak Ahli? Tolong dijelaskan! Bukti 25A, 25B, 25C, Yang Mulia. Silakan Ahli!

675. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Mohon izin, Yang Mulia.

676. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan!

677. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Pada dasarnya, saya ... saya termasuk yang mengatakan tidak diizinkan penggunaan uang bagaimana pun, ya. Tentu harus di cek bagaimana proses konteks pembagian voucher dan lain-lain sebagainya, harus di cek.

Yang kedua adalah kalau ada pembagian uang maka harus dikorelasikan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan apakah pembagian itu dalam rangka uang transportasi dan lain sebagainya itu ... itu ada aturan tersendiri. Tapi yang kedua menurut saya yang harus benar-benar dicek adalah soal terstruktur, sistematis, dan masifnya, menurut saya itu penting. Kenapa? Karena biasanya terstruktur, sistematis, dan masif itu bukan hanya sekadar pembagian uang, tapi menggunakan pemerintah. Dia menyebabkan struktur kenegara ... dia melibatkan struktur pemerintah.

Jadi bahwa mungkin ada 1, 2 yang membagi, ya, bisa jadi, ya. Tetapi logika yang paling dasar tidak karena dia curang, maka saya juga boleh curang, itu satu harus ditanamkan betul. Yang kedua adalah tentu harus dilacak kecurangan itu. Dan yang ketiga yang paling penting, ini seberapa struktur negara terpilih di situ. Karena menurut saya TSM itu adalah struktur negara itu yang paling banyak bicara. Seperti yang saya bilang doktrin eh ... apa ... a widespread or systematical attack dalam gross violation of human rights karena itu memang agak relatif agak mirip, kenapa? Karena di situ ada struktur negara. Makanya disebut misalnya di sana ada comment responsibility, ada tanggung jawab komando dalam konteks tanggung jawab ke atasan.

Nah, yang faktor-faktor begini menurut saya, Yang Mulia, akan sangat menentukan seberapa kuat sebenarnya ... seberapa besar

sebenarnya terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang dimaksud dan saya ceritakan sekian lama. Terima kasih, Yang Mulia.

678. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Saya kira cukup, ya, Pihak Terkait?

679. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Cukup, Yang Mulia.

680. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nanti dari meja Hakim Yang Mulia, saya mungkin duluan satu saja Ahli. Apakah TSM itu hanya oleh ... bisa dilakukan oleh Petahana atau juga misalnya bukan Petahan tapi dia melakukan? Misalnya gini, ada kasus ter ... kasus tertentu itu sebelum penetapan pasangan calon atau pendaftaran misalnya dia sudah membagi sekitar Rp60 miliar ke masyarakat, alasannya ingin ... awalnya belum ditetapkan tetapi itu sudah dilakukannya, ya. Nah, apakah itu bisa dianggap sebagai bagian TSM? Hanya itu saja Saudara pertanyaan saya. Silakan!

681. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Mohon izin, Yang Mulia.

682. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

683. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Bagi saya TSM pada dasarnya sebenarnya melibatkan beberapa faktor. Satu, tentu saja melibatkan pelanggaran itu sendiri. Yang kedua adalah melibatkan struktur negara. Yang ketiga, melibatkan keadaan yang diatur sedemikian rupa. Jadi bagi saya TSM dasarnya itu karena memang kita menggunakan model TSM awalnya itu meminjam konteks gross violation of human rights dalam statuta Roma, a widespread or systematic attack yang kemudian itu juga ditulis dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ya, menurut saya itu dasarnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi pilkada menurut saya ... dari sisi pemilu, maka siapapun yang bisa menggerakkan, membuat sedemikian rupa dengan melibatkan berbagai faktor untuk melakukan kecurangan menurut saya itu juga bisa diukur tes, cuma bedanya satu saja. Kalau tadi diukur betul-betul hanya dari siapa pelaku, ya, pelakunya, apa yang dilakukan, keluasannya, dan

lain-lain sebagainya. Maka kalau dari sisi non Petahana biasanya yang bisa diukur itu adalah sisi dampaknya. Seberapa luas dampaknya, itu berpengaruh pada orang yang dibayar dan jumlah per suara yang berubah. Yang dipercaya bisa di ... di ... di ... lihat searah ... ke arah itu. Saya ingat Prof. Bagir, saya ingat itu, saya lupa nanti saya cek kembali bukunya, ya. Prof. Bagir juga menuliskan soal itu.

Nah, poin saya, Yang Mulia, tentu ada kemungkinan, walaupun doktrin TSM dasarnya seharusnya memang adalah negara, pemilik kepentingan. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan karena yang namanya kuasa kalau kita pakai teori kekuasaan, kita mau pakai teorinya siapa gitu. Dia tidak ... kuasa itu tidak harus hanya kuasa legitimasi tapi bisa kuasa simbolik. Mohon maaf misalnya, ya. Ada seorang Ketua Ormas itu dia memiliki kuasa sebenarnya, ya. Bukan kuasa legitimasi, bukan kuasa negara. Tapi kuasa ... kuasa simbolik berdasarkan teorinya siapa? Ya, kita bisa pakai teorinya Michael Cuco[Sic!], terserah ada banyak teori soal kuasa. Tapi bayangan saya teori kuasa akan menentukan karena dengan kuasa itu dia bisa mempengaruhi, dia bisa menggunakan dan itu menjadi lebar dan besar. Nah, tinggal sekarang diukur menurut saya tambahan yang paling utamanya tentu saja yang menjadi sifat pelanggarannya adalah seberapa sistematis dampaknya bagi saya kalau non Petahana, tapi kalau petahana menurut saya, ya, menurut saya dengan melakukan itu saja dia membuktikan bahwa dirinya menjadi tidak pantas menjadi seorang kepala daerah.

Dengan melakukan itu saja, sederhana. Karena dia melanggar begitu banyak hal, termasuk kewajiban dibebankan di pundaknya ketika memegang jawaban itu. Begitu, Yang Mulia.

684. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Yang Mulia Pak Ketua? Cukup?

Baik, untuk Ahli terima kasih, Pak Zainal, untuk keterangannya pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan dengan saksi dari Pihak Terkait, ya? Termohon ada saksinya?

685. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Izin, Majelis? Kami dari Termohon hanya menyampaikan saksi, tertulis saja.

686. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, saksi tertulis.

687. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Sudah kita masukan tambahan bukti.

688. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, berarti kesempatan ini untuk Pihak Terkait.

689. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Baik, Yang Mulia. Kami mengajukan 3 orang saksi fakta dan 1 ahli. Mana duluan ini, faktanya dulu, Yang Mulia.

690. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Nanti semua langsung disumpah, ya. Setelah itu baru nanti yang saksi fakta duluan.

691. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Baik, Yang Mulia, terima kasih.
Tolong, Ahli, Ahli.

692. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Pak, sebentar.

693. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dari tim IT bisa dibantu untuk hadirkan.

694. KETUA: ASWANTO

Saksi dulu, Saksi dulu, maju sama Ahli.

695. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Saksi dulu, Pak?

696. KETUA: ASWANTO

Nanti yang mana yang Anda mau dalami, itu terserah Anda. Tetapi untuk disumpah, sama-sama disumpah dulu.

697. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Oh, ya.
Tolong? Ya, ini Ahli kami.

698. KETUA: ASWANTO

Saksinya mana? Lain tempat ndak Saksinya?

699. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Halo Saksi? Arief?

700. PIHAK TERKAIT:

Ya, bagaimana?

701. KETUA: ASWANTO

Ya, Saksi ditampilkan dulu.

702. PIHAK TERKAIT:

Semuanya, Yang Mulia?

703. KETUA: ASWANTO

Biar kita sumpah dulu saksi sama ahli. Nanti siapa yang mau didalami lebih awal, kita serahkan kepada Pihak Terkait.
Saksinya belum ada?

704. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ada, sudah ada. Sudah stand by, Yang Mulia. Mungkin faktor sinyal saja ini.

705. KETUA: ASWANTO

Kalau begitu ahli dulu, Yang Mulia.

706. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kalau ahlinya sudah ada?

707. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Sudah, itu tadi.

708. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, bisa disumpah dulu ahlinya.

709. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya, boleh, Yang Mulia.

710. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

IT? Tolong hadirkan Ahli.

711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Eh, ini Ahli.

712. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah. Sudah, ya?

713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ahli dulu, ya.

714. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bu, disumpah dulu, ya? Ibu Mahaarum Kusuma Pertiwi, beragama Islam, ya?

715. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Baik, Yang Mulia.

716. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ibu Mahaarum Kusuma Pertiwi, beragama Islam, ya?
Mohon, Yang Mulia, Pak Suhartoyo untuk pengucapan sumpahnya.

717. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih.
Saya bantu lafalnya Ibu, ya? Tirukan!
"Bismillahirrahmaanirrahiim."

718. AHLI DARI PIHAK TERKAIT:

Bismillahirrahmaanirrahiim.

719. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Suaranya kurang bagus, ya. Coba mungkin miknya didekatkan?
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

720. AHLI DARI PIHAK TERKAIT:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

721. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup.

722. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang saksinya sudah ada? Bisa disumpah dulu.

723. PIHAK TERKAIT:

Sudah, Yang Mulia.

724. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah ada, ya? Oke.

725. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Arief, tolong arief.

726. PIHAK TERKAIT:

Sudah, Yang Mulia.

727. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh.

728. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Sudah siap.

729. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Rohaniwan juga sudah ada?

730. PIHAK TERKAIT:

Sudah, Yang Mulia.

731. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo, bisa.

732. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Anjur Brutu yang mana?

733. PIHAK TERKAIT:

Yang kanan, Yang Mulia.

734. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana? Angkat tangan! Anjur Brutu? Yang mana?

735. PIHAK TERKAIT:

Ini, Yang Mulia.

736. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana? Angkat tangan!

737. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Tangannya diangkat.

738. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anjur Brutu? Mana orangnya?

739. PIHAK TERKAIT:

Yang Mulia, ini.

740. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Angkat tangan, Pak. Tangannya diangkat yang namanya Anjur Brutu.

741. PIHAK TERKAIT:

Ini, Yang Mulia.

742. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana? Tangan ... angkat tangan, Pak!
Ini pakai masker, kemudian lewat virtual nanti takutnya orang lain yang berdiri di situ.
Anjur Brutu yang mana?

743. PIHAK TERKAIT:

Hadir, Yang Mulia.

744. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana? Yang tengah?

745. PIHAK TERKAIT:

Baju hijau, Yang Mulia.

746. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Angkat tangan, Pak, angkat tangan! Ah, susah sekali angkat tangan saja.
Darwis Nasution?

747. SAKSI PIHAK PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Saya, Yang Mulia.

748. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Anjur Brutu dan Darwis Nasution beragama Islam, ya?

749. PIHAK TERKAIT:

Ya, Yang Mulia.

750. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau Indah Juniarti, Kristen, ya?

751. SAKSI PIHAK PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Ya, Yang Mulia.

752. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Angkat tangan coba. Oke.

Kalau begitu, Ibu mundur sedikit, Bu Juniarti mundur sedikit. Mundur dahulu, Bu ... Ibu mundur ... mundur, Juru Sumpahnya maju, Pak. Maju, Pak, mepet ke Saksinya, Pak. Juru Sumpah, Rohaniwannya, mana Juru Sumpahnya? Yang bawa Alquran mana?

753. PIHAK TERKAIT:

Ini, Pak.

754. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mendekat, Pak, ke Saksi-Saksi Pak, mendekat.

755. PIHAK TERKAIT:

Ya, sudah Pak, sudah.

756. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana? Enggak keliatan gambarnya.

Kurang enggak bisa ditangkap dengan kamera. Di tempat Ibu Juniarti tadi berdirinya. Berdiri di tempat Ibu tadi.

Ha? Oh, anu. Juru Sumpahnya tidak berdiri di tempat Ibu tadi, Bu Juniarti.

757. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Itu merapat ... juru ... juru sumpah merapat di tempat Ibu Indah tadi.

758. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ndak usah Bapak yang komando, Pak.

759. PIHAK TERKAIT:

Mohon maaf, Yang Mulia.

760. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ha?

761. PIHAK TERKAIT:

Koneksinya agak (suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

762. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Agak apa?

763. PIHAK TERKAIT:

Agak jelek, Yang Mulia, koneksinya.

764. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi jelas enggak? Kalau mau disumpah, Saksi-Saksinya (...)

765. PIHAK TERKAIT:

Suaranya jelas, Yang Mulia.

766. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kalau mau disumpah Saksi-Saksinya harus didampingi Rohaniwan.

767. PIHAK TERKAIT:

Siap, siap.

768. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rohaniwannya mana?

769. PIHAK TERKAIT:

Sudah siap, Yang Mulia.

770. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Juru Sumpahnya mana?

771. PIHAK TERKAIT:

Ya, Yang Mulia. Rohaniwannya sudah ada di samping saya, Yang Mulia.

772. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana? Kok enggak kelihatan. Mana? Juru Sumpahnya mana?

773. PIHAK TERKAIT:

Ini, Yang Mulia.

774. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana? Apa tertutup gambarnya ini enggak utuh, ya?

775. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Apa kita mulai Ahli dahulu?

776. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Coba geser di sebelah kiri yang Pak Anjur Brutu, Juru Sumpahnya pindah ke samping sebelah sini.

777. PIHAK TERKAIT:

Sudah, Pak. Sudah, Yang Mulia.

778. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waduh, kok enggak kelihatan, ya? Coba diperbaiki dahulu jaringannya. Nanti kita dengarkan Ahli dahulu, ya?

Soalnya kami enggak bisa meyakini bahwa proses penyempahan ini memenuhi ketentuan yang diatur undang-undang. Silakan di ... Bapak koordinasi, siapa yang di sana, Pak Arief, ya?

Coba, Pak Arief. Diperbaiki dahulu jaringannya, pak, nanti kami coba lagi untuk melakukan penyempahan. Sekarang mau mendengar keterangan Ahli dahulu.

779. PIHAK TERKAIT:

Baik, Yang Mulia.

780. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk berkoordinasi apa boleh diperkenankan beliau keluar dahulu untuk (...)

781. KETUA: ASWANTO

Boleh-boleh.

782. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya. Terima kasih.

783. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya. Kita mulai dengan Ahli dahulu, ya? Ini Ahli sudah siap.

Ibu Mahaarum, kami beri kesempatan kurang-lebih 10 menit menyampaikan poin-poinnya saja, setelah itu nanti dilanjutkan dengan pendalaman nanti. Silakan, bu.

784. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Aswanto, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic, yang saya hormati.

Saya hendak memaparkan mengenai perbedaan penting antara nomenklatur perselisihan hasil dengan sengketa proses di dalam rezim pilkada di Indonesia. Nah, perbedaan nomenklatur ini penting untuk diterangkan demi memberikan kepastian hukum serta menghindari double jeopardy atau nebis in idem dalam penyelesaian sengketa pilkada, terlebih penting untuk diingat mengenai kewenangan absolut

yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, sehingga tidak ada lembaga yang tidak menyalahi kewenangannya atau (suara tidak terdengar jelas). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, saya akan memaparkan penjelasan tentang ini empat hal.

Yang pertama, sengketa proses dan pelanggaran pilkada di Bawaslu. Kedua, pelanggaran TSM di Bawaslu. Ketiga, perselisihan hasil pilkada dan TSM di MK. Dan keempat, kewenangan MK untuk mendiskualifikasi calon, permohonan untuk PSU, dan penihilan suara.

Pertama, mengenai sengketa proses dan pelanggaran pilkada di Bawaslu. Bawaslu berwenang menyampaikan sengketa pemilihan dalam proses pilkada yang meliputi sengketa pemilihan antara peserta pilihan dengan penyelenggara pemilihan, dan sengketa pemilihan antar peserta pemilihan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020.

Kedua, mengenai pelanggaran TSM di Bawaslu. Di dalam putusan perkara perselisihan hasil pilpres 2019, MK berpendapat di dalam ratio decidendi nya bahwa adapun pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, penanganan berupa pemeriksaan dan (suara tidak terdengar jelas) hanya dilakukan oleh Bawaslu. Di dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 dijelaskan mengenai kriteria laporan pelanggaran administrasi TSM, yaitu terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) dari Peraturan Bawaslu tersebut menjelaskan mengenai ukuran kualitatif dari TSM, dalam poin a dari Pasal 4 ayat (2) tersebut, terdapat keharusan adanya unsur kolektif atau Bersama-sama. Artinya, jika perbuatan hanya dilakukan oleh perseorangan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang terstruktur.

Poin b, menjelaskan mengenai kriteria sistematika dimana pelanggaran tersebut haruslah direncanakan secara matang, terstruktur, bahkan sangat rapi. Sementara poin c, menjelaskan mengenai unsur masif. Poin d, secara kualitatif menekankan dampak pelanggaran dan harus berpengaruh secara luas terhadap hasil pemilihan dan bukan hanya sebagian. Oleh karena itu, jika pelanggaran administrasi hanya didalilkan terjadi di sebagian wilayah, apalagi hanya di satu atau dua PPK saja per kecamatan, maka tidak seharusnya diklasifikasikan sebagai TSM karena tidak akan berpengaruh secara luas terhadap hasil pemilihan.

Lebih lanjut, terdapat penggunaan kata ... tanda baca titik, koma, dan frasa *dan* di antara ketiga poin di dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut. Hal ini berarti ketiga unsur TSM haruslah terpenuhi secara kumulatif. Selain harus memenuhi kriteria kualitatif yang dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut, secara kuantitatif Pasal 15 ayat (3) huruf b dari Peraturan Bawaslu tersebut menyatakan bahwa bukti terjadinya pelanggaran TSM harus menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling

sedikit 50% wilayah. Namun demikian, meskipun pelanggaran administrasi yang didalilkan terjadi secara kuantitatif di 50% wilayah, apabila di setiap kecamatan terjadi pelanggaran di satu kecamatan satu TPS saja, secara kualitatif tidak akan berdampak luas pada hasil pemilihan. Dalam hal ini, pelanggaran demikian tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran TSM karena tidak memenuhi kriteria kualitatif yang disebutkan di Pasal 4 ayat (2) dari Peraturan Bawaslu tersebut. Kemudian, beban pembuktian unsur kualitatif dan kuantitatif ini harus dibuktikan oleh Pemohon atau pihak yang dihadirkan sesuai asas actori incumbit onus probandi.

Yang ketiga, perselisihan hasil dan TSM di MK. Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa Termohon di dalam perselisihan sengketa hasil di MK adalah KPU dan bukan peserta pemilihan. Demi mewujudkan keadilan substantif, MK berwenang memeriksa Termohon atau KPU yang diduga telah melakukan pelanggaran TSM. Namun, perlu diingat bahwa kewenangan MK tersebut tidak seharusnya melenceng dari kewenangan absolut MK dalam hal ini, yakni sengketa hasil, bukan sengketa proses.

Oleh karena itu, dua hal harus terpenuhi secara kumulatif ketika MK melakukan pemeriksaan pokok perkara untuk mencari dugaan pelanggaran TSM. Yang pertama, pelanggaran yang harus diperiksa MK adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon atau KPU dan bukan Pihak Terkait, terlebih peserta pemilu. Jika pelanggaran dilakukan oleh peserta pemilu, maka Bawaslu-lah yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu. Yang kedua, pelanggaran TSM yang diperiksa oleh MK haruslah berakibat pada perubahan pada hasil pilkada. Pokok dari pelanggaran TSM yang diperiksa oleh MK adalah mengenai rekapitulasi atau perhitungan suara oleh Termohon atau KPU. Semisal indikasi perubahan penghitungan suara dengan adanya perbedaan penghitungan di TPS, kelurahan, dan kecamatan.

Dalam hal ini, jika pelanggaran TSM tidak terkait dengan hasil dan tidak dapat dibuktikan atau secara signifikan mengubah pemenang pilkada, maka tidak seharusnya diperiksa oleh MK. Tentu peserta pilkada sangat mungkin melakukan tindakan TSM, contohnya ketika masa kampanye, misalnya dengan politik uang dan/atau keterlibatan ASN yang menguntungkan salah satu peserta pilkada. Namun, politik uang dan ketidaknetralan ASN dalam hal ini bahkan dalam proses pilkada yang merupakan ranah dari Bawaslu. Hal ini disampaikan oleh MK di dalam perkara sengketa hasil pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di tahun 2018.

Dengan demikian, Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Jawa Timur tidak dapat digunakan sebagai yurisprudensi untuk meminta MK memeriksa dugaan pelanggaran proses secara TSM yang dilakukan oleh peserta pilkada. MK harus bisa melihat secara substantif kebenaran terjadinya pelanggaran peserta pilkada, tetapi MK tidak berwenang untuk

mengambil alih kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan kasus tersebut atau menjadi salah satu (ucapan tidak terdengar jelas) dari putusan Bawaslu akan hal tersebut. MK hanya dapat menggunakan keterangan Bawaslu dalam hal ini untuk memeriksa dan mengadili perkara selisih hasil pilkada dan bukan memeriksa dan mengadili perkara proses pilkada-nya. Hal ini juga sekaligus mengafirmasi posisi keputusan Bawaslu yang dikatakan Pasal 144 UU Pilkada bersifat final dan mengikat.

Terakhir keempat, pendiskualifikasian calon, PSU, serta penihilan hasil penghitungan. MK tidak memiliki kewenangan terkait diskualifikasi atau pembatalan calon. Hal ini telah dijelaskan oleh MK di dalam Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 dimana MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, lagipula perihal keabsahan hasil demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Demikian juga pembatalan calon kepala daerah pun bukan kewenangan Mahkamah. Hal ini disampaikan oleh MK di dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau di tahun 2016. Sedangkan Pasal 73 UU Pilkada Tahun 2016 mengatur bahwa diskualifikasi calon itu dilaksanakan oleh KPU, bukan MK. Meskipun MK berwenang memeriksa dan mengadili pembatasan ... pembatalan penetapan hasil perhitungan suara, bukan serta-merta Mahkamah dapat menihilkan penghitungan suara. Karena hal ini penegasian demokrasi dengan pengibirian suara rakyat yang tidak bersalah. MK memang pernah memutus penihilan perhitungan hasil pilkada, kasus sengketa pilkada Kabupaten Teluk Bintuni di tahun 2015 yang diputus di tahun 2016. Namun demikian, ada kondisi khusus yang dipertimbangkan oleh MK untuk pada akhirnya memutuskan untuk menihilkan penghitungan suara. Di dalam kasus sengketa pilkada Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2015, MK telah memutuskan untuk dilakukan PSU pada putusan tertanggal 25 Februari 2016. Namun setelah dilakukan PSU, tetap terdapat kecurangan dari kondisi di lapangan tidak kondusif membuat MK kemudian melakukan putusan kedua kalinya dalam perkara ini pada tanggal 7 April 2016 untuk menihilkan hasil penghitungan di beberapa TPS.

Kesimpulannya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Bawaslu dan MK memiliki dua kewenangan absolut yang berbeda. Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pilkada, sementara MK berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Pelanggaran administratif termasuk TSM, serta kecurangan pada proses pilkada (suara tidak terdengar jelas) serta politik uang merupakan domain Bawaslu terkait dengan sengketa antar peserta pemilihan dan (suara tidak terdengar jelas) hasil pilkada tentu MK bisa memeriksa Pemohon atau KPU yang diduga telah melakukan pelanggaran TSM, namun Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya didudukkan sebagai

lembaga banding atas keputusan Bawaslu demi menjaga kepastian hukum, mengingat kriteria keputusan Bawaslu yang final dan mengikat.

Oleh karena itu, ada 2 kondisi yang harus dipenuhi ketika MK memutus untuk menggali keadilan substantif dengan memeriksa dugaan TSM. Yang pertama, pelanggaran yang harus diperiksa oleh MK adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon atau KPU. Dan dua, pelanggaran TSM yang diperiksa oleh MK harus secara logis dan signifikan berakibat terhadap perubahan hasil pilkada.

Dua catatan lain terkait dengan rambu-rambu yang diberikan bagi MK dalam memeriksa dan memutus hasil pilkada adalah (suara tidak terdengar jelas), Mahkamah tidak berwenang untuk mendiskualifikasi calon. Dan kedua, MK tidak serta merta mengabulkan permohonan untuk menihilkan perhitungan suara, namun terlebih dahulu akan memerintahkan dilakukannya PSU. MK baru akan memerintahkan untuk menihilkan penghitungan suara jika PSU yang diperintahkan oleh MK tidak dapat berjalan dengan semestinya. Urgensi dari tidak serta-merta menihilkan penghitungan suara adalah untuk melindungi suara rakyat yang tidak bersalah dalam praktik demokrasi yang telah berjalan.

Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati.

785. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih waktunya pas 10 menit Bu Mahaarum. Dari Termohon mungkin ada yang mau didalami, silakan! Sori Pihak Terkait, Pihak Terkait.

786. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Pihak Terkait, Yang Mulia.

787. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

788. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Terima kasih, boleh Prof. Ini 2, Yang Mulia?

789. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

2 ya. Maksimal ya.

790. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya, oke. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli tadi Saudara sudah menjelaskan tentang syarat kualitatif dan kuantitatif, kuantitatif soal TSM. Yang mau saya tanyakan pertama Saudara Ahli. Bagaimana pendapat Ahli tentang sifat mengikat dan final putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kita ketahui di dunia ini hanya 1 MK yang punya upaya hukum. Selebihnya final dan mengikat. Apabila ada permohonan yang diajukan ke MK itu diwarnai dengan adanya pemalsuan misalnya pemalsuan tanda tangan, pemalsuan identitas dikaitkan dengan putusan MK yang final dan mengikat bagaimana pendapat Ahli? Itu 1 (...)

791. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Langsung aja kedua (...)

792. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Yang kedua, yang kedua apabila ada 1 permohonan, ya. Yang dalil-dalilnya tidak menunjukkan secara jelas di mana tempat kejadiannya, siapa pelakunya, kapan kejadiannya? Menurut pendapat Ahli permohonan yang seperti ini bagaimana? Terima kasih.

793. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Terima kasih. Menjawab pertanyaan yang pertama final dan mengikat artinya tidak ada lembaga banding dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini berarti tidak ada peluang untuk melakukan koreksi dari putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Hal berbeda diterapkan di pengadilan negeri, di mana putusan pengadilan negeri dapat dikoreksi oleh pengadilan tinggi dan tidak (suara tidak terdengar jelas) ya. Pentingnya keaslian dokumen di dalam persidangan adalah untuk memastikan (suara tidak terdengar jelas) tidaklah berdasar pada dokumen yang ditampilkan. Terlebih dengan tidak adanya lembaga banding yang memeriksa kembali Putusan MK, maka kepastian mengenai keabsahan dokumen di dalam persidangan menjadi sangat krusial demi menghindari kesalahan (suara tidak terdengar jelas) hukum yang tidak dapat dikoreksi. Nah, dokumen dalam persidangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentu merupakan dokumen yang tidak sah.

Oleh karena itu, sudah seharusnya tidak digunakan di dalam persidangan. Jika yang tidak sah adalah surat permohonannya, maka permohonan tersebut sudah seharusnya tidak dapat diterima oleh (suara tidak terdengar jelas) dan jika pun keabsahan dokumen tersebut baru diketahui pada saat pemeriksaan bukti, maka Hakim sudah seharusnya

mengabaikan dokumen yang tidak sah secara hukum (suara tidak terdengar jelas).

Untuk pertanyaan kedua mengenai dalil yang tidak jelas kan. Pada dasarnya Pemohon yang mendalilkan wajib membuktikan actori incumbit onus probandi. Oleh karena itu, dalil yang kuat adalah dalil yang dapat dibuktikan secara meyakinkan atau beyond reasonable doubt, ketidakakuratan tempat, waktu, maupun subjek (suara tidak terdengar jelas) hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal di dalam sistem hukum Indonesia masih dianut asas legalitas yang menekankan pada pentingnya lex certa atau kejelasan, lex scripta, tertulis, dan lex stricta tegas tanpa (suara tidak terdengar jelas). Dalam hal ini, ketika KPU yang menjadi Termohon di dalam perkara (suara tidak terdengar jelas), maka yang harus didalilkan dan dibuktikan adalah kapan dan di mana tepatnya KPU melakukan pelanggaran yang mengakibatkan sengketa perselisihan hasil tersebut. Ketika hukum telah mengatur secara tegas bahwa Termohon di dalam penyelesaian sengketa hasil (suara tidak terdengar jelas) itu, maka secara lex certa, lex scripta, dan lex stricta tidak boleh di dalilkan pelanggaran tersebut (suara tidak terdengar jelas) selain KPU.

Nah, kemudian kejelasan uraian dalil juga penting untuk memastikan Hakim dan pihak lainnya mencoba meyakinkan (suara tidak terdengar jelas) mempunyai kepastian mempunyai persepsi yang sama dan tidak salah paham dengan apa yang didalilkan. Demikian.

794. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih. Pada Pihak Pemohon silakan kalau ada pertanyaan.

795. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, ya, mohon maaf kami memang belum kenal betul dengan Saudara Ahli karena baru hari ini mungkin ketemu. Kalau pun di Mahkamah ini kami sudah sering bersidang barang kali tetapi pertanyaan kami yang pertama begini Saudara Ahli sebelum menjawab (...)

796. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pertanyaannya maksimal 2, ya, kesempatannya hanya sekali silakan.

797. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Saudara Ahli tadi begitu lugas menjelaskan tentang keterangan Saudara Ahli dan kemudian kami juga sudah membuktikan beberapa alat bukti kami karena kami juga sudah membuktikan beberapa alat nanti karena bukti kami ada 450 semua yang kami buktikan di Mahkamah. Dan kemudian, pertanyaan kami (...)

798. KETUA: ASWANTO

Bapak harus ralat itu, Saudara mengajukan alat bukti, bukan membuktikan.

799. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya, mengajukan alat bukti.

800. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Sorry, mohon maaf. Nah, pertanyaan kami yang pertama Saudara Saksi ... Saudara Ahli, maaf. Tadi kan kaitan tentang misalnya kita ada Bawaslu yang punya kewenangan yang sudah Saudara Ahli jelaskan tadi, tetapi karena batasan waktu dan keterbatasan yang lain, sehingga proses di Bawaslu itu tidak selesai, sehingga kemudian bahasa TSM yang kami katakan itu juga kami dalilkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kami minta pandangan Ahli berkaitan dengan itu satu.

Terus yang kedua. Bahwa kami ingin mendapat penjelasan dari Saudara Ahli karena kami membaca misalnya di bukunya Fritz Edward di situ disebut bahwa Per Bawaslu Nomor 8 Tahun 2008 ... eh ya 2018 itu ada dua jenis pelanggaran, nah tentu salah satunya ada di situ TSM. Nah, kami tidak mengulangi pertanyaan yang pertama tadi. Yang ingin kami tanyakan adalah sekaitan dengan Pasal 71 ayat (1) ... ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kenapa? Karena ini dilakukan oleh ... nah itu, orang yang kita sebut petahana. Karena tadi kan bahasanya, kalau yang independen melakukan itu tidak bisa dikelompokkan kalau tidak salah tadi yang Saudara Ahli sebutkan. Nah, bagaimana kaitannya (...)

801. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Individu, mohon maaf. Bukan independen. Individu atau perseorangan.

802. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya, individu ya. Ya, mohon maaf. Nah, bagaimana kaitannya kalau dilakukan oleh seorang petahana dan waktunya itu kalau di undang-undang pilkada kan larangannya 6 bulan sebelum penetapan. Nah, kalau itu terjadi pada peristiwa fase 6 bulan itu, nah bagaimana menurut pendapat Ahli? Silakan.

803. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Terima kasih, Pihak Pemohon. Untuk pertama mengenai keputusan yang sudah ada di Bawaslu, ya. Nah, secara hukum di Indonesia kita masih menganut kepastian hukum, sehingga tadi sebetulnya (suara tidak terdengar jelas) apa karena memang sudah sampai (suara tidak terdengar jelas) tidak diterima karena tidak ada bukti permulaan yang cukup, maka itu termasuk kategori sudah selesai, hanya mungkin selesainya tidak sesuai dengan (suara tidak terdengar jelas).

Jadi, saya tidak bisa menjawab (suara tidak terdengar jelas) karena saya tidak jelas (suara tidak terdengar jelas), apakah tidak diterima ataukah tidak dilaporkan?

Nah, mengenai batasan waktu untuk laporan di Bawaslu, itu memang untuk kepentingan kepastian hukum. Karena dalam hukum di Indonesia masih dianut, ya. Kalau kita tidak memiliki tenggat waktu yang jelas, ini pun dengan pilkada. Ada masa jabatan, sehingga harus ada waktu yang jelas, kapan suatu proses penyelesaian itu apa ... dijadwalkan.

Mengenai yang kedua, Pasal 71, hukum pilkada, mengenai (suara tidak terdengar jelas), tapi sebelum (suara tidak terdengar jelas) tadi perlu saya jelaskan dan pertanyaan dari Pemohon ya mengenai independen ... individu dari calon bupati, ya. Jadi ... atau bupati incumbent. Nah, yang tadi saya jelaskan, (suara tidak terdengar jelas) Pasal 4 ayat (2) dari Peraturan Bawaslu (suara tidak terdengar jelas) itu digarisbawahi unsur terstruktur itu dilakukan secara bersama-sama, jadi (suara tidak terdengar jelas) satu orang kalau dia adalah incumbent, mau dia apa, tapi dia hanya 1 orang, maka itu dia tidak terstruktur. Dan harap diingat bahwa Pasal 4 ayat (2) itu bersifat kualitatif, bukan kuantitatif karena unsur kuantitatifnya di Pasal 15 ayat (3).

Nah, kemudian mengenai mutasi, bisa terjadi itu mereka melakukan ... merupakan pelanggaran, tetapi pada saat proses dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah saya sebutkan tadi, itu merupakan domain dari Bawaslu dan walaupun itu nanti diminta diskualifikasi, maka yang berwenang untuk mendiskualifikasi adalah KPU, bukan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

804. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih. Termohon, ada? Silakan.

805. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, satu pertanyaan tapi sebelumnya saya sedikit menghantar. Yang pertama, sama-sama kita pahami bahwa Termohon dalam hal ini KPU Mandailing Natal dalam konteks pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati adalah sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang mencakup dalam proses pelaksanaan pemilukada itu sendiri sebagai regulator. Dalam konteks sebagai regulator terhadap seluruh norma aturan peraturan perundang-undangan yang ada, KPU Mandailing Natal tentu on the track kepada aturan hukum yang ada. Sekaitan dengan itu, di dalam norma-norma yang terkait apakah di dalam undang-undang maupun di PKPU, khususnya PKPU Nomor 8 Tahun 2018 disebutkan berkaitan dengan permintaan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang.

Saya ingin pendapat Ahli dikaitkan dengan hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 PKPU 8/2018, apa yang seharusnya menjadi pedoman yang kuat atau pedoman yang harus dipegang oleh Pemohon terkait dengan permintaan pemilihan suara ulang? Saya kaitkan sedikit bahwa Pemohon dalam konteks perkara ini meminta PSU 1.008 TPS, apakah dalam konteks rujukan Pasal 59 permintaan PSU, apakah permohonan untuk PSU 1.008 TPS itu harus dibuktikan keseluruhan apa yang dimaksud Pasal 59 itu? C.q. Pasal 67 untuk penghitungan suara ulang. Kira-kira demikian ... bagaimana pendapat Ahli tentang hal tersebut? Terima kasih.

806. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Terima kasih, Pihak Termohon. Betul, ketika memang tadi sudah jelaskan pentingnya *lex certa*, *lex scripta*, *lex stricta*, maka setiap dalil itu harus dibuktikan. Ketika memang diminta PSU di 1.008 TPS, maka harus dibuktikan satu per satu di TPS itu memang terjadi TSM. Nah, kenapa seperti itu? Pada dasarnya memang ketika permohonan untuk melakukan PSU di seluruh ... taruhnya seluruh Kabupaten Mandailing Natal di 1.000 sekian TPS itu tidak ada dalil yang membuktikan di masing-masing TPS itu terjadi kecurangan, maka itu menjadi tidak beralasan dan tidak memberi kepastian hukum karena dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan ini menjadi tidak jelas, gitu. Karena kita memang kemudian suara rakyat yang tidak dituduh salah tapi kemudian diminta untuk diulangi PSU-nya, maka itu sudah merupakan pengebirian demokrasi dan suara rakyat yang tidak bersalah.

Sehingga kalau memang yang dibuktikan, yang terbukti hanya ada kecurangan di 1 TPS, maka hanya 1 TPS itu saja yang harus dilakukan PSU, tetapi penting untuk mengingat bahwa PSU ini ... saya ... ada 2. Yang pertama penghitungan suara ulang dulu, yang kedua pemungutan suara ulang, baru kemudian penihilan. Nah, tidak bisa kita serta-merta meminta untuk penihilan, gitu ya, harus dari awal dulu dilihat dan itu tergantung dari pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh KPU. Misalnya, kalau terkait dengan penghitungan suara ulang, PSU (penghitungan suara ulang) maka dalilnya adalah penghitungannya yang salah. Misalnya ada penggelembungan suara di tingkat TPS berbeda dengan kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten misalnya. Kalau yang diminta adalah pemungutan suara ulang maka yang harus dibuktikan adalah misalnya DPT-nya salah atau apa. Jadi memang harus sangat spesifik yang diminta dalilnya dengan yang diajukan untuk terbukti atau apa ... digunakan untuk pembuktian karena jika tidak didalilkan bermasalah di TPS itu dan diminta untuk PSU langsung, gitu ya, itu berarti suara rakyat yang dikorbankan karena sudah diakui kalau tidak didalilkan, berarti tidak ada permasalahan di TPS tersebut. Terima kasih.

807. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Dari Meja Hakim ada yang mau ... silakan, Yang Mulia.

808. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih Pak Ketua dan Yang Mulia Pak Daniel.
Ahli Ibu Mahaarum, ya. Panggilannya Mahaarum atau Kusuma Pertiwi?

809. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Arum, Yang Mulia.

810. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Arum, ya. Sudah sering menjadi Ahli di persidangan?

811. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Bukan di Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

812. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baru ini?

813. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Baru pertama kali.

814. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya. Pengalaman pertama, ya. Jadi pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon tadi kan relevan, artinya kok saya belum kenal Ibu, gitu kan. Saya cross ke CV Ibu juga pendidikannya di Oslo, S2, S3-nya di Sydney, tapi kok belum ada pengalaman menjadi Ahli di persidangan-persidangan di badan peradilan. Makanya saya cross supaya siapa tahu ada cuma belum ... hanya tidak tercantum, tapi ternyata baru pertama. Oke.

Menarik, ya, keterangannya Ibu. Menarik dan cukup menjadi bahan diskusi yang panjang kalau ketemu Pak Zainal Mochtar nanti, Zainal Arifin karena hari ini sama-sama satu fakultas mengajar di sana tapi pandangannya cukup berjarak, ya, menurut saya.

Begini, Ibu. Kalau Ibu sebenarnya tepat tidak mengkomparasi antara kompetensi absolut kewenangan Bawaslu dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pure adalah badan peradilan? Satu itu. Karena apakah apple to apple kalau kemudian memperbandingkan itu diukur dari soal dari sisi kompetensi absolut dari kewenangan absolut tadi.

Kemudian, yang kedua, Ibu. Persoalan yang muncul kan, kenapa perselisihan hasil itu kemudian dipilih di lembaga peradilan? Yang dulu di Mahkamah Agung kemudian berkembang menjadi sekarang di Mahkamah Konstitusi secara de facto, memang apa ... secara apa ... secara garis besar bisa kemudian, argumen Ibu tadi bisa dibenarkan kalau MK itu hanya sengketa hasil, sementara sengketa proses di lembaga lain, termasuk di Bawaslu. Nah, pertanyaan saya tentunya di samping mau dijelaskan tentang komparasi kewenangan absolut tadi juga apakah bisa mengukur sebuah keadilan yang harus diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, yang semata-mata hasil tanpa mengaitkan dengan proses? Bisa dipisahkan? Apakah ada yang namanya hasil itu ujung-ujug ada tanpa melalui proses panjang, dengan catatan memang proses-proses itu ada yang belum tertangani oleh Bawaslu. Seperti yang dicontohkan tadi mengenai pencalonan, mungkin kalau sudah ada keputusan Bawaslu soal bakal calon, calon, mungkin Mahkamah Konstitusi bisa berargumentasi seperti yang Ibu refer tadi pendapat Mahkamah Konstitusi, tapi kalau kemudian ternyata ini perkara sudah berjalan di Mahkamah Konstitusi dan secara faktual, fakta-fakta itu baru ditemukan kemudian, apakah itu kemudian harus dikembalikan ke hulu, ini kewenangan Bawaslu, padahal proses itu sudah sedemikian panjang.

Nah, tentunya sebagaimana saya tidak mempertentangkan dengan pendapat Pak Zainal tadi, banyak hal yang memang belum tertangani oleh Bawaslu karena memang keterbatasan, kemudian soal

independensi, saya tidak pada wilayah itu. Tapi yang jelas keterbatasan kemampuan dan sedemikian kompleks persoalan-persoalan yang muncul itu. Nah, pertanyaan saya tentunya, apakah kemudian Ibu juga memandang hal itu adalah sesuatu yang bisa kemudian serta merta menjadi sebuah keadilan, ketika Mahkamah Konstitusi hanya mengambil di hulu saja, di hilir saja, apa ... mempertimbangkan hasil tanpa kemudian mengaitkan dengan proses-proses yang terjadi yang memang belum tertangani dan memang secara faktual, saya tidak mengatakan hari ini kasusnya ada persoalan-persoalan proses, secara faktual memang dalam proses-proses itu terjadi permasalahan?

Itu dua pertanyaan tadi, mohon dijawab dulu nanti kalau anu, mungkin saya akan tambahkan lagi, Ibu, supaya kita mendapat apa ... pandangan yang inline antara ... tapi enggak mungkin ya karena antara Ibu dengan Pak Zainal juga tadi cukup berjarak, menurut saya pandangan-pandangan ... pandangan, tapi enggak tahu kalau besok kemudian pandangannya sama, kan tidak tahu. Terima kasih, Ibu.

815. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, pertanyaan yang pertama, memiliki kewenangan absolut, di dalam pembahasan saya sedikitnya didasarkan bukan pada isi-isinya, tetapi pada delegasi kewenangan yang diberikan dari peraturan. Jadi di situ memang kewenangan yang dituliskan untuk Bawaslu adalah sengketa proses, kemudian MK adalah sengketa hasil. Saya sepakat sekali dengan Yang Mulia bahwa memang ada perbedaan ini yang satu adalah lembaga peradilan, yang satu bukan, bagaimana kalau yang bukan lembaga peradilan? Sebetulnya, keputusan Bawaslu, keputusan Bawaslu merupakan beschikking, sehingga ketika ada apa ya tidak sepakat, misalnya begitu, Bawaslu pun masih ada ... ruang untuk melaksanakannya, dan ini sebetulnya sudah disebutkan di Mahkamah Konstitusi yang saya gambarkan di makalah saya, jadi bukan berarti kemudian keputusan Bawaslu (suara tidak terdengar jelas) dan mengikat seperti itu, kemudian tidak ada peluang lainnya, ada, tetapi bukan di Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi bukan lembaga peradilan. Apakah kemudian berakibat mempengaruhi keputusan Bawaslu? Bukan juga. (Suara tidak terdengar jelas) berfungsi juga karena memang keputusan Bawaslu itu kita pastikan sebagai beschikking yang merupakan objek (Suara tidak terdengar jelas).

Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ini sebetulnya tadi sudah saya coba untuk jelaskan, jadi bukan berarti MK tidak bisa memeriksa TSM, bisa, Yang Mulia, tetapi ada dua kondisi yang harus terpenuhi, yang pertama ... TSM dalam prosesnya bisa menyelesaikan, tetapi ada dua kondisi yang di apa ... di ... di ... ada di situ, yang pertama adalah pelaku atau orang yang dituduh adalah KPU atau Termohon, bukan Pihak Terkait karena memang Termohonnya di sini adalah di sengketa

hasil sengketa di MK adalah KPU, bukan Pihak Terkait, dan yang kedua, pelanggaran TSM yang diperiksa oleh MK, itu harus secara langsung dan signifikan berakibat pada perubahan hasil pilkada.

Mohon izin, Yang Mulia, jika saya boleh share screen, saya ingin menunjukkan contoh.

816. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, Ibu, silakan.

817. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Ini (suara tidak terdengar jelas) participant, Yang Mulia, baiklah mungkin tidak perlu. Tapi sebetulnya saya mencoba membuat case tadi ketika terjadi di 1 kecamatan ada 10 ... 10 TPS atau desa, ya, di mana 9 TPS dimenangkan oleh Paslon 1 misalnya. Kemudian hanya 1 TPS tapi secara signifikan digunakan oleh Paslon 2. Misalnya Paslon 1 hanya mendapat 1 suara kemudian Paslon 2 dapat 100 suara.

Nah, pada model yang saya buat itu sebetulnya kecil perhitungan suara di 1 kecamatan tersebut tidak ... tetap digunakan oleh Paslon 1 secara wajar. Kenapa? karena pada umumnya pembagian TPS itu memperhatikan persebaran jumlah pemilih, sehingga tidak akan ada selisih jumlah pemilih atau suara di 1 TPS yang dapat membalik kemenangan dari akumulasi 9 TPS lain. Terima kasih, Yang Mulia.

818. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. 1 pertanyaan tadi apakah kemudian bisa ... saya sebenarnya ingin yang lain tapi karena Ibu membawa ke contoh tadi, saya tertarik dengan contoh tadi. Jadi, apakah kemudian kalau sudah serta merta bahwa dalam 1 kecamatan itu sudah dimenangkan oleh Pemohon misalnya, apa kemudian sudah tidak relevansi lagi mempersoalkan bahwa sesungguhnya kemenangan itu sudah tidak ada relevansinya atau dipersoalkan.

Nah, barangkali begini, Bu ... barangkali kalau itu kemudian dilakukan atau dilaksanakan seperti ... sebagaimana mestinya mungkin suara Pemohon lebih dari itu atau mungkin juga suara Pemohon 2 akan berubah menjadi lebih banyak. Nah, apakah kemudian hanya ... kemudian karena sudah secara formal bahwa Pemohon 1 ini menang kemudian menutup bahwa kesalahan-kesalahan itu kemudian tidak mungkin terjadi?

819. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Terima kasih, Yang Mulia. Ini mohon izin saya berhasil untuk share screennya, ya. Jadi, bisa dilihat di situ model yang saya buat. Ini misalnya kecurangan dilakukan di 1 TPS dalam 1 kecamatan. Ada 10 TPS, kemudian di TPS 1 itu ada saya modelkan di situ terjadi "TSM". Jadi, 1 suara saja di Paslon 1, kemudian 100 suara di Paslon 2, sementara yang lainnya itu proporsional. Benar gitu, ya, dan dimenangkan oleh Paslon 1.

Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semasif apapun di 1 TPS itu dikurangkan misalnya, kemudian Paslon 2 yang menang, itu tidak bisa mengubah hasil. Kenapa? Karena memang persebaran TPS itu pasti menghitung persebaran jumlah penduduk. Tidak pernah ada misalnya 1 TPS jumlah penduduknya 1.000 kemudian TPS yang lain (ucapan tidak terdengar jelas). Sehingga memang ketika itu hanya terjadi di 1 saja ... 1 TPS saja di dalam 1 kecamatan itu, bagi saya itu tidak memenuhi unsur kualitatif yang ada di Pasal 4 ayat (2) tadi.

Nah, mohon izin, Yang Mulia, saya akan melanjutkan pembahasan tentang ini, kualitatif dan kuantitatif.

820. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

821. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Jadi, meskipun di dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d poin 2 Peraturan Bawaslu IX tahun 2020 itu hanya disebutkan 50% di kecamatan gitu, ya. Dan tidak ada syarat atau penjelasan mengenai presentasi terjadinya pelanggaran di level desa atau TPS, bagi saya secara kuantitatif seharusnya aturan (suara tidak terdengar jelas) persebaran ini berlaku secara mutatis mutandis di level desa atau TPS. Jadi karena seperti dijelaskan (suara tidak terdengar jelas) dilihat dari kualitatif dan kualitatif secara akumulatif Pasal 4 ayat (2) plus Pasal 15 ayat (3), gitu. Sehingga meskipun pelanggaran administrasi yang didalilkan secara kuantitatif di 50% kecamatan (suara tidak terdengar jelas) kecamatan ini didalilkan 1 TPS saja, itu secara kualitatif tidak berdampak secara luas terhadap kasus pemilih kecurangan di TPS itu. Artinya, kan hasilnya pemenang itu, kan dilihat dari satu kabupaten.

822. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Kami sudah bisa (...)

823. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Sehingga pelanggaran demikian tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran TSM. Terima kasih, Yang Mulia.

824. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bu ... Bu Harum menangkap apa yang dijelaskan. Baik, nanti kami akan apa ... pertimbangkan pendapat Ibu. Mungkin, kan ini waktunya juga sudah ... saya kembalikan ke (...)

825. KETUA: ASWANTO

Yang Mulia Pak Daniel.

826. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Ibu Haarum, terima kasih untuk keterangan pada persidangan saat ini sudah meninggalkan ruang meeting ini, ya melalui Zoom. Kita akan lanjutkan dengan Saksi.

827. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Terima kasih, Yang Mulia.

828. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh. Bu ... Bu, sabar Bu. Masih mau didalami oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel. Silakan.

829. KETUA: ASWANTO

Ini ke ... Ibu Haarum. Ibu?

830. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Baik, Yang Mulia.

831. KETUA: ASWANTO

Ini Ibu Harum ... ini menarik sekali apa yang Ibu sampaikan, ya. Saya ingin meminta pandangan Ahli kalau kita berbicara mengenai pemilu terutama dalam perspektif electoral justice. Sebenarnya dalam konteks electoral justice itu tidak hanya bertumpu pada hasil akhir tetapi hasil akhir itu ada komponen yang harus betul-betul menyanggah. Salah

satu komponen yang harus menyanggah adalah proses. Sehingga untuk sampai kepada betul-betul pemilu yang memberi keadilan itu kita tidak boleh mengabaikan proses.

832. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Betul.

833. KETUA: ASWANTO

Nah, itulah sebabnya di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 112. Kalau Ibu lihat di dalam Pasal 112 huruf d dan e. Di huruf d itu ditegaskan bahwa kalau ada seseorang pemilih lebih dari 1 pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali konsekuensinya adalah harus dilakukan pemungutan suara ulang. Menurut saya ini salah satu penjabaran bahwa proses itu sangat penting, terlepas ... dulu memang di pasal itu ada norma lagi ada melihat signifikansi tetapi kalau kita baca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 112 itu tidak ada lagi kata signifikansi di situ. Lebih dari satu yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang sama atau TPS yang berbeda, konsekuensinya adalah harus dilakukan pemungutan suara ulang. Termasuk juga dalam soal penghitungan suara ulang, panitia PP ... panitia atau KPPS saja petugas di TPS ketika melakukan penghitungan dengan suara yang kurang jelas itu berkonsekuensi penghitungan suara ulang, menggunakan alat penerangan yang kurang terang kalau itu malam itu semua berkonsekuensi melakukan pengulangan.

Nah, menurut saya ini adalah jabaran bahwa proses itu sangat penting. Nah, terkait dengan yang ditanyakan oleh Yang Mulia Suhartoyo tadi kalau ternyata ada ... ada hal yang tercecer pada proses padahal yang tercecer pada prote ... proses sementara hasil akhir sudah ditetapkan oleh KPU. Menurut Ibu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membiarkan proses itu tercecer atau kita harus melakukan apa? Nah untuk memberi apa ... memberi perbandingan kalau tadi seniornya, Ibu barangkali ya? Pak Zaenal lebih senior, ya?

834. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Betul, Yang Mulia.

835. KETUA: ASWANTO

Senior dosen ya di Gadjah Mada, ya? Saya juga mestinya senior Ibu karena saya lebih duluan selesai di Gadjah Mada dari Ibu. Nah, menurut Pak Zaenal tadi kalau ada yang tercecer, MK harus masuk,

kenapa? Karena MK adalah penjaga demokrasi, penjaga hak asasi manusia. Nah, mohon pandangan Ibu Arum ini sekaligus perkenalan sama Ibu Arum ini. Silakan Bu Arum!

836. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sangat bangga sekali banyak personil dan alumni dari universitas saya. Jadi, mohon maaf, sebelum menjawab, saya perkenalan dulu, Yang Mulia. Jadi memang saya baru sekali ini mengikuti karena saya baru selesai juga menyelesaikan S3, jadi saya junior sekali, Yang Mulia. Saya lahir tahun 1988 baru 32 tahun, tapi saya sudah menjadi dosen di Fakultas Hukum UGM dari 2011, dan di Departemen Hukum Tata Negara sejak tahun 2013. Jadi (suara audio tidak terdengar jelas Pak Zaenal (suara audio tidak terdengar jelas).

Mengenai tadi pertanyaannya, saya sepakat sekali, Yang Mulia. Bahwa memang ketika ada proses yang tercecer kita tidak boleh kemudian (suara audio tidak terdengar jelas) harus ada langkah lebih lanjutnya. Tetapi langkah lebih lanjutnya itu bukan sekedar (suara audio tidak terdengar jelas) ketika itu keputusan KPU, keputusan itu mohon maaf kalau dari sisi apa ... regulasinya atau legal grafiknya, bukan regeling-nya, tapi kita sebut basic-nya keputusan itu sebetulnya sudah ada ranahnya kalau kita ingin menggugat itu, yaitu ke PTUN dan PTUN itu pun nanti berjenjang sampai ke Mahkamah Agung jadi memang prospek ketika sudah selesai ada putusan atau KPU atau pun Bawaslu itu masih bisa dipermasalahkan (suara audio tidak terdengar jelas) menurut saya, Jadi memang ketika tadi disampaikan MK adalah penjaga demokrasi dan konstitusi saya menangkap tapi perlu diperhatikan juga bahwa MK bukan satu-satunya yang menjaga demokrasi dan konstitusi karena lembaga negara semua di Indonesia itu fungsinya untuk mengawal demokrasi dan juga konstitusi Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

837. KETUA: ASWANTO

Oke, Ibu Arum. Terima kasih, Ibu. Saksi bisa maju? Ibu Arum sudah bisa meninggalkan ... apa namanya ... tempat atau sudah bisa keluar dari online.

838. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHAARUM KUSUMA PERTIWI

Terima kasih, Yang Mulia.

839. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, ya.

840. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kita sumpah saksi dulu, ya. Tolong IT bisa tayangkan Saksi untuk diambil sumpahnya. Mudah-mudahan jaringan tidak bermasalah lagi. Oke, saksinya sudah siap, ya. Yang pertama dari yang beragama Islam, Ibu Indah bisa duduk dulu. Yang Mulia Pak Suhartoyo!

841. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Agak geser sedikit, Pak! Geser sedikit! Atau terus geser, Pak ... geser lagi supaya rohaniwannya bisa mendapat tempat yang ... baik, cukup! Rohaniwannya menghadap ke Saksi, Pak di samping ... di samping. Diangkat Alqurannya di atas kepala boleh ... di atas Saksi, ah, sudah supaya sinar Alquran itu bisa ke Saksi yang satunya. Jadi, tidak tertutup oleh Saksi yang paling dekat dengan ... itu mungkin esensi, ya, Pak, saya cuma ngira-ngira ini. Saya kiranya ruhnya benar, ya ... message-nya benar, ya, apa yang saya sampaikan. Nanti takut disalahkan pak ustaz saya kan, tapi Majelis punya pandangan seperti itu, sehingga Alqurannya tinggi supaya juga bisa menjangkau Saksi yang satunya.

Ikuti, ya, Pak, ya?

842. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT:

Ya.

843. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, baik.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

844. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

845. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih.

846. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia, kita lanjutkan dengan Saksi Indah, ya? Ya, agak geser sedikit! Silakan tangannya Bu Indah di Alkitab, agama Kristen apa Katolik?

847. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Kristen, Yang Mulia.

848. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, jarinya 2, ya. Oke, tolong ikuti saya!

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

849. SAKSI BERAGAMA KRISTEN DISUMPAH

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

850. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih.

Dari Pihak Terkait, apa yang mau diminta kesaksian ini?

851. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Anjur ini adalah kepala Seksi Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal. Ada surat tugasnya lengkap, kami sudah lampirkan, menjelaskan tentang proses penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020 di Kabupaten Mandailing Natal, Yang Mulia.

852. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, kemudian yang kedua?

853. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Yang kedua. Pak Darwis Nasution, Beliau ini adalah Ketua APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) Kecamatan Muara Sipongi akan menjelaskan tentang tidak benar ada perintah camat kepada kepala

desa se-Kecamatan Muara Sipongi untuk membantu dana Rp3.500.000,00, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

854. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Yang ketiga?

855. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Yang ketiga, Saudara Indah Juniarti. Saksi ini adalah saksi Pasangan Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Beliau ini akan menerangkan bahwa tidak benar ada pencoblosan kertas suara sebanyak 400 suara yang dilakukan PPS Rico Barheng pada Pukul 10.00 WIB pada saat TPS sepi karena pada saat itulah TPS ramai didatangi oleh warga. Seperti itu, Yang Mulia.

856. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, baik. Terima kasih.

Yang pertama dulu, Pak Anjur Brutu. Ini saya mau konfirmasi, desanya ini Desa Kabupaten Mandailing Natal atau Desa Salam Bue? Halo Pak Anjur Brutu?

857. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ya, Yang Mulia. Mohon diulangi, Yang Mulia.

858. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Gimana?

859. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Mohon diulangi, Yang Mulia.

860. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bapak, kepala seksi administrasi itu di Desa Kabupaten? Itu namanya Desa Kabupaten?

861. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Baik, Yang Mulia.

862. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan, saya konfirmasi dulu (...)

863. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Saya sebagai kepala seksi(...)

864. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nama desanya apa?

865. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal, Yang Mulia.

866. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nama desanya, desa apa?

867. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Sedangkan Salam Bue itu alamat saya, Yang Mulia.

868. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan, Pak Anjur? Itu nama desanya, desa apa, Pak?

869. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Desa Salam Bue itu alamat saya, Pak ... Yang Mulia.

870. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Suaranya agak.

871. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Alamat tempat tinggal, Yang Mulia.

872. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, Bapak tempat tinggalnya itu di Desa Salam Bue, ya? Tapi pekerjaan Bapak itu di desa mana, Pak? Sama, Desa Salam Bue juga?

873. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Dinas PMD, Yang Mulia.

874. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Di desa mana?

875. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Dinas PMD, Yang Mulia, Kabupaten Mandailing Natal, di pemdanya, Yang Mulia.

876. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, di pemda. Soalnya di sini pekerjaannya kepala seksi administrasi desa.

877. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ya, Yang Mulia.

878. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

879. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Dan desa.

880. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, jadi bukan di desanya, ya?

881. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Bukan, Yang Mulia.

882. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Nah, Saudara akan menjelaskan terkait dengan proses penyaluran BLT, dana desa, di kabupaten. Ini di 1 kabupaten atau di desa ... 1 desa saja?

883. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Di seluruh kab ... di seluruh desa di Kabupaten Mandailing Natal, Yang Mulia.

884. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, ini apakah berkaitan dengan tugas Bapak sebagai kepala seksi yang menyalurkan BLT dana desa itu atau bukan?

885. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Maaf, Yang Mulia, kalau terkait masalah penyaluran BLT dana desa ada hubungannya dengan penyaluran dana desa sesuai dengan tahapannya terlebih dahulu, Yang Mulia.

886. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, silakan.

887. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Baik, Yang Mulia. Pertama, Yang Mulia, dalam hal penyaluran BLT dana desa masing-masing desa di Kabupaten Mandailing Natal adalah berdasarkan uang yang masuk ke rekening desa masing-masing terlebih dahulu, Yang Mulia. Proses dari penyaluran uang yang masuk ke rekening desa, Yang Mulia, adalah berdasarkan ke permohonan dari masing-masing desa, itu tiap tahapannya, Yang Mulia.

Jadi dalam hal penyaluran ini dari desa, maka melalui Dinas PMD, kami akan mengajukan permohonan ke Dinas PPKAD Mandailing Natal dan diteruskan ke KPPS Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Yang Mulia, sehingga setelah lengkap administrasi ataupun dokumen persyaratan yang dibutuhkan oleh KPPS Padang Sidempuan, maka pada KPPS menyalurkan ke rekening masing-masing, Yang Mulia.

888. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Pak Anjur, apakah tahu proses pencairan itu dalam setahun berapa kali biasanya?

889. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Dalam pencairan dana desa, Yang Mulia, untuk tahun 2020 ada 3 tahap, Yang Mulia.

890. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3 tahap? Tahap pertama itu kapan, Pak?

891. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Kalau tahap pertama, Yang Mulia, dicairkan ataupun ditransfer oleh KPPS Padang Sidempuan sekitar 3 kali, Yang Mulia.

892. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, 3 kali. Tahap yang pertama, kapan?

893. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Jadi ketika itu tidak sekali transfer.

894. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Transfer yang pertama itu kapan, Pak?

895. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Di bulan April, Yang Mulia.

896. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

April. Kemudian yang kedua bulan apa?

897. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Itu tidak serentak, Yang Mulia.

898. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya ... ya, oke. Kan Pak Anjur mengatakan ada 3 kali pencairan.

899. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ya.

900. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang pertama kan bulan April, yang kedua bulan apa?

901. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Begini, Yang Mulia, masing-masing desa tidak serentak ataupun tidak bersamaan dengan desa 370 ... dari 377 desa, Yang Mulia.

902. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada 377 desa dan itu (...)

903. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ya.

904. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dan itu pencairannya tidak bersamaan?

905. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Tidak bersamaan, Yang Mulia.

906. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Apa yang (...)

907. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Sesuai dengan ... sesuai dengan permintaan ataupun fisik berkas usulan masing-masing desa, Yang Mulia.

908. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, jadi sesuai dengan permintaan dari masing-masing desa?

909. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ya, Yang Mulia.

910. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, apakah Pak Anjur tahu bahwa ada yang tahapannya sampai 5 kali?

911. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ada, Yang Mulia.

912. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada, ya?

913. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ada yang 7 kali, Yang Mulia.

914. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Misalnya di desa mana, Pak? Yang ada pencairannya sampai 5 kali misalnya.

915. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Secara umum, Yang Mulia, kalau 5 kali dia ber ... berdasarkan PMK yang terdahulu yaitu PMK 205 apabila sudah memenuhi persyaratan, maka disalurkan pertama kali sekaligus 40%, Yang Mulia, namun ketika ada perubahan terhadap penyaluran dana desa yang ada hubungannya dengan Covid, Yang Mulia, untuk PMK 40 dan 50 terbit perubahannya, Yang Mulia, sehingga di dalam PMK 40, maka penyaluran dana desa disalurkan sebanyak 3 kali di tahap pertama, dan 3 kali di tahap kedua, dan 1 kali di tahap ketiga, Yang Mulia.

916. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berarti bisa sampai 7 tahap, ya? 7 kali, ya?

917. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ya, Yang Mulia.

918. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya. Nah, apakah pada bulan Desember itu ada pencairan BLT dana desa?

919. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ada, Yang Mulia.

920. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada?

921. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ya, Yang Mulia.

922. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu, berapa desa yang menerima pada bulan Desember itu?

923. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Kalau di bulan Desember, Yang Mulia, seluruhnya disalurkan di ke 377 desa sebanyak 200 sekian, Yang Mulia.

924. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu dari 377 desa, pada bulan Desember itu berapa desa yang menerima?

925. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Yang menerima atau yang menyalurkan, Yang Mulia?

926. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, maksudnya kan itu pencairannya.

927. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Kalau pencairan dana desa, Yang Mulia, untuk bulan Desember sebanyak 340-an, Yang Mulia.

928. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

340-an, ya?

929. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ya.

930. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Punya data?

931. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Karena di bulan November, Yang Mulia, ada dua kali penyaluran dana desa.

932. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pada bulan Desember itu?

933. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ya, di bulan November, Yang Mulia.

934. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu tanggalnya Bapak punya data tanggal berapa pencairan BLT dana desa?

935. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Kalau di BLT dana desa, Yang Mulia, ada sebanyak 4 kategori, Yang Mulia.

936. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

4 kategori. Kategori pertama apa?

937. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Itu penyaluran BLT, yaitu kategori pertama, tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Desember ada sebanyak 67 desa yang menyalurkan BLT dana desa, Yang Mulia, berdasarkan data yang kami terima.

938. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. 1-6 Desember ada 67 desa. Terus?

939. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ya. Yang kategori kedua, tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 ada sebanyak 157 desa, Yang Mulia. Untuk kategori ketiga, di tanggal 9 ada 4 desa. Dan kategori keempat, di atas tanggal 9 sampai dengan 31 Desember ada sebanyak 149 desa yang menyalurkan BLT dana desa, Yang Mulia.

940. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Jadi, di bulan Desember ada 4 tahapan pencairan BLT dana desa. Yang pertama itu 1 sampai 6 Desember sebanyak 67 desa. Kemudian, 7 dan 8 Desember itu 157 desa. Tanggal 9 itu 4 desa. Tanggal 10 sampai 31 Desember itu sebanyak 149 (...)

941. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

149, Yang Mulia.

942. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

149 desa. Nah, apakah pencairan dana desa ini Bapak tahu dipotong pada setiap desa ataukah diterima utuh?

943. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Baik, Yang Mulia. Dalam hal pencairan dana desa, maka langsung ditransfer oleh KPPN Padang Sidempuan setelah memenuhi persyaratan, Yang Mulia, ke rekening desa masing-masing. Sehingga tidak ada pemotongan dalam hal penyaluran ataupun pencairan dana desa.

944. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, ditransfer?

945. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ya, Yang Mulia.

946. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kepada rekening desa masing-masing (...)

947. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Kepada rekening desa.

948. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Rekening desa masing-masing, ya?

949. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ya, Yang Mulia.

950. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bapak ... apakah Bapak Anjur tahu bahwa pada tanggal 8 itu pencairan antara tanggal 7 dan 8 itu ada BLT dana desa yang dipotong untuk kepentingan pasangan calon tertentu?

951. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Kalau pemotongan BLT tidak ada, Yang Mulia.

952. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak ada atau tidak tahu?

953. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Sepengetahuan kami, Yang Mulia, untuk penyerahan BLT itu langsung di ... disalurkan oleh kepala desa langsung kepada KPN masing-masing, Yang Mulia.

954. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, artinya (...)

955. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Jadi, kalau ada pemotongan kami tidak ... saya tidak tahu, Yang Mulia.

956. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, berarti Bapak tidak tahu karena tadi ada kesaksian yang menyatakan itu dipotong, ya. Berarti Bapak tidak tahu. Karena tadi dijelaskan terkait pencairan tanggal 7 dan 8 itu. Nah, setelah itu masuk di rekening desa, lalu itu langsung digunakan oleh masing-masing desa, ya?

957. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ya, Yang Mulia.

958. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Apa lagi yang Bapak mau jelaskan? Saya kira ini sudah terjawab ini, ya. Apa lagi? Ada yang mau ditambahkan?

959. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Dari proses tadi, Yang Mulia, jadi sebelum dilakukan penyaluran dana desa ini, maka khusus untuk tahap 3 penyaluran dana desa, maka ada kendala sebelumnya, Yang Mulia, ada keterlambatan dalam hal penyaluran dana desa. Dan ... sehingga ada hubungannya dengan penyauran BLT yang diberikan oleh ... kepada ... oleh kepala desa kepada masing-masing KPN, Yang Mulia. Nah (...)

960. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu keterlambatannya karena apa, Pak?

961. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Kendala ini atau pun keterlambatan ini akibat dari adanya (suara tidak terdengar jelas) terhadap penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing, Yang Mulia. Namun, dapat kami sampaikan juga ada fakta yang disampaikan, Yang Mulia, terkait keterlambatan ini melalui surat edaran Bupati Mandailing Natal pada saat itu adalah karena tugas bupati, Yang Mulia, mengeluarkan surat edaran untuk percepatan penggunaan dana desa ataupun percepatan terhadap penyusunan APBD dan ... dan BLT dana desa. Di samping itu, Yang Mulia, ada surat dari Kementerian Keuangan melalui KPPN Padang Sidempuan bahwa penyaluran dana desa seluruh desa Kabupaten Mandailing Natal ditetapkan paling lama 14 Desember, Yang Mulia. Sehingga melalui surat Bupati Mandailing Natal dan pada saat itu juga Plt Bupati Mandailing Natal tertanggal, tertanggal 13 November,

Yang Mulia, mengeluarkan surat untuk pengisian itu paling lambat tanggal 4 Desember, Yang Mulia. Karena kenapa, Yang Mulia? Karena apabila hak keterlambatan di beberapa desa ini, maka dana desa yang belum menguntungkan tidak akan disalurkan, Yang Mulia. Begitu Yang Mulia.

962. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih. Itu dikeluarkan dasarnya surat edaran, ya? Dari Plt?

963. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ya, Yang Mulia.

964. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Plt bupati, ya? Oke saya kira dari Pak Anjur Brutu kesaksiannya cukup, ya. Sekarang yang kedua Bapak Darwis Nasution.

965. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Yang Mulia.

966. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Pak Darwis, Pak Darwis sebagai Ketua Apdesi.

967. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Sekaligus kepala desa, Yang Mulia.

968. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ketua Apdesi di mana, di?

969. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Di Kecamatan Muara Sipongi, Yang Mulia.

970. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Di Kecamatan, ya?

971. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Yang Mulia.

972. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, pekerjaan Bapak, apa?

973. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Kepala desa, Yang Mulia.

974. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, Bapak Kepala desa sekaligus Kepala Apdesi (...)

975. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Yang Mulia (...)

976. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Untuk tingkat Kecamatan Muara Sipongi?

977. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Yang Mulia.

978. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Sudah sejak kapan Bapak jadi Ketua Apdesi?

979. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Sudah 4 tahun, Yang Mulia.

980. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah 4 tahun, ya? Itu ada SK-nya Pak, ya?

981. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ada, Yang Mulia.

982. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

SK. Siapa yang mengeluarkan SK-nya?

983. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ketua Abdesi Kabupaten Mandailing Natal, Yang Mulia.

984. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ketua Abdesi. Kabupaten, ya?

985. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Yang Mulia.

986. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Jadi periode ini dari kapan sampai kapan, Pak?

987. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Periodenya dari tahun 2017 sampai tahun 2022, Yang Mulia.

988. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

5 tahun, ya?

989. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Yang Mulia.

990. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke berarti sekarang Bapak masih jadi Ketua Apdesi untuk tingkat Kecamatan Muara Sipongi.

991. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Yang Mulia.

992. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Nah, Bapak diminta akan memberikan kesaksian terkait dengan tidak benar ada perintah camat kepada kepala desa se Kecamatan Muara Sipongi (...)

993. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Yang Mulia.

994. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ceritakan.

995. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, baik, Yang Mulia. Bahwasannya, Yang Mulia, Bapak Camat Kecamatan Muara Sipongi, Yang Mulia, Bapak Aswan, S.Sos., tidak pernah, Yang Mulia, memerintahkan kepada kepala desa se Kecamatan Muara Sipongi untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal. Baik itu, Yang Mulia, Pasangan Nomor Urut 1, baik Pasangan Nomor Urut 2, dan baik Pasangan Nomor Urut 3, tidak pernah diperintahkan ataupun memerintahkan kepada kepala desa untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal, Yang Mulia.

996. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, kepala camat, ya? Camat tidak memerintahkan, ya?

997. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Yang Mulia.

998. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kepada kepala desa. Itu Bapak tahu tidak kalau perintah itu bisa tertulis bisa lisan?

999. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Memang tidak ada perintah, Yang Mulia, dari pak camat, Yang Mulia.

1000.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak ada ya?

1001.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Tidak ada, Yang Mulia.

1002.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kalau Bapak Darwis ini tinggal di desa mana?

1003.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Limau Manis, Yang Mulia.

1004.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Limau Manis, ya?

1005.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya.

1006.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kok. Nah, di kecamatan Bapak tuh ada berapa desa?

1007.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

15 desa, Yang Mulia.

1008.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada 15 desa.

1009.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Yang Mulia.

1010.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, Bapak di Desa Limau Manis?

1011.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Yang Mulia.

1012.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Bapak kenal semua kepala desa yang ada di kecamatan Muara Sipongi?

1013.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Saya kenal Mulia ... Yang Mulia, semuanya, Yang Mulia.

1014.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kenal semua, ya?

1015.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya.

1016.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, menurut Bapak tidak ada perintah, kemudian soal pembagian dana Rp3.500.000,00 itu Bapak tidak tahu, ya?

1017.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Tidak ada itu kami, tidak ada memberikan kepada Bapak Camat Asman perdana sosial Yang Mulia.

1018.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya itu di desa Bapak mungkin tidak, tapi kan di desa lainkan belum tentu.

1019.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Sekaligus kecamatan Muara Sipongi, Yang Mulia.

1020.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, betul. Artinya kan Bapak Ketua Apdesi (...)

1021.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Yang Mulia (...)

1022.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tapi dalam ... dalam praktik kan ada yang mengatakan itu dana desanya dipotong. Tadi kebetulan ada saksi yang sudah menyampaikan itu. Oke. Ada lagi, Pak Darwis, yang mau disampaikan?

1023.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Yang Mulia. Di sini juga ada pemberitahuan tentang BLT dana desa, Yang Mulia, pada saat penyaluran, Yang Mulia, kami para kepala desa Yang Mulia menyampaikan ada Saudara Pemo ... Saudara Pemohon menyatakan bawasanya kepala desa penyaluran dananya ... BLT desa supaya memenangkan Pasangan Nomor Urut 02, Yang Mulia. itu tidak benar, Yang Mulia. Kami tidak pernah menganjurkan ataupun menghimbau kepada masyarakat se-Kecamatan Muara Sipongi untuk memenangkan salah satu pasangan calon, Yang Mulia. Terutama Pasangan Calon Nomor Urut 02, Yang Mulia, Bapak H. Dahlan Hasan Nasution dengan Bapak Aswin Parinduri, Yang Mulia. Terbukti, Yang Mulia. Bahwasanya di Kecamatan Muara Sipongi sebagian banyak ... kebanyakan (...)

1024.KETUA: ASWANTO

Yang dijawab yang ditanya saja, enggak usah menjelaskan. Yang ditanya saja Bapak jawab secara singkat.

1025.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, Pak Darwis. Di Desa Limau Manis, itu siapa yang menang? Pasangan calon berapa yang menang?

1026.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Di Limau Manis Pasangan Nomor Urut 02, Yang Mulia.

1027.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pasangan Nomor Urut 02 yang menang. Oke. Apa Bapak tahu di desa ... dari 15 desa itu berapa desa yang dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 2?

1028.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Setahu saya hanya 3 desa, Yang Mulia.

1029.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Hanya 3 desa. Selain Desa Limau Manis, desa mana lagi?

1030.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Desa Bandar Panjang Tuo dengan Desa Koto Boru, Yang Mulia.

1031.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Hanya itu, ya?

1032.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Setahu saya itu saja, Yang Mulia.

1033.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Bapak kenal Pak Hizrah Perdana Nasution?

1034.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Saya kenal, Yang Mulia.

1035.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Beliau apa jabatannya?

1036.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Sebagai Kepala Desa di Desa Sibinail, Yang Mulia.

1037.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Di desa apa?

1038.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Sibinail, Yang Mulia.

1039.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Desa apa?

1040.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Sibinail, Yang Mulia.

1041.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sibinail. Itu bagian dari kecamatan Muara Sipingo ... Sipongi, ya?

1042.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Yang Mulia.

1043.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu satu kecamatan dengan Bapak?

1044.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Yang Mulia.

1045.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sama ya, satu kecamatan, ya?

1046.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Yang Mulia.

1047.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, di Desa Pak Hizrah itu dimenangkan pasangan calon mana?

1048.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Pasangan Nomor Urut 01, Yang Mulia.

1049.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pasangan Nomor Urut 01 ya, oke. Saya kira Pak Darwis, cukup.
Selanjutnya, Ibu Indah Juniarti.

Ibu Indah, apakah Ibu pada waktu pemilu menjadi saksi?

1050.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Ya, Yang Mulia.

1051.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Saksi untuk pasangan calon nomor berapa?

1052.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Nomor Urut 02, Yang Mulia.

1053.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nomor Urut 02. Ibu saksi di TPS mana?

1054.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

TPS 01, Yang Mulia.

1055.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Di TPS 01. Itu di TPS 01 itu Ibu masih simpan datanya, berapa yang ikut mencoblos di TPS 01?

1056.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Bagaimana, Yang Mulia?

1057.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Di TPS 01 yang Ibu jadi saksi itu, itu ... ini, dimenangkan oleh pasangan nomor berapa?

1058.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Nomor Urut 02.

1059.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

02, oke. Di TPS 01 ... di tempat Ibu itu ada berapa TPS, Bu, di sekitar situ?

1060.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Satu saja, Yang Mulia.

1061.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Satu saja, ya?

1062.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Ya.

1063.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kalau yang di Gedung serbaguna, Ibu tahu?

1064.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Tidak tahu, Yang Mulia.

1065.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak tahu. Ibu di TPS 01 itu di Kampung Baru juga?

1066.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Ya, Yang Mulia.

1067.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kampung Baru. Jadi di Kampung Baru itu ada berapa TPS, Ibu tidak tahu ya? Ibu hanya tahu 1 TPS?

1068.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Mohon maaf, Yang Mulia, kalau di Kampung Baru TPS-nya cuma ada 2, Yang Mulia.

1069.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, ada 2.

1070.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Tapi kalau di sekitaran TPS 01 cuma ... hanya ada 1 saja, Yang Mulia.

1071.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya. Yang kedua ada TPS 02, itu yang di gedung serbaguna, ya?

1072.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Tidak tahu, Yang Mulia.

1073.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, tidak tahu. Tapi Ibu tahu ada 2 TPS?

1074.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Ya, Yang Mulia.

1075.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Jadi di TPS itu dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 2?

1076.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Ya, Yang Mulia.

1077.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Ibu tahu hasilnya pada waktu hasil akhir?

1078.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Tahu, Yang Mulia.

1079.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pasangan Nomor Urut 01 (...)

1080.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Kalau di TPS 01.

1081.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pasangan Nomor Urut 01 berapa suaranya?

1082.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Pasangan Nomor Urut 1 saya tidak ingat lagi, Yang Mulia.

1083.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak ingat, ya. Tapi kalau Pasangan Nomor Urut 2, Ibu tahu jumlahnya?

1084.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Tahu, Yang Mulia.

1085.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tahu, ya. Kalau Pasangan Nomor Urut 03 tidak tahu?

1086.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Tidak tahu, Yang Mulia.

1087.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak tahu. Jadi tahu yang pasti bahwa di TPS 01 dimenangkan oleh Paslon Nomor Urut 02?

1088.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Ya.

1089.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Ada lagi yang Ibu mau memberikan kesaksian?

1090.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Baik, Yang Mulia. Saya ingin memberikan kesaksian bahwa di sini penggugat bilanganya kalau ada kecurangan di ... kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara di TPS di Kampung Baru, Yang Mulia. Itu tidak benar, Yang Mulia.

1091.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak benar, ya.

1092.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Tidak, Yang Mulia.

1093.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kalau di situ, ketua PPS-nya Ibu kenal?

1094.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Kenal, Yang Mulia.

1095.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kenal. Siapa namanya?

1096.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Rico Barhei Pardede, Yang Mulia.

1097.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Rico Barhei Pardede?

1098.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Ya, Yang Mulia.

1099.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Nah, di TPS 01 itu tidak ada pencoblosan kertas sebanyak 400 suara, ya?

1100.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Tidak, Yang Mulia.

1101.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak, ya. Oke. Tapi pada waktu itu Pak Rico Pardede sempat datang ke TPS 01?

1102.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Sempat, Yang Mulia.

1103.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jam berapa Pak Rico datang?

1104.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

TPS itu kan, Yang Mulia, bukanya dari mulai pukul 07.00 dan masyarakat datangnya dari mulai pukul 08.00, dan pas waktu pembukaan, Pak Rico sudah ada di TPS, Yang Mulia, tapi tidak sampai penutupan Pak Riconya.

1105.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, dari ... sampai jam berapa Pak Rico Pardede di TPS 01?

1106.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Sampai pembukaan kotak suara itu saja, Yang Mulia. Sehabis itu tidak ada lagi di TPS 01, Pak Riconya.

1107.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, jadi hanya sampai dengan pembukaan setelah itu sudah tidak ada lagi. Ibu tidak tahu beliau ke TPS yang lain misalnya?

1108.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Tidak tahu, Yang Mulia.

1109.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak tahu, ya. Nah, Pak Rico Pardede itu beliau dengan timnya atau sendiri pada waktu itu?

1110.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Dari yang saya lihat, dia sendiri doang, Yang Mulia.

1111.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak bersama dengan linmas?

1112.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Tidak, Yang Mulia.

1113.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak, ya. Kemudian kalau ketua KPPS di 01 siapa?

1114.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Mohon maaf, Yang Mulia. Saya tidak ingat.

1115.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak ingat, oke.

1116.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Ya, Yang Mulia.

1117.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, saya kira cukup. Dari Pihak Terkait mungkin ada pendalaman? Silakan.

1118.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia.

1119.KETUA: ASWANTO

Waktunya, ya, Pak, untuk dijadikan perhatian.

1120.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Saudara Anjur?

1121.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ya, Pak.

1122.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Saya satu pertanyaan saja. Pencairan dan penyaluran BLT dana desa itu, itu atas perintah siapa? Artinya apakah itu masih perintah dan

dalam pengawasan daripada Plt Bupati Bapak Dahler atau Bupati definitive Pak Dahlan?

1123.KETUA: ASWANTO

Dijawab singkat saja, Pak. Dijawab singkat plt atau pejabat bupati yang jadi calon?

1124.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Plt, Yang Mulia.

1125.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Plt, sudah dijawab, silakan.

1126.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Oke, cukup itu. Saudara Darwis.

1127.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Pak.

1128.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Saudara sebagai Ketua Apdesi, apakah setiap anjuran atau perintah, atau semacam perintah atau anjuran itu dari camat. Saudara sebagai Ketua Apdesi di Kecamatan Muara Sipongi, apakah memang selalu lewat Saudara atau lewat orang lain?

1129.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Lewat saya, Pak.

1130.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Lewat Saudara, ya?

1131.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya.

1132.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Lalu Saudara (...)

1133.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Untuk kepentingan kepala desa Kecamatan Muara Sipongi itu lewat saya, Pak.

1134.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Jadi tidak ada lewat orang lain, ya?

1135.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Pak.

1136.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya, Saudara Indah. Saudara Indah?

1137.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Ya, Pak.

1138.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Pada waktu Saudara melihat Rico Barhen Pardede datang ke TPS 01 di Kampung Baru, apakah dia pernah masuk ke arena pemilihan dan apakah dia pernah memegang atau menyentuh kertas suara?

1139.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tadi Ibu Indah jelaskan bahwa waktu dia datang, Pak Rico itu sudah ada.

1140.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya, saya mau mempertegas, Yang Mulia. Apakah pernah dia lihat Rico Barhen itu memegang surat suara atau tidak? Hanya itu, Yang Mulia.

1141.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, silakan.

1142.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya. Jadi saya ulangi Saudara Indah, apakah ketika Saudara ... mungkin saya koreksi dulu. Saudara ada di TPS itu sejak buka sampai tutup? Apa pernah Saudara meninggalkan tempat?

1143.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Saya tidak pernah meninggalkan tempat TPS-nya, Pak.

1144.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Selalu Saudara ada di situ, ya. Nah, selama Saudara ada di situ sampai penutupan ... sejak pembukaan sampai penutupan apakah Saudara pernah melihat Rico Barhen Pardede itu memegang surat suara?

1145.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Tidak, Pak.

1146.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Tidak, ya. Cukup, Yang Mulia.

1147.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Dari Pihak Pemohon, silakan.

1148.KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Terima kasih, Yang Mulia. Saya dulu ke Pak Anjur, Pak Anjur?

1149.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Ya, Pak.

1150.KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Tadi Pak Anjur sudah menjelaskan, pertanyaan saya begini. Kapan berakhir plt menjadi plt di Kabupaten Mandailing Natal, Pak Anjur? Tanggalnya.

1151.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Tanggal ... Plt Pak, ya?

1152.KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya.

1153.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Plt berakhir tanggal 5 Desember, Yang Mulia.

1154.KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Tanggal 5 Desember, ya, oke. Tadi Bapak akui ada pencairan tanggal 7 dan 8, pada saat tanggal 7 dan 8 itu bupati sudah aktif kembali, Pak?

1155.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Kalau tanggal 6 sudah aktif, Yang Mulia. (...)

1156.KETUA: ASWANTO

Saksi, yang ditanya saja yang dijawab, Pak. Enggak usah Panjang-lebar, silakan.

1157.KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Oke, langsung ke Pak Darwis. Pak Darwis?

1158.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ya, Pak.

1159.KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya. Pak Darwis, pencairan pembagian dana BLT di Desa Limau Manis, apakah tanggal 7 atau tanggal 8 saja?

1160.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Tanggal 14 Desember pencairan di Limau Manis, Pak.

1161.KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Oh, tanggal 14 Desember, ya. Ya, oke, pertanyaan saya yang kedua, apakah Pak Darwis, pernah ikut pertemuan dengan beberapa kepala desa tanggal 6, tanggal 7, dan tanggal 8?

1162.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Ulangi, Pak, ulangi.

1163.KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Apakah Pak Darwis, pernah ikut ada pertemuan dengan beberapa kepala desa, di situ ada Pak Camat, Pak Asfan, pada tanggal 6, tanggal 7, dan tanggal 8 Desember?

1164.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DARWIS NASUTION

Kebetulan kami hampir setiap hari kumpul-kumpul, Pak.

1165.KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Oke, terima kasih. Saya lanjut ke Ibu Indah. Ya, tadi katakan Saksi Indah kenal dengan Pak Rico Barheng, dengan Pak Loren Tambunan, kenal?

1166.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Loren Tambunan?

1167.KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya.

1168.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Saya kenal, Pak, cuma kemungkinan ... maaf, Pak, saya belum kenal, cuma kemungkinan kalau saya lihat wajahnya, saya kenal.

1169.KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Oh. Yang Mulia. Karena beberapa Saksi ini kami affidavit, kami sudah masukkan di beberapa bukti yang dibagi dalam bukti, seperti P-10.13 dan seterusnya, Yang Mulia, jadi pertanyaan cukup.

1170.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Cukup, ya. Itu yang tadi, soal 400 suara yang dicoblos itu, itu yang tadi kan di Saksi Ridwan Agustua itu kan di TPS 02.

1171.KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya, benar, Yang Mulia.

1172.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Memang di Pemohon mendalilkan bahwa itu terjadi juga di TPS 01?

1173.KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Ya, kalau di pernyataan mereka begitu juga, Yang Mulia, kami dalilkan, di TPS 1.

1174.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

1175.KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Lebih kurang 200, di TPS 2 lebih kurang 200.

1176.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, jadi 400 itu di dua TPS?

1177.KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Di dua TPS, Yang Mulia.

1178.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan di TPS 02 saja?

1179.KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR

Bukan. Di dua TPS, Yang Mulia.

1180.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, tadi ... oke, cukup, ya? Oke, dari Termohon ada?

1181.KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Satu saja kepada Ibu Indah. Untuk validasi saja ini, Ibu Indah. Ibu Indah, sebagai Saksi tahu berapa jumlah DPT untuk TPS 1 Desa Kampung Baru?

1182.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Kenapa, Pak?

1183.KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Berapa jumlah DPT-nya?

1184.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Mohon maaf, Pak saya kurang tahu, Pak.

1185.KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Kurang tahu, ya.

1186.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Saya sudah lupa.

1187.KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Yang menggunakan hak pilih tahu?

1188.KETUA: ASWANTO

Tadi Bapak katakan satu saja? Sudah cukup satu kan sudah dijawab, tidak tahu jumlah DPT.

1189.KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Oke, cukup, Majelis.

1190.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, terima kasih. Dari meja Hakim, cukup ya? Baik, terima kasih, untuk Saksi. Pada saat ini Bapak Anjur Brutu, Bapak Darwis Nasution, dan Ibu Indah Juniarti, terima kasih, ya, sudah bisa meninggalkan ruang sidang ini. Selanjutnya (...)

1191.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANJUR BRUTU

Terima kasih, Yang Mulia.

1192.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: INDAH JUNIARTI

Terima kasih, Yang Mulia.

1193.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dari mana? Oh, ya, oke, sama-sama. Untuk Bawaslu, saya mohon Yang Mulia Pak Ketua untuk memimpin.

1194.KETUA: ASWANTO

Baik.

1195.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Izin, Yang Mulia?

1196.KETUA: ASWANTO

Apa itu?

1197.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Sesuai tadi ada yang kita cancel tentang pemutaran video, kami tetap memohonkan untuk melihat dan menyaksikan bagaimana proses penyaluran BLT ketika itu Yang Mulia, kami mohon izin dan mohon diperkenankan supaya video di maksud bisa diputar, seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

1198.KETUA: ASWANTO

Tadi sebenarnya kan Saudara meminta untuk me apa ... mengkonfirmasi (...)

1199.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Konfirmasi tadi.

1200.KETUA: ASWANTO

Ke Saksi tadi, Saksinya sudah selesai. Saudara lupa tadi, kami juga lupa. Mestinya Saudara mengingatkan. Putar saja. Sudah di ... dikoordinasikan dengan (...)

1201.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Sudah, Yang Mulia.

1202.KETUA: ASWANTO

Tim kita?

1203.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Sudah.

1204.KETUA: ASWANTO

Silakan, tidak sampai 5 menit, Pak, ya. Kalau sudah (...)

1205.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya, ini dia, Yang Mulia.
(Pemutaran Video)

1206.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, Yang Mulia. Saya bisa konfirmasi sedikit? Baik, Pihak Terkait, ya. Video tadi itu ... itu di desa mana, Pak?

1207.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ada di daftar bukti, Yang Mulia sebentar kami (...)

1208.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, desa mana? Kemudian nanti dicek di situ yang menang itu pasangan calon nomor berapa?

1209.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Baik, Yang Mulia.

1210.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu PT berapa?

1211.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya.

1212.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Apakah kenal kepala desa ini?

1213.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Siapa, Pak?

1214.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang tadi.

1215.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Kalau ... kalau saya, kan tinggal di Jakarta, Pak.

1216.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, ya coba tolong dicek dulu, ya.

1217.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Itu 125, 149, 173, ya. Sebenarnya ada 3 video, Yang Mulia. Ya, yang 125 itu di Desa Patahajang, Kecamatan Ulu Pungkut.

1218.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang barusan video ini di desa mana, Pak?

1219.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Itu di Patahajang.

1220.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Patahajang.

1221.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya.

1222.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Di ... di desa itu dimenangkan oleh paslon nomor berapa?

1223.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Oh, mungkin dikonfirmasi dengan KPU.

1224.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, ya, KPU bisa tolong dicek di Desa Patahajang ini dimenangkan oleh paslon nomor berapa?

1225.KETUA: ASWANTO

Mestinya lawyer-nya tahu dong. Kan, kita di sini, kan menyampaikan dalil masing-masing masa tidak tahu siapa yang menang. Nanti KPU juga pengacaranya (...)

1226.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Seingat kami Pasangan Nomor 1 di situ menang.

1227.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pasangan Nomor 1? Oke. Eh, tapi itu seingat, benar enggak, coba lihat di data dulu.

1228.KETUA: ASWANTO

KPU siapa yang menang di situ? Lupa juga KPU? Ada tidak di bukti Bapak itu, Pihak Terkait?

1229.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Oh, videonya kami sudah kasih itu kalau ... kalau rekapitulasi saya rasa KPU-lah yang lebih berkompeten.

1230.KETUA: ASWANTO

Lho, ini, kan Saudara ... ini ada permohonan Saudara me-counter.
Mestinya ada dong di keterangan Saudara.

1231.KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Izin, Majelis.

1232.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan.

1233.KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI

Untuk desa yang disebutkan tadi di dalam permohonan Pemohon
juga tidak ada diuraikan. Jadi, juga di dalam (...)

1234.KETUA: ASWANTO

Pemohon betul tidak ada didalilkan itu?

1235.KUASA HUKUM PEMOHON:

Maaf tidak ada, Yang Mulia.

1236.KETUA: ASWANTO

Tidak didalilkan. Berarti yang mengemukakan itu hanya Pihak
Terkait saja.

1237.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Izin, Yang Mulia. Kami, kan mengajukan itu bukti sebagai alat
untuk memperlihatkan kepada Majelis bahwa seperti itulah antara lain
pembagian BLT itu ... seperti itu, Yang Mulia.

1238.KETUA: ASWANTO

Oke, kita paham itu.

1239.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya. Kemudian ada lagi di Bukti 173.

1240.KETUA: ASWANTO

Sudah, karena nanti kami yang ... kami yang nonton itu. Ada 173, ada 145. Tadi yang diputar berapa 125 atau 145?

1241.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Yang tadi 125. Kemudian video ... video pembagian BLT lagi di 173.

1242.KETUA: ASWANTO

Ya, kami sudah ... kami sudah lihat itu 173, 145, 125. Pertanyaan saya yang diputar tadi 125?

1243.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya, 125.

1244.KETUA: ASWANTO

Sama saja, kan isinya pembagian BLT.

1245.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Sama. Malah yang 173 itu yang memberikan wejangan adalah dari pihak TNI, Pak.

1246.KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup, ya?

1247.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AMIN NASUTION

Ya.

1248.KETUA: ASWANTO

Sekarang kita ke Bawaslu. Bawaslu.

1249.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Siap, Yang Mulia.

1250.KETUA: ASWANTO

Yang hadir siapa? Ketua atau divisi?

1251.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Kami berdua, Yang Mulia dari divisi, Yang Mulia.

1252.KETUA: ASWANTO

Divisi apa, Bapak?

1253.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Baik, Yang Mulia. Saya dari divisi pengawasan.

1254.KETUA: ASWANTO

Oke.

1255.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Dan sebelah kanan saya dari divisi penanganan pelanggaran, Yang Mulia.

1256.KETUA: ASWANTO

Baik. Saya mulai dulu dari penanganan pelanggaran. Ada berapa laporan pelanggaran yang terjadi selama proses pilkada di sana?

1257.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Terima kasih, Yang Mulia. Berkaitan dengan data ba ... yang diperoleh oleh Bawaslu berkaitan dengan laporan. Jumlah laporan yang diterima oleh Bawaslu ada sekitar 23, Yang Mulia.

1258.KETUA: ASWANTO

23 laporan. Oke. Itu laporan dari tiga apa ... dari seluruh pasangan calon atau hanya dari Pemohon?

1259.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Yang Mulia, dari 23 laporan ini ada 3 dari pasangan calon dan selebihnya itu dari masyarakat, Yang Mulia.

1260.KETUA: ASWANTO

Baik. Jadi, hanya 3 yang berasal dari pasangan calon.

1261.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1262.KETUA: ASWANTO

Pasangan calon nomor berapa yang melapor?

1263.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ada 2 dari pasangan 0 ... Pasangan Nomor 1. Kemudian 1 dari Pasangan Nomor 3, Yang Mulia.

1264.KETUA: ASWANTO

Baik. Nomor 3=1, terus (...)

1265.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Nomor 1=2.

1266.KETUA: ASWANTO

Terkait itu nomor berapa, sih? Nomor 2 tidak ada laporan berarti?

1267.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Tidak ada, Yang Mulia.

1268.KETUA: ASWANTO

Tidak ada laporan. Yang ada 01 sama 03. Baik. Ada temuan?

1269.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Temuan ada, Yang Mulia.

1270.KETUA: ASWANTO

Berapa temuan?

1271.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

10 ... 10, Yang Mulia.

1272.KETUA: ASWANTO

10? Baik.

1273.KETUA: ASWANTO

Nah, dari 23 laporan, 10 temuan apa ada yang terbukti?

1274.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ada, Yang Mulia.

1275.KETUA: ASWANTO

Apa yang terbukti mengenai apa itu?

1276.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Dari data Bawaslu berkaitan dengan laporan mutasi.

1277.KETUA: ASWANTO

Laporan mutasi, ini yang melapor masyarakat atau pasangan calon?

1278.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ini Pasangan Calon 01.

1279.KETUA: ASWANTO

Pasangan Calon 01 melaporkan tentang mutasi dalam kurun waktu 6 bulan?

1280.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1281.KETUA: ASWANTO

Apa hasil akhirnya itu?

1282.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Hasil akhirnya ini, Yang Mulia, dari kajian Bawaslu karena yang dilaporkan orang ini berkaitan dengan Pasal 71 ayat (2) karena (...)

1283.KETUA: ASWANTO

71 ayat (2) atau ayat (3)?

1284.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

71 ayat (2), Yang Mulia.

1285.KETUA: ASWANTO

Ayat (2), oke.

1286.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Kemudian yang bersangkutan meminta, memohon supaya didiskualifikasi. Kemudian di yang mengatur terkait dengan sanksinya itu di Pasal 5 ... 71 ayat (5) bunyi pasalnya bahwa setiap Petahana ... Calon Petahana yang melakukan yang melanggar Pasal 2 dan 3 jadi di ayat ... di sanksinya itu ada (...)

1287.KETUA: ASWANTO

Ayat (2) ... ayat (2) dan ayat (3)?

1288.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, bunyi Pasal 5-nya, Yang Mulia.

1289.KETUA: ASWANTO

Coba baca dulu, apa bunyi Pasal 5? Bapak bunyi Pasal ... ayat (5)?

1290.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1291.KETUA: ASWANTO

Pasal 71 ayat (...)

1292.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ayat (5).

1293.KETUA: ASWANTO

Ayat (5) itu merefer ke ayat (2) dan ayat (3)?

1294.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1295.KETUA: ASWANTO

Ya, bukan Pasal 3, kan? Pasal 3 ke depan lagi kita nanti. Terus gimana hasil lainnya, Pak?

1296.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Hasilnya, Yang Mulia tidak ... tidak memenuhi unsur terhadap ayat tersebut.

1297.KETUA: ASWANTO

Tidak memenuhi unsur?

1298.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1299.KETUA: ASWANTO

Berarti tidak ada rekomendasi?

1300.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Tidak ada rekomendasi, Yang Mulia.

1301.KETUA: ASWANTO

Baik. Berarti tidak ada yang ter ... tidak terbukti berarti?

1302.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1303.KETUA: ASWANTO

Tadi kan saya tanya, "ada yang terbukti", Bapak mengatakan, "ada laporan tentang mutasi". Ternyata tidak terbukti?

1304.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1305.KETUA: ASWANTO

Bapak mendaftarkan dan melakukan proses tapi ternyata tidak terbukti?

1306.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1307.KETUA: ASWANTO

Di tingkat berapa dinyatakan tidak terbukti?

1308.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Coba diulang lagi, Yang Mulia?

1309.KETUA: ASWANTO

Diprosesnya itu kan ada proses.

1310.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1311.KETUA: ASWANTO

Proses awal kemudian proses lanjut ini melibatkan Gakkumdu?

1312.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Terkait dengan laporan ini karena laporan ini berkaitan dengan administrasi tidak melibatkan Gakkumdu, Yang Mulia.

1313.KETUA: ASWANTO

Baik jadi (...)

1314.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Namun, Yang Mulia, dalam proses kami menemukan ada unsur tindak pidana.

1315.KETUA: ASWANTO

Terus?

1316.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Kemudian ini sudah diproses mulai dari pemba ... melibatkan Gakkumdu dan ... mulai dari pembahasan pertama (...)

1317.KETUA: ASWANTO

Yang kasus mana itu yang tindak pidana?

1318.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Kasus berkaitan dengan pergantian pejabat ini juga, Yang Mulia.

1319.KETUA: ASWANTO

Oh, berarti di samping ada pelanggaran administrasi juga ada dugaan tindak pidana pemilu?

1320.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1321.KETUA: ASWANTO

Terus bagaimana dengan tindak pidana pemilu?

1322.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ini sudah kami lakukan pembahasan dengan Gakkumdu mulai pembahasan I, II, dan sampai tingkat penyidikan kemudian hasil penyidik ... hasil dari penyidikan kepolisian kami bawa ke pembahasan yang ketiga.

1323.KETUA: ASWANTO

Ya.

1324.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Hasilnya tidak memenuhi syarat materiil.

1325.KETUA: ASWANTO

Materiil.

1326.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1327.KETUA: ASWANTO

Jadi kesimpulannya, baik administrasi maupun pidana pemilunya tidak ada yang terbukti?

1328.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Tidak, Yang Mulia.

1329.KETUA: ASWANTO

Baik. Masih ada lagi laporan yang Saudara registrasi?

1330.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Masih, Yang Mulia.

1331.KETUA: ASWANTO

Yang sampai Saudara bahas, laporan mengenai apa itu?

1332.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Laporan mengenai ... laporan mengenai kamp ... rekomendasi ... laporan berkaitan dengan PSU di Banjar di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Penyabungan Timur, Yang Mulia.

1333.KETUA: ASWANTO

Apa hasil akhirnya?

1334.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Hasilnya ini kemarin kita rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal supaya dilakukan untuk (...)

1335.KETUA: ASWANTO

PSU?

1336.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

PSU.

1337.KETUA: ASWANTO

Di berapa TPS?

1338.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Di satu TPS di Desa Huta Tinggi, Yang Mulia.

1339.KETUA: ASWANTO

Satu TPS. Terus KPU sudah laksanakan?

1340.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Sudah, Yang Mulia.

1341.KETUA: ASWANTO

Baik. Kalau tentang 21 kotak yang tidak terkunci dan tidak tersegel ada laporan enggak itu?

1342.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ada, Yang Mulia.

1343.KETUA: ASWANTO

Gimana hasilnya?

1344.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ini sudah ... sudah kita proses juga.

1345.KETUA: ASWANTO

He em, gimana hasilnya?

1346.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Sedikit melibatkan Gakkumdu.

1347.KETUA: ASWANTO

Ya.

1348.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Mulai dari pembahasan pertama, kedua sampai ke pembahasan kedua, namun tidak dari ... dari hasil pembahasan kedua ini tidak memenuhi syarat materiil, Yang Mulia.

1349.KETUA: ASWANTO

Baik. Nah, dari 23 laporan, 10 temuan. Ada tidak yang terbukti sampai proses akhir?

1350.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Tidak ada, Yang Mulia.

1351.KETUA: ASWANTO

Tidak ada, semua seperti tadi ada yang tidak terbukti di tingkat Bawaslu, ya karena itu administrasi yang pidana itu ada yang berakhir di penyidik atau berakhir di Gakkumdu?

1352.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1353.KETUA: ASWANTO

Berapa yang berakhir di penyidik?

1354.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Yang berakhir di penyidikan, Yang Mulia, ada 2.

1355.KETUA: ASWANTO

2 yang berakhir di penyidikan?

1356.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1357.KETUA: ASWANTO

Yang berakhir di Gakkumdu?

1358.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Yang berakhir di Gakkumdu ada 7, Yang Mulia.

1359.KETUA: ASWANTO

7, berarti 9. Yang selebihnya?

1360.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ini, Yang Mulia. Jumlah diantara jumlah yang 23 ini, ada 7 laporan yang diterima Bawaslu. Namun, tidak sampai pada (...)

1361.KETUA: ASWANTO

Pemeriksaan.

1362.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Registrer, Yang Mulia.

1363.KETUA: ASWANTO

Belum diregister?

1364.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1365.KETUA: ASWANTO

Berarti semua laporan yang jum ... laporan yang jumlahnya 23, temuan yang 10, yang diregister berapa?

1366.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Yang diregister, kalau dia berbentuk laporan, Yang Mulia, 16.

1367.KETUA: ASWANTO

16. Dari 16 yang diregister itu ada yang berakhir dipembahasan Bawaslu karena memang itu kewenangannya Bawaslu saja, pelanggaran administrasi, ada juga yang berakhir di.

1368.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Penyidikan, Yang Mulia.

1369.KETUA: ASWANTO

Penyidikan. Berapa yang berakhir di penyidikan tadi?

1370.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

2, Yang Mulia.

1371.KETUA: ASWANTO

2. Berakhir di Gakkumdu 7?

1372.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

7, Yang Mulia.

1373.KETUA: ASWANTO

Betul, ya? Selebihnya itu berarti berakhir di Bawaslu?

1374.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia. Karena sebagian ada pelanggaran etik yang kita rekomendasikan (...)

1375.KETUA: ASWANTO

Kalau pelanggaran etik ada, ndak, yang sudah direkomendasi?

1376.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ada, Yang Mulia.

1377.KETUA: ASWANTO

Apa itu?

1378.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Berkaitan dengan etik ini, Yang Mulia, temuan ... temuan Bawaslu.

1379.KETUA: ASWANTO

Ya, apa rekomendasinya?

1380.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Rekomendasinya ditindaklanjuti oleh KPU.

1381.KETUA: ASWANTO

Apa itu?

1382.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Memberikan sanksi peringatan.

1383.KETUA: ASWANTO

Ya, kasusnya mengenai apa, Bapak?

1384.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Kasus ... Pertama, kasusnya, Yang Mulia, ini berkaitan dengan di TPS 02 di Desa Sipaga-paga[Sic!], mereka melakukan pemungutan ... penghitungan suara di bawah pukul 13.00 WIT.

1385.KETUA: ASWANTO

Melakukan pemungutan suara sebelum waktunya?

1386.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Sebelum waktunya.

1387.KETUA: ASWANTO

Itu pemungutan atau penghitungan?

1388.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Penghitungan.

1389.KETUA: ASWANTO

Penghitungan. Di TPS mana itu?

1390.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

TPS Desa Sipaga-Paga, Yang Mulia.

1391.KETUA: ASWANTO

Siapa yang menang di situ?

1392.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Kalau itu kurang tahu, Yang Mulia.

1393.KETUA: ASWANTO

Lho, kan Saudara memproses itu. Kan ada ... ada ... ada apa namanya ... ada temuan.

1394.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya.

1395.KETUA: ASWANTO

Saudara tidak tahu gitu, ya?

1396.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, tidak tahu, Yang Mulia.

1397.KETUA: ASWANTO

Baik. Yang kita diskusikan panjang-lebar mulai pagi tadi, soal dana desa itu, BLT, ada ndak laporannya?

1398.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Laporan berkaitan dengan BLT ada, Yang Mulia. Tapi, dia termasuk dalam tidak diregister. Karena lewat batas waktu yang ditentukan, Yang Mulia.

1399.KETUA: ASWANTO

Saya catat dulu, Pak, ya. Tidak diregister karena syarat formil tidak terpenuhi?

1400.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1401.KETUA: ASWANTO

Berarti syarat materiilnya belum diproses?

1402.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Karena ini berkaitan dengan waktu 7 hari itu, Yang Mulia.

1403.KETUA: ASWANTO

Waktu 7 hari. Jadi, sudah lewat waktu, kedaluwarsa. Sehingga tidak diregistrasi.

1404.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1405.KETUA: ASWANTO

Tidak dijadikan temuan?

1406.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Tidak, Yang Mulia.

1407.KETUA: ASWANTO

Di undang-undangkan diperintahkan kepada Bawaslu, kalau laporan itu kedaluwarsa, Bawaslu harus menjadikan temuan. Ndak dijadikan, ya?

1408.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Tidak, Yang Mulia.

1409.KETUA: ASWANTO

Baik. Itu dana desa dengan BLT?

1410.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

BLT DD, Yang Mulia.

1411.KETUA: ASWANTO

Ya. Ada berapa laporan?

1412.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ada 2, Yang Mulia.

1413.KETUA: ASWANTO

Dua. Yang melapor siapa?

1414.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Yang melapor masyarakat biasa ... masyarakat.

1415.KETUA: ASWANTO

He eh.

1416.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Dua-duanya masyarakat, Yang Mulia.

1417.KETUA: ASWANTO

Dua-duanya masyarakat dan dua-duanya kadaluarsa?

1418.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1419.KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan, Yang Mulia.

1420.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, ya. Jadi, saya tambahkan. Bawaslu ... Bawaslu, Mandailing Natal, ya?

1421.PEMOHON: ATIKA AZMI UTAMMI

Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia. Mengenai BLT DD itu dilaporkan oleh Kepala Dinsos itu Bapak Hizrah Perdana.

1422.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ibu, sudah, Ibu. Ya.

1423.PEMOHON: ATIKA AZMI UTAMMI

Terima kasih, Yang Mulia.

1424.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ibu sudah diwakili Kuasa Hukum di sini kok. Bawaslu, selain yang soal BLT atau dana desa tadi mengenai ... itu tidak ditindaklanjuti karena tenggang waktu, ya, Pak? Tenggang waktu dan belum dinilai syarat substansinya, ya, Pak? Karena syarat formilnya tidak terpenuhi dengan urusan tenggang waktu, ya. Kalau yang ini, Pak. Yang berkaitan dengan TPS 02 Kampung Baru, tadi yang didalilkan. Ada laporan tidak?

1425.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Berkaitan dengan TPS 02 Kampung Baru, Yang Mulia. Pascasidang tanggal 2 kemarin, Bawaslu pukul 00.30 malam (...)

1426.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sidang yang mana?

1427.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Menerima laporan berkaitan dengan TPS 02 Kampung Baru.

1428.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sidang yang mana, Pak? Kita kan 2 kali sidang.

1429.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Sidang yang pertama, Yang Mulia.

1430.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sidang pertama, ya. Ada laporan itu?

1431.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1432.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Melaporkan berkaitan apa, Pak?

1433.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Berkaitan dengan penggelembungan suara ... yang berkaitan penggelembungan suara, Yang Mulia.

1434.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ohh, dengan modus apa ... yang melaporkan siapa?

1435.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Yang melapor ... yang melaporkan masyarakat, Yang Mulia.

1436.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masyarakat. Masyarakat siapa ini? Apakah pemilih di sana?

1437.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Masyarakat pemilih di (...)

1438.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

TPS 02 itu?

1439.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Tidak, Yang Mulia. Di lain kecamatan.

1440.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lain kecamatan. Kok ... terus apa Bapak penanganannya?

1441.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Dalam proses penanganan pelanggaran kita meminta keterangan-keterangan dari pelapor kemudian dari saksi, kemudian pendapat ahli juga kita minta karena berkaitan dengan (...)

1442.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini sudah ... perkara sudah di MK, ya?

1443.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia. Sudah diregister, Yang Mulia.

1444.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah diregister di Mahkamah Konstitusi?

1445.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1446.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak masih menangani itu dengan memanggil ahli dua orang?
Memanggil ahli juga?

1447.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Dalam proses penanganan dimungkinkan kami untuk meminta ahli ... pendapat ahli, Yang Mulia.

1448.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, pertanyaan saya mena ... apa ... Minta ketegasan itu. Jadi Ketika perkara ini sudah di Mahkamah Konstitusi, permohonan ini kemudian pada sidang pertama, setelah sidang pertama ada laporan tentang TPS 02 Kampung Baru, kemudian Bawaslu melakukan tindak lanjut?

1449.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1450.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, terus apa keputusannya?

1451.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Keputusan ini kami bahas mulai dari pembahasan pertama sampai ke pembahasan kedua Gakkumdu bersama unsur kepolisian dan kejaksaan.

1452.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

He eh.

1453.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ini hasilnya juga tidak memenuhi syarat materiil, Yang Mulia.

1454.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu Bapak mengundang ahli siapa itu?

1455.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ahli pidana, Yang Mulia.

1456.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berkaitan dengan TPS 02 Kampung Baru, ya?

1457.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1458.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Diputuskan tanggal berapa, Pak?

1459.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Diputuskan ... ini kami register, Yang Mulia. Tanggal 5 Februari, kemudian 5 hari setelah itu kami putuskan, Yang Mulia.

1460.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tanggal 7, ya. Kira-kira, ya.

1461.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1462.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada dibawa sekarang putusannya, Pak? Dibawa?

1463.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Di (...)

1464.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kesimpulan Bapak dari hasil kemarin.

1465.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Oh tidak. Tidak ada, Yang Mulia.

1466.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak?

1467.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Tidak, Yang Mulia.

1468.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

He em. Jadi kalau misalnya perkaranya sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi itu didalilkan juga oleh Pemohon atau kah ada irisan-irisannya tetap bisa masing-masing jalan ya, Pak?

1469.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya.

1470.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bawaslu punya kewenangan, MK juga bisa, ya. Atau MK juga tetap bisa berjalan untuk berproses, ya?

1471.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya.

1472.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tetap berproses dua-duanya ya Pak, ya?

1473.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1474.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, baik. Kemudian kalau berkaitan dengan TPS 01 ada laporan tidak?

1475.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Laporan itu bersamaan, Yang Mulia.

1476.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu juga enggak memenuhi hak? Enggak memenuhi ... anu ... apa ... syarat formil materiil?

1477.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Syarat materiilnya tidak terpenuhi, Yang Mulia.

1478.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Bapak sudah lihat bukti ke daftar hadir yang ... yang ditulis tangan?

1479.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Daftar hadir kemarin kami minta bersurat kepada KPU untuk meminta daftar hadir dan kami Bawaslu sudah melihat daftar hadirnya, Yang Mulia. Yang ... yang bertanda tangan.

1480.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

He eh, lihat tidak?

1481.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Lihat, Yang Mulia.

1482.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Daftar hadir yang tulis tangan untuk TPS 01 Desa Bandar Panjang?

1483.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Desa ... oh, Desa Bandar Panjang Tuo, Yang Mulia.

1484.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa tidak ketika memeriksa perkara itu untuk memutuskan? terlepas ini perkara sudah di MK juga masih (...)

1485.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Berarti, Yang Mulia. Terkait TPS 01 ini yang berada di Desa Bandar Panjang Tuo, Yang Mulia.

1486.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tadi kan 0 ... tapi kan 02 di Kampung Baru.

1487.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1488.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sekarang yang 01 di Bandar Panjang (...)

1489.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Di Desa Bandar Panjang.

1490.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di Desa Bandar Panjang ini satu kesatuan laporan, ya?

1491.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1492.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa penanganan Bapak?

1493.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Itu sudah ... sudah ke Bawaslu, sudah ditangani juga di Sentra Gakkumdu, kami bahas sampai ke pembahasan kedua. Kemudian (...)

1494.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sama putusannya, ya?

1495.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Sama putusannya, Yang Mulia.

1496.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, diputus tanggal 7 Februari juga?

1497.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Tidak, Yang Mulia. Itu di Desa Bandar Panjang Tuo ini dilaporkan tanggal 14 Desember.

1498.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lho, katanya 1 laporan tadi?

1499.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Oh, gini, Yang Mulia. Saya tadi beranggapan bahwa TPS 01 dan 02 itu yang di Desa Kampung Baru.

1500.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya. Ini yang 01 Bandar Panjang, 0 (...)

1501.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Desa Bandar Panjang Tuo.

1502.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus yang TPS 2 Kampung Baru tadi? Kita pindah ke ... kalau itu oke lah, itu sudah ditangani, sudah diputus, nanti kami akan menyikapi itu apakah yang demikian ... apa ... bisa dipertimbangkan. Kemudian kalau yang Bandar Panjang bagaimana, Pak? Yang saya tanya tadi adalah Anda ikut tidak memeriksa bagian dari Sentra Gakkumdu? Semua ikut kan komisionernya?

1503.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Semua ikut, Yang Mulia.

1504.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Melihat enggak daftar hadir tulis tangan?

1505.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Yang di Desa Bandar Panjang Tuo?

1506.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. (...)

1507.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

... kami Bawaslu tidak melihat desa daftar hadir yang bertulis tangan, Yang Mulia.

1508.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak?

1509.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Tidak.

1510.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Padahal yang dipersoalkan ... yang persoalan yang sangat krusial itu. Dari keterangan KPU sendiri, saksinya KPU menjelaskan, ini saksi yang tidak hadir, tapi memberi keterangan tertulis bahwa yang terjadi di sana adalah hari itu daftar hadir ketinggalan, tidak ditemukan. Ditunggu sampai pukul 11.00 belum hadir. Oleh karena itu, diambil alih dengan tulisan tangan. Nah, itu pertanyaannya, kenapa Bawaslu tidak melihat itu? Daftar hadir pengganti itu? Padahal di situ akan saya tanya ada tidak tanda tangan kehadiran para pihak, kehadiran pemilih. Bapak enggak lihat? Silakan, Pak. Mau jawab, ya? Silakan.

1511.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Izin, Yang Mulia?

1512.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1513.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Terkait daftar hadir yang tulis tangan di Desa Bandar Panjang Tuo.

1514.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1515.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Ini memang sudah diketahui dalam pengawas kita di tingkat TPS pada saat TPS mulai dibuka.

1516.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1517.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Bahwasanya KPPS pada saat pembukaan kotak suara tidak menemukan adanya daftar hadir yang ada dalam kotak tersebut, sehingga ada masukan dari pengawas TPS untuk mencari keberadaan daripada daftar hadir tersebut. Namun, hingga pukul 07.30 pagi masyarakat calon pemilih sudah berada di sekitar lokasi, Yang Mulia, sehingga KPPS berdasarkan masukan daripada PPS membuat daftar hadir pemilih di buku tulis.

1518.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tahu saya, Pak. Itu enggak usah diteruskan. Itu memang benar begitu adanya.

1519.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Ya, Yang Mulia.

1520.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi waktu Bawaslu melihat tidak wujud daftar hadir itu yang tulis tangan?

1521.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Baik, Yang Mulia. Daftar hadir itu kami lihat ketika rekapitulasi di tingkat KPU, Yang Mulia.

1522.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di tingkat KPU?

1523.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Ya, Yang Mulia.

1524.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ketika di sentra Gakkumdu karena itu kemudian ada laporan lihat tidak?

1525.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Tidak, Yang Mulia.

1526.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, Bapak yang satunya.

1527.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Daftar tersebut dimasukkan di dalam surat suara di KPU, Yang Mulia.

1528.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Bapak lihat tidak Ketika kemudian dibahas di sentra Gakkumdu?

1529.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Kalau di sentra Gakkumdu tidak ada, Yang Mulia.

1530.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada atau tidak lihat?

1531.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Tidak lihat, Yang Mulia.

1532.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak lihat. Kalau di KPU lihat?

1533.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Kalau di KPU pada saat rekapitulasi di KPU saya melihat, Yang Mulia.

1534.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di kabupaten?

1535.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Ya, Yang Mulia.

1536.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada tidak tanda tangan daftar hadir ditulis tangan itu? Tanda tangannya?

1537.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Baik, Yang Mulia. Daftar hadir yang dibuat di buku tulis itu hanya nama pemilih yang hadir, Yang Mulia. Tidak bertanda tangan.

1538.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak tanda tangan.

1539.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Tidak, Yang Mulia.

1540.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Kemudian daftar hadir yang ditulis dengan tulisan tangan yang sama untuk sekian ratus orang laki-laki dan perempuan padahal dipisah, Bapak tahu tidak kalau daftar hadir laki-laki dan perempuan itu dipisah?

1541.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Tahu, Yang Mulia.

1542.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tahu, tapi yang dilaporkan untuk bukti-bukti pun yang mengajukan Bapak Bawaslu ini. Kami cross tadi bukti itu yang mengajukan justru Bawaslu. Kehadiran perempuan/laki-laki dipisah, tapi tulisannya sama persis, tidak ada tanda tangannya.

1543.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Izin, Yang Mulia?

1544.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, bagaimana?

1545.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Bahwasanya yang menuliskan daripada daftar hadir yang di buku tulis itu adalah petugas KPPS, Yang Mulia.

1546.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya tidak memungkirinya itu. Tapi kenapa tulisannya sama persis, padahal untuk blanko laki-laki dan perempuan terpisah, ya kan?

1547.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Ya, Yang Mulia.

1548.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu dimungkin bisa juga, tapi kenapa pertanyaan kemudian tidak ada tanda tangan, tapi ada keterangan yang dicentang, ada yang tidak. Itu apa sebenarnya esensi daripada ada yang dicentang, ada yang tidak, ada yang kosong sama sekali?

1549.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Baik, Yang Mulia. Hal ini berdasarkan laporan daripada jajaran kami di kecamatan, Yang Mulia. Bahwasanya PPK melakukan cross-check antara daftar hadir yang di buku tulis dengan yang ada di daftar hadir yang sebenarnya, Yang Mulia. Jadi pada saat melakukan cross-check tersebut, PPK memberikan tanda centang mana yang sudah di-checklist disesuaikan dengan nama yang ada di C Daftar Hadir itu diberikan centang, Yang Mulia.

1550.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang dicentang di mana, Pak?

1551.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Di buku tulis, Yang Mulia.

1552.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu maksudnya apa yang dicentang?

1553.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Berdasarkan informasi dari pengawas kita, Yang Mulia. Bahwa yang pertama kan ada daftar hadir di buku tulis.

1554.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1555.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Kemudian yang kedua ada daftar hadir di (...)

1556.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

KWK?

1557.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

C Daftar Hadir.

1558.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

He em.

1559.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Pada saat terjadi permasalahan di tingkat kecamatan, PPK melakukan cross-check mana yang ada di daftar hadir yang sebenarnya dengan yang tertulis di daftar hadir yang dibuat secara manual.

1560.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tulis tangan, oke.

1561.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Itu yang dilakukan (...)

1562.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kenapa ada yang dicentang ada yang tidak?

1563.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Yang tidak dicentang, Yang Mulia. Bahwa sebagian yang di buku tulis ini tidak terdaftar di C Daftar Hadir, Yang Mulia.

1564.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Banyak loh, Pak.

1565.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Ya, Yang Mulia.

1566.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Banyak yang enggak dicentang. Apa kita lihat bersama-sama?

1567.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Karena begini, Yang Mulia. Berdasarkan pengawasan kita bahwa daftar hadir itu ditemukan pada pukul 11.00, 11.00 WIB, sehingga semua yang hadir sebelum pukul 11.00 itu, itu hanya tertuang dalam daftar hadir yang di buku tulis, Yang Mulia.

1568.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, persoalannya adalah kenapa sebagai ... apa ... petugas yang melaksanakan tugas yang punya nilai momentum yang sangat ini masih juga kemudian barang itu bisa tertinggal dan petugasnya dicari sampai pukul 11.00 belum ada.

Kemudian kalau Bapak mengatakan bahwa itu baru ditemukan pukul 11.00 WIB sebenarnya itu kan daftar hadir yang untuk me-cover yang hadir se ... orang yang datang sampai sebelum pukul 11.00 WIB. Untuk mengambil policy itu diskresi itu PPS harus seizin pengawas. Kenapa baru ditemukan pukul 11.00 WIB sementara itu sudah ada ratusan orang yang ditulis tangan di situ? Tanpa tanda tangan, Pak. Bagaimana bisa buktikan bahwa orang itu kemudian hadir di situ kemudian dicocokkan ada 53 pernyataan tidak dapat datang di TPS. Ada 53 bukti pernyataan. Bapak pernah melihat?

1569.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Maaf, Yang Mulia, tidak saya belum pernah melihat, Yang Mulia.

1570. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu. Bahwa mereka tidak pernah hadir di TPS itu. Tapi terlepas ini surat pernyataan bisa saja dibuat. Tapi persoalannya kemudian kenapa kemudian matching, match gitu dengan peristiwa yang ada di TPS. Memang bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi atau kita semua bisa meyakini bahwa orang yang membuat pernyataan itu adalah benar-benar hadir. Sementara dia tidak membubuhkan tanda tangan, enggak ada tanda tangannya. Esensi sebuah ... esensi sebuah daftar hadir mestinya ada tulis nama, tanda tangan. Itu yang kemudian bisa dirujuk bahwa ini betul-betul daftar hadir yang memenuhi persyaratan daftar hadir. Ini persoalan yang mungkin ... nah, itu kami pertanyakan kenapa ada fakta-fakta seperti itu yaitu terlepas saya tidak ikut mencampuri intervensi kewenangan Bawaslu di dalam memberikan penilaian karena ini sudah Sentra Gakkumdu ya. Tapi pertimbangan-pertimbangan itu kenapa tidak menjadi pertimbangan yang krusial yang perlu di dalam kemudian. Ya, sekarang Bapak boleh diskusilah, boleh dengan siapapun kalau apa benar daftar hadir seperti itu adalah sudah tulisannya sama, dibuat oleh sak ... sepertinya 1 tangan, ya, kalau apa perkiraan kita sementara, perkiraan kami sementara. Kemudian tidak ada tanda tangan kehadiran. Kemudian ditambah lagi ada pernyataan bahwa mereka tidak hadir melalui surat pernyataan. Belum jumlah surat suara sah yang terpakai 306, 303 suara sah yang tidak terpakai, yang tidak sah harusnya 306 surat suara itu dipakai tapi yang hadir cuma 303. Bapak boleh cek, sebenarnya ketelitian seperti itu diperlukan, Pak, benar tidak inline antara ... ini surat suara yang dipakai. Surat suara semua sempat termasuk cadangan 344. Suara sah 303, suara tidak sah 3. Kan sudah 306 sebenarnya. Surat suara yang ... tapi kehadiran cuma 303 itu pun hanya tulis tangan tidak ada tanda tangannya. Bagaimana kemudian dihadapkan dengan surat pernyataan yang 53 orang yang mengatakan tidak pernah hadir di situ.

Oke, itu ... tapi kami menghormati putusan itu karena itu kan tidak bisa kami menilai terlalu dalam bahwa kita intervensi bahwa ya sebagaimana buat yang punya otoritas kemudian mengambil sikap-sikap itu kan sudah ... silakan itu karena mungkin juga ada upaya-upaya ... terlepas bahwa itu diputuskan juga perkara sudah diproses di Mahkamah Konstitusi, ya, kan Pak? Dan perkara ini kan selisih suaranya itu sedikit ya cukup ... cukup ... sebenarnya cukup sensitif ya. Oke jadi TPS 01 ... 001 Kampung Baru ... 02 Kampung Baru dan 01 Bandar Panjang sudah ditangani Bawaslu pada saat perkara di MK dan kesimpulan dari Sentra Gakkumdu mengatakan (...)

1571. BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Izin, Yang Mulia. Untuk TPS 01 Desa Bandar Panjang Tuo.

1572.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1573.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Itu sebelum diputuskan sebelum perkara di (...)

1574.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

MK.

1575.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

MK.

1576.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Tapi sudah ... sudah anu, ya, sudah ... apa ... sudah selesai rekapitulasi, ya?

1577.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Ya, sudah. Sudah, Yang Mulia.

1578.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tanggal berapa itu, Pak?

1579.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Karena laporannya, Yang Mulia, Bawaslu menerima laporan itu pertanggal 14 setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan.

1580.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Jadi 14 Desember 20, ya?

1581.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Ya, Yang Mulia.

1582.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau putusan, Bapak?

1583.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

5 hari setela ... 5 hari setelah.

1584.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

5 hari.

1585.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Ya.

1586.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini juga di ... sampai ke pembahasan Sentra Gakkumdu?

1587.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Sampai, Yang Mulia.

1588.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sampai. Ini kan bukti-bukti yang saya cross tadi, Pak, Bapak-Bapak. Itu justru yang mengajukan, Bapak. Yang tanda ta ... yang daftar hadir di kertas maupun di C-KWK itu Bapak yang mengajukan. Itu yang kami cross tadi itu.

1589.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Izin sedikit, Yang Mulia.

1590.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1591.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Bahwasannya seperti yang saya sampaikan tadi, daftar hadir yang di buku tulis itu, kami melihat ketika rekapitulasi di tingkat KPU dan ketika Saksi Nomor 1 menyampaikan keberatan atas daftar hadir tersebut, kami menyampaikan rekomendasi untuk dilakukan cross-check antara daftar hadir dengan surat suara yang digunakan oleh PPK dan disaksikan oleh seluruh saksi masing-masing pasangan calon yang hadir di KPU, Yang Mulia.

1592.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1593.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Dan itu telah dilakukan di saat rekapitulasi di KPU, sehingga perselisihan jumlah surat suara tadi, kami menganggap sudah selesai, Yang Mulia.

1594.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1595.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Karena sudah disaksikan oleh masing-masing pasangan calon.

1596.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1597.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Dan juga jajaran kita juga menyaksikan hal seperti itu.

1598.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1599.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Dan perselisihan pengurangan surat suara tidak lagi muncul di saat rekapitulasi di KPU, Yang Mulia.

1600.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya. Ya, enggak apa-apa, ini kan persoalannya kan kemudian perkara ini bergulir di Mahkamah Konstitusi, kemudian itu didalilkan dan memang ada fakta seperti itu. Jadi, kalau yang TPS 01 Bandar Panjang sudah selesai sebelum ada permohonan ke MK, ya, Pak?

1601.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Ya.

1602.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang 02 memang itu perkara sudah di MK dan diputus sekitar tanggal 7 Februari, tapi dinyatakan bahwa itu tidak memenuhi unsur formil dan materiil, ya.

1603.BAWASLU: MAKLUM PELAWI

Ya, Yang Mulia.

1604.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Saya sedikit ke ... anu, Pak, boleh ke tp ... ke KPU. Pak, ketua apa komisioner?

1605.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Komisioner, Yang Mulia.

1606.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Bagaimana pernah mendapat ... anu ... laporan syarat berjenjang soal kejadian di TPS 01 Bandar Panjang itu kok bisa petugas sampai tidak ditemukan sampai pukul 11.00 WIB dan daftar absennya juga tidak ada itu bagaimana?

1607.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Baik, Yang Mulia. Dari keterangan yang kami peroleh dari jajaran kami di bawah dan disampaikan juga oleh PPK Kecamatan Muara Sipongi pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Jadi, kejadiannya kenapa absen itu dibuat di buku tulis, saat pembukaan TPS, KPPS tidak menemukan C.Daftar Hadir.

1608.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1609.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Di dalam perlengkapan TPS.

1610.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1611.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Jadi, buka TPS, upacara nasional menyumpah KPPS dan segala macam sampai sekitar pukul 08.00 WIB (...)

1612.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ditemukan.

1613.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Tidak ditemukan juga.

1614.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1615.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Pemilih sudah ada sekitar 20-an orang di TPS.

1616.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1617.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Maka, ketua PPS mengambil inisiatif meminta kepada KPPS untuk membuat absennya di buku tulis.

1618.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1619.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Nah, di sebuah buku tulis itu. Seterusnya di saat pembukaan TPS itu saksi paslon ada di situ.

1620.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1621.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Saksi Paslon 2 dan 3.

1622.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1623.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Kemudian ada ketua TPS-nya.

1624.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1625.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Dan ada masyarakat pemilih. Lalu, sekitar pukul 10.00 berhubung pengawas TPS di Bandar Panjang Tuo ini berasal dasa Tanjung Alai.

1626.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1627.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Nah, sekitar pukul 10.00 karena suasana TPS sudah agak sepi, PTPS-nya meninggalkan TPS ke Desa Tanjung Alai untuk menyalurkan hak pilih di situ sebab yang bersangkutan terdaftar di Desa Tanjung Alai.

Nah, lalu dia memilih di Tanjung Alai karena di sana mungkin disodorkan C.Daftar Hadir. Nah, sekitar pukul 11.00 WIB dia kembali ke Desa Bandar Panjang Tuo tempat yang bersangkutan mengawas.

Jadi, di Desa Bantar Panjang Tuo ini dia sampaikan bahwa saat memilih di Desa Tanjung Alai dia disodorkan absen. Absen daftar hadir, kira-kira bentuknya seperti itu. Coba di (...)

1628.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di ... disodorkan seperti apa, ya? Bapak ... Bapak bukan di lapangan, ya, waktu itu, ya?

1629.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya.

1630.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cuma saya mendeskripsikan, kalau disodorkan orang kan suruh tulis ... tulis nama, suruh tanda tangan.

1631.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya.

1632.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini kan tulisan itu sama sekian ratus orang itu ditulis dengan tulisan yang sama.

1633.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya.

1634.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, tidak ada tanda tangannya.

1635.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya.

1636.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu kapan dibuat juga kan kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya.

1637.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Nah, kalau (...)

1638.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi, memang kejadian ... sebentar, Pak. Memang kejadian itu ada, ya, di Bandar Panjang (...)

1639.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya.

1640.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

TPS 01, ya?

1641.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya, ya.

1642.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, kemudian daftar hadir yang sebenarnya, kemudian bisa me-cover orang yang tersisa itu (...)

1643.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya.

1644.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dapat dari mana?

1645.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Oh, dari perlengkapan TPS. Jadi, begini Yang Mulia. Saat buka kotak suara perlengkapan TPS (...)

1646.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ditemukan, oke.

1647.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Nah, tidak ditemukan. Lalu, sisa yang tidak terpakai ini kan disimpan di lemari karena lokasi TPS ini di gedung sekolah, Yang Mulia.

1648.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terus?

1649.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Nah, di Gedung sekolah. Nah, ketika diminta sama PTPS untuk diperiksa kembali, diperiksa. Rupanya absen ini satu bungkus dengan formulir kejadian khusus ... formulir kejadian khusus. Dan dia itu dibungkus dengan plastik tembus pandang.

1650.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang formulir kejadian khusus itu tidak juga dipakai?

1651.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Belum, Yang Mulia. Itu nanti dipakai pada saat ada keberatan saat penghitungan.

1652.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, artinya tidak ... apa ... tidak disiapkan di TPS itu?

1653.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Sudah disiapkan, Yang Mulia.

1654.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah (...)

1655.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Tapi belum dipakai pada saat awal-awal pembukaan TPS.

1656.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, pada saat ramai-ramai membuka ... anu ... tadi yang bungkus untuk itu belum dibuka karena diyakini adalah untuk kejadian-kejadian ... catatan kejadian khusus.

1657.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya.

1658.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak tahunya soal daftar hadir ada di situ?

1659.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya.

1660.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Akhirnya ditemukan pukul 11.00 WIB?

1661.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya, Yang Mulia

1662.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

He em. Oke, baru pukul 11.00 WIB itu kemudian normal?

1663.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya, dipakailah C daftar hadir ini (...)

1664.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1665.TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Oleh KPPS, Yang Mulia.

1666.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Oke. Jadi, nanti kami akan menilai itu. Cukup, Pak.

1667.KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

1668.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Saya ke Bawaslu dulu, ya. Laporan setelah rekapitulasi itu ke Bawaslu ada berapa banyak, Pak, selain yang tadi yang sudah disebutkan itu di Kampung Baru?

1669.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Yang Mulia, berkaitan dengan laporan yang diterima Bawaslu itu semuanya (...)

1670.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak, tidak, saya tanya setelah yang rekapitulasi saja.

1671.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, rekapitulasi itu laporan semua, semua laporan itu pada waktu tahapan rekapitulasi.

1672.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pada tahapan?

1673.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya.

1674.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan setelah itu?

1675.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Pada setelah rekapitulasi.

1676.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, itu ada berapa banyak?

1677.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

9.

1678.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada 9.

1679.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Sama yang tidak diregister, Yang Mulia, ada 16.

1680.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, jadi yang jumlah semua yang diregister dan tidak ada 16?

1681.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya.

1682.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kemudian, yang teregister ada 9?

1683.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1684.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

9 itu sudah ada hasilnya?

1685.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Sudah ada hasilnya, Yang Mulia.

1686.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah ada. Itu termasuk yang diputuskan tanggal 7 Februari itu?

1687.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Termasuk, Yang Mulia.

1688.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Termasuk, ya. Kemudian, yang tidak teregister itu bisa disebutkan?

1689.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Yang tidak teregister ini ada 7 berkaitan dengan mutasi jabatan, Yang Mulia.

1690.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

1691.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Kemudian, berkaitan dengan seorang kepala desa ikut memasang spanduk. Kemudian, berkaitan dengan BLTDD, terus berkaitan dengan kepala desa mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon. Kemudian, berkaitan dengan BLTDD juga per tanggal 3 Februari. Kemudian, berkaitan dengan mutasi jabatan.

1692.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, jadi 7 yang tidak diregister itu, itu dilaporkan oleh siapa saja? Itu ada dalam laporan keterangan pada Mahkamah tidak yang 7 itu?

1693.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Yang dilampirkan, yang di keterangan Mahkamah ada berkaitan dengan laporan atas nama Hizrah Perdana Nasution.

1694.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu yang 7 itu? Yang tidak teregister saja yang saya maksudkan.

1695.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1696.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu, ya?

1697.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya.

1698.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Satu saja?

1699.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Yang tidak ... ya, satu saja, Yang Mulia.

1700.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang lain dilaporkan oleh siapa?

1701.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ini pelapornya semua, Yang Mulia, ini pelapornya ini masyarakat. Kemudian, satu tim Pasangan Nomor Urut 3.

1702.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, ada yang dari Pasangan Nomor Urut 3?

1703.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

1704.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu tidak teregister karena apa?

1705.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ada yang karena lewat batas waktu 7 hari sejak diketahui.

1706.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kedaluwarsa, ya, oke.

1707.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Kemudian, ada karena proses penanganannya sudah ... sudah selesai atau sudah dikeluarkan statusnya. Kategori yang 2 itu, Yang Mulia, yang 3 itu, Yang Mulia.

1708.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Itu ada diberikan ke Mahkamah yang 7 itu? Kalau belum bisa kami minta?

1709.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Eenggak ada dimuat di jawaban (...)

1710.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Belum ada, ya?

1711.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Belum ada, Yang Mulia.

1712.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, bisa kami minta itu?

1713.KETUA: ASWANTO

Saudara bawa enggak?

1714.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Bawaslu hanya membuat rekap-rekapan seperti ini saja, Yang Mulia.

1715.KETUA: ASWANTO

Nomor laporannya ada di situ?

1716.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ada, Yang Mulia.

1717.KETUA: ASWANTO

Nomor laporan dan (...)

1718.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Nomor laporan, pelapor, dan terlapor, kemudian isi laporan dan keterangan.

1719.KETUA: ASWANTO

Baik.

1720.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada, ya, walaupun tidak teregister, tapi ada di situ, ya yang 7 itu?

1721.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ada, Yang Mulia.

1722.KETUA: ASWANTO

Petugas, coba tolong diambil! Saudara bawa berapa rangkap?

1723.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Kebetulan Cuma 1 rangkap, Yang Mulia.

1724.KETUA: ASWANTO

Ya, sudah ambil, fotokopi! Cukup, Yang Mulia? Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, mengenai yang laporan TPS 1 dan TPS 02 Kampung Baru termasuk di situ juga? Karena Saudara kan tidak melampirkan di bukti Saudara mengenai laporan TPS 01 dan 02 Kampung Baru, serta kesimpulan enggak ada di kami.

1725.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia karena itu proses penyelesaian itu tanggal 10 Februari.

1726.KETUA: ASWANTO

Itu berarti tidak ada di alat bukti Saudara, ya?

1727.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Tidak ada, Yang Mulia

1728.KETUA: ASWANTO

Termasuk yang kosong satu, bandar panjang itu laporan dan kesimpulannya juga tidak ada, ya?

1729.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Itu ada ... ada, Yang Mulia.

1730.KETUA: ASWANTO

P ... di PK berapa itu Bapak? Yang 01 itu masuk ke Sentral Gakkumdu?

1731.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

01

1732.KETUA: ASWANTO

Bandar Panjang.

1733.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Masuk ... masuk, Yang Mulia.

1734.KETUA: ASWANTO

Masuk.

1735.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Masuk, Yang Mulia.

1736.KETUA: ASWANTO

Apa output-nya kalau sudah dari melalui ... sudah melalui tahap Gakkumdu itu. Kesimpulan atau apa?

1737.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Kesimpulan pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu

1738.KETUA: ASWANTO

Kesimpulan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Nih, di bukti kami enggak ada kami sudah (...)

1739.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Status, Yang Mulia. Status ... status laporan

1740.KETUA: ASWANTO

Status laporan?

1741.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

Ya.

1742.KETUA: ASWANTO

Bab berapa?

1743.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

47.

1744.KETUA: ASWANTO

PK berapa, Mas?

1745.BAWASLU: ALI AGA HASIBUAN

PK-47, Yang Mulia.

1746.KETUA: ASWANTO

PK-47. Ada? Coba ba ... Bapak ... anu ... Bawaslu ... Bawaslu ke depan, Pak. Biar kita pastikan. Tolong ditunjukkan! Yang lain juga kalau ada perwakilan yang mau melihat, boleh. Langsung sini saja. Motong saja, enggak apa-apa. 1 aja, Pak.

1747.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Cukup satu, Pak. Dari tiap (...)

1748.KETUA: ASWANTO

Dari tiap Pemohon (...)

1749.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pemohon, Termohon.

1750.KETUA: ASWANTO

Pemohon juga kalau mau, silakan.

1751.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pihak Terkait, silakan.

1752.KETUA: ASWANTO

Coba. Bapak lihat dulu PK berapa itu. Biar kita pastikan. PK berapa? Coba lihat PK-9.

Tanya Pemohon, suatu ketika Bapak mungkin bisa menjadi satu tim. Jadi jangan suasana panas di persidangan sampai di ... di depan pintu di buang semua itu. Kita keluar dingin semua. Demikian juga dengan Termohon, bisa saja nanti jadi kuasanya Terkait ini.

Baik. Kita sahkan bukti dulu, ya.

Pemohon memasukan bukti tambahan P5.1b sampai dengan P27. Betul ya? Sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian pihak Termohon memasukan bukti tambahan. T-22 sampai dengan T-26. Betul, ya? Sudah diverifikasi juga, lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian pihak ... pihak Terkait memasukan bukti PT-150 sampai dengan PT-201. Betul ya? Sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Baik. Terima kasih untuk semua pihak dengan demikian sidang kita selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18.12 WIB

Jakarta, 25 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

